



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BUKU STATISTIK SEKTORAL BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR



Sebarkan Informasi Bermanfaat Meski Satu Kalimat

TIM PENYUSUN
DATA STATISTIK SEKTORAL
BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN INFRASTRUKTUR
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H.

Agung Pramuja, S.Adm.

Petronela Prada Peni, S.Sos.

Ir. Dede Suhartini, M.Si.

Dadang Efendi, S.Sos.

Mohamad Sahrul, S.E.

Sunari

Ida Nyoman Subagia

Indarti

Desty Natalia Hernozza, S.Adm.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rakhmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Buku Statistik Sektorale Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dengan baik dan tepat waktu.

Buku Statistik Sektorale Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan dan penyajian ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai data dan informasi terkait dengan Sumber Daya Alam (SDA) dan Infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum. Data yang disajikan mengacu pada sumber data sebagai produsen data, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Biro APP dan LPBJP Provinsi NTB dan sumber lainnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku peningkatan pendapatan asli daerah ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan yang akan datang. Semoga buku peningkatan pendapatan asli daerah ini dapat bermanfaat bagi pengguna data terutama yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah.

Mataram, September 2019

Plt. Kepala Dinas,



I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H.

NIP. 19640514 198303 1 005

STATISTIK KOMINFOTIK NTB

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I KONDISI WILAYAH	1
1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Provinsi NTB.....	1
1.2. Jumlah Penduduk Provinsi NTB.....	3
1.3. Pertumbuhan Penduduk	5
1.4. Kepadatan Penduduk	5
1.5. Struktur dan Komposisi Penduduk.....	6
BAB II DINAS PARIWISATA	9
2.1. Kunjungan Wisatawan.....	9
2.2. Hotel.....	12
2.3. Restoran	15
BAB III DINAS PERHUBUNGAN	19
3.1. Lalu Lintas Angkutan Darat.....	19
3.2. Lalu Lintas Angkutan Laut	23
3.3. Lalu Lintas Angkutan Udara	25
3.4. Jumlah Pengaduan Perhubungan	28
BAB IV BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	31
4.1. Data Kejadian Bencana	31
4.2. Rekapitulasi Wilayah Terdampak Kekeringan	34
4.3. Sekolah Aman Bencana	35
4.4. Desa Tangguh Bencana.....	38
BAB V DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	41
5.1. Daerah Irigasi.....	41

5.2	Embung	45
5.3	Mata Air	46
5.4	Ruas Jalan Provinsi	48
5.5	Air Minum	51
BAB VI	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	53
6.1	Rumah Tidak Layak Huni.....	53
6.2	Pembangunan Rumah Layak Huni.....	56
6.3	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	58
6.4	Pembangunan Rumah Khusus	59
6.5.	Pembangunan Rumah Susun (Rusun)	61
BAB VII	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	65
7.1	Perencanaan Pembangunan Ekonomi.....	65
7.2	Perencanaan Pemerintahan NTB.....	68
7.3	Perencanaan Bidang Pendidikan dan Kesehatan	68
7.4	Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Provinsi NTB.....	69
7.5	Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	71
7.6	Penyusunan Peta	73
7.7	Kajian Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya	74
7.8	Kajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi	75
BAB VIII	DINAS KOMINFOTIK.....	77
8.1	Short Message Service Centre (SMS CENTRE)	78
8.2	Pengadaan Secara Online.....	80
8.3	Kampung Media.....	82
8.4	Pelayanan Mobil Calling.....	83
8.5	Aktivitas Website dan Medsos Perangkat Daerah Provinsi NTB...	88
8.6	Website https://www.ntbprov.go.id/	90

8.7	Data Statistik Sektoral	91
8.8	Rekapitulasi Pembangunan BTS di NTB	92
8.9	Perkembangan Penyelenggara Radio Siaran FM	93
8.10	Anggota ORARI dan RAPI.....	94
8.11	Ujian Negara Amatir Radio	96
8.12	Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	97
BAB IX	BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP.....	99
BAB X	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	101
10.1	Kawasan Hutan dan Planologi.....	101
10.2	Penutupan Lahan.....	106
10.3	Hewan dan Tumbuhan Endemik	108
10.4	Lahan Kritis	111
10.5	Rehabilitasi Lahan.....	112
10.6	Hutan Tanaman Rakyat.....	114
10.7	Hutan Kemasyarakatan	115
10.8	Penerimaan PSDH-DR	116
10.9	Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	117
10.10	Pengelola Sampah yang Di Bina.....	120
10.11	Produksi Sampah	121
10.12	Dokumen Lingkungan	122
10.13	Pengaduan Kasus Lingkungan	123
10.14	Penyelesaian Tenurial	124
10.15	Jumlah Perusahaan Yang Diproper.....	126
10.16	Kelompok Usaha Produktif Provinsi NTB	127
10.17	Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan.....	129
10.18	Kelompok Tani Hutan.....	130
BAB XI	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	133

11.1	Perizinan Tambang Menurut Jenisnya	133
11.2	Perizinan Tambang Mineral, Bukan Logam dan Batuan.....	135
11.3	Luas Lahan Tambang.....	137
11.4	Royalti PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT)	140
11.5	Elektrifikasi.....	141
11.6	Biogas.....	144
11.7	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	145
11.8	Daftar Sumur Eksplorasi dan Sumur Produksi	148
BAB XII	PENUTUP.....	151
12.1.	Kesimpulan	151
12.2.	Saran.....	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Provinsi NTB	2
Gambar 1.2.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2018.....	4
Gambar 1.3.	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2018.....	6
Gambar 1.4.	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2018.....	8
Gambar 2.1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) Ke Provinsi NTB	10
Gambar 2.2.	Perkembangan Kunjungan Wisnus Setiap Bulan Tahun 2018.....	10
Gambar 2.3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) ke Provinsi NTB.....	11
Gambar 2.4.	Perkembangan Kunjungan Wisman Setiap Bulan Tahun 2018.....	12
Gambar 2.5.	Perkembangan Hotel Bintang di Provinsi NTB	13
Gambar 2.6.	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di Provinsi NTB.....	14
Gambar 2.7.	Perkembangan Hotel Non Bintang di Provinsi NTB	14
Gambar 2.8.	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Non Bintang di Provinsi NTB.....	15
Gambar 2.9.	Perkembangan Restoran di Provinsi NTB	16
Gambar 2.10.	Perkembangan Restoran di Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2018.....	16
Gambar 3.1.	Jumlah Kendaraan Melalui Terminal di NTB Tahun 2018.....	21
Gambar 3.2.	Jumlah Penumpang Melalui Terminal di NTB Tahun 2018.....	22
Gambar 3.3.	Jumlah Penumpang Melalui Pelabuhan di NTB Tahun 2018 ...	23

Gambar 3.4.	Jumlah Bongkar Muat Barang Melalui Pelabuhan di NTB Tahun 2018.....	24
Gambar 3.5.	Bandar Udara di Provinsi NTB Tahun 2014-2018.....	25
Gambar 3.6.	Jumlah Pesawat yang Datang dan Berangkat Tahun 2018.....	26
Gambar 3.7.	Jumlah dan Perkembangan Penumpang yang Melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (ZAM)	27
Gambar 3.8.	Jumlah dan Perkembangan Penumpang yang Melalui Bandara Sultan M. Kaharuddin Sumbawa	27
Gambar 3.9.	Jumlah dan Perkembangan Penumpang yang Melalui Bandara Sultan M. Salahuddin Bima	28
Gambar 3.10.	Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perhubungan Berdasarkan Jenis Sarana Pengaduan	29
Gambar 4.1.	Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi NTB Tahun 2014-2018	32
Gambar 4.2.	Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam	33
Gambar 4.3.	Rekapitulasi Wilayah Terdampak Bencana Tahun 2017-2018	34
Gambar 4.4.	Sebaran Lokasi Sekolah Aman Bencana di Provinsi NTB Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.....	37
Gambar 4.5.	Sebaran Lokasi Desa Tangguh Bencana di Provinsi NTB Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.....	40
Gambar 5.1.	Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota.....	42
Gambar 5.2.	Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang Menjadi Kewenangan Provinsi sampai dengan Tahun 2019	43
Gambar 5.3.	Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat sampai dengan Tahun 2019	44
Gambar 5.4.	Perbandingan Jumlah Daerah Irigasi (DI) Wewenang Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	44

Gambar 5.5.	Rekapitulasi Jumlah Embung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019	45
Gambar 5.6.	Total Pemanfaatan Embung Sebagai Irigasi	46
Gambar 5.7.	Jumlah dan Perkembangan Mata Air di Provinsi NTB	47
Gambar 5.8.	Perkembangan Panjang Jalan Provinsi Berdasarkan Bahan Penyusun Tahun 2017-2018	49
Gambar 5.9.	Persentase Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi sampai dengan Tahun 2018.....	49
Gambar 5.10.	Jumlah Jembatan Provinsi di NTB sampai dengan Tahun 2018 Menurut Komponen Penyusun Jembatan	50
Gambar 5.11.	Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2017-2018.....	51
Gambar 5.12.	Jumlah KK Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2017-2018.....	52
Gambar 6.1.	Presentase RTLH dan RLH Berdasarkan Basis Data Perumahan Tahun 2018.....	54
Gambar 6.2.	Peta Sebaran Lokasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Basis Data Perumahan Tahun 2018.....	55
Gambar 6.3.	Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.....	57
Gambar 6.4.	Jumlah Rumah BPS yang Telah Diperbaiki di Provinsi NTB Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.....	58
Gambar 6.5.	Jumlah Rumah BPS yang Telah Diperbaiki di Provinsi NTB Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.....	59
Gambar 6.6.	Persentase Pemanfaatan Pembangunan Rumah Khusus di Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2018.....	60
Gambar 6.7.	Jumlah Pembangunan Rumah Khusus di Provinsi NTB Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2018	61

Gambar 6.8.	Jumlah Pembangunan Rumah Susun di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2018.....	62
Gambar 6.9.	Persentase Pembangunan Rusun di Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2018 Berdasarkan Peruntukannya	63
Gambar 8.1.	Rekap Pengaduan SMS Center Menurut Bulan Tahun 2016-2018	79
Gambar 8.2.	Rekap Pengaduan Melalui SMS Center Menurut Kategori Tahun 2018.....	79
Gambar 8.3.	Data Jumlah Layanan Pengadaan secara <i>Online</i> di NTB Tahun 2017	81
Gambar 8.4.	Data Jumlah Komunitas Kampung Media Tahun 2017-2018	82
Gambar 8.5.	Jumlah Informasi/Postingan Perangkat Daerah Lingkup Pemrov NTB Tahun 2017-2018 Menurut Jenis Media/Sarananya	88
Gambar 8.6.	Jumlah Informasi/Postingan Perangkat Daerah Lingkup Pemrov NTB Tahun 2018 Menurut Perangkat Daerahnya.....	89
Gambar 8.7.	Data Jumlah Pengunjung Website https://www.ntbprov.go.id/	90
Gambar 8.8.	Rekapitulasi Pembangunan BTS pada Area Blankspot di NTB sampai dengan Tahun 2017	93
Gambar 8.9.	Perkembangan Penyelenggara Radio Siaran FM yang telah ISR Tahun 2017-2018	94
Gambar 8.10.	Perkembangan Pengguna ORARIdan RAPI Tahun 2017.....	95
Gambar 9.1.	Rekapitulasi Lelang di Provinsi NTB pada Tahun 2014 sampai dengan 2018	100
Gambar 10.1.	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2018	102

Gambar 10.2.	Luas Kawasan Hutan Konservasi Di Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2018.....	104
Gambar 10.3.	Presentase Luas Hutan Lindung Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2018.....	105
Gambar 10.4.	Presentase Hutan Produksi Menurut Jenisnya di Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2018	106
Gambar 10.5.	Persentase Tutupan Lahan dalam Kawasan Hutan di Provinsi NTB Menurut Tipe Tutupan sampai dengan Tahun 2018	107
Gambar 10.6.	Data Luas Kawasan Kritis dan Sangat Kritis Menurut Fungsi Hutan di Provinsi NTB Kondisi Tahun 2018	112
Gambar 10.7.	Data Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi NTB	113
Gambar 10.8.	Luas Hutan Tanaman Rakyat di Provinsi NTB.....	114
Gambar 10.9.	Gambar 10.12. Luas Hutan Kemasyarakatan di Provinsi NTB.....	115
Gambar 10.10.	Penerimaan PSDH-DR di Provinsi NTB Tahun 2014-2018.....	117
Gambar 10.11.	Jumlah Kelompok Pengelola Sampah yang Dibina di Provinsi NTB.....	120
Gambar 10.12.	Jumlah Produksi Sampah di Provinsi NTB Tahun 2013-2018	121
Gambar 10.13.	Jumlah KUP di Provinsi NTB Tahun 2012-2018.....	127
Gambar 11.1.	Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018.....	134
Gambar 11.2.	Perbandingan Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral (Logam), Bukan Logam dan Batuan di Nusa Tenggara Barat.....	135
Gambar 11.3.	Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral (Logam), Bukan Logam dan Batuan di NTB Tahun 2014-2018.....	136

Gambar 11.4.	Luas Lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018	137
Gambar 11.5.	Perbandingan Luas Lahan Tambang Berdasarkan IUP dan IPR Mineral (Logam), Bukan Logam dan Batuan di Nusa Tenggara Barat	138
Gambar 11.6.	Luas Lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral (Logam), Bukan Logam dan Batuan di NTB Tahun 2014-2018.....	139
Gambar 11.7.	Pembayaran Royalti PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) Tahun 2014-2016/PT. AMNT Tahun 2017-2018 Menurut Jenis Konsentrasinya	140
Gambar 11.8.	Jumlah Rumah Tangga dan Rumah Tangga Elektrifikasi Tahun 2014-2018	141
Gambar 11.9.	Perbandingan Rumah Tangga Elektrifikasi PLN dan Non-PLN Tahun 2014-2018	142
Gambar 11.10.	Rasio Elektrifikasi di NTB Tahun 2014-2018.....	143
Gambar 11.11.	Rasio Elektrifikasi di NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018.....	143
Gambar 11.12.	Jumlah Biogas Rumah di NTB Tahun 2014-2018.....	144
Gambar 11.13.	Jumlah Biogas Rumah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018.....	145
Gambar 11.14.	Rekapitulasi Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) SHS dan Daya yang Dihasilkan di NTB Tahun 2014-2018	146
Gambar 11.15.	Rekapitulasi Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dan Daya yang Dihasilkan di NTB Tahun 2014-2018	147
Gambar 11.16.	Rekapitulasi Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) SHS dan Daya yang Dihasilkan di NTB Tahun 2018 Menurut Kabupaten/Kota.....	147

Gambar 11.17. Rekapitulasi Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dan Daya yang Dihasilkan di NTB Tahun 2018 Menurut Kabupaten/Kota	148
Gambar 11.18. Rekapitulasi Pembangunan Sumur Bor Air Tanah di NTB Menurut Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2018	149
Gambar 11.19. Rekapitulasi Pembangunan Sumur Bor Air Tanah di NTB Tahun 2014-2018	149

STATISTIK KOMINFOTIK NTB

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Luas Wilayah Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi NTB Tahun 2018.....	2
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2018	4
Tabel 1.3.	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2014 – 2018.....	5
Tabel 1.4.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi NTB Tahun 2014-2018	7
Tabel 4.1.	Daftar Sekolah Aman Bencana di Provinsi NTB Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018	35
Tabel 4.2.	Daftar Desa Tangguh Bencana di Provinsi NTB Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018	38
Tabel 6.1.	Jumlah Rumah yang Terkategori Milik Sendiri Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018	55
Tabel 7.1.	Data Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2015	66
Tabel 7.2.	Data Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2016	66
Tabel 7.3.	Data Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2017	67
Tabel 7.4.	Data Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2018	67
Tabel 7.5.	Data Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik Provinsi NTB Tahun 2015 - 2018.....	68
Tabel 7.6.	Data Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2017.....	69

Tabel 7.7.	Data Jumlah Dokumen Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Provinsi NTB Tahun 2015	70
Tabel 7.8.	Data Jumlah Dokumen Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Provinsi NTB Tahun 2016	70
Tabel 7.9.	Data Jumlah Dokumen Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Provinsi NTB Tahun 2017	70
Tabel 7.10.	Data Jumlah Dokumen Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Provinsi NTB Tahun 2018	71
Tabel 7.11.	Data Jumlah Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2015 – 2018...	72
Tabel 7.12.	Data Jumlah Peta yang Disusun Tahun 2016	73
Tabel 7.13.	Data Jumlah Peta yang Disusun Tahun 2017	74
Tabel 7.14.	Data Jumlah Peta yang Disusun Tahun 2018	74
Tabel 7.15.	Data Jumlah Kajian Penelitian Dan Pengembangan Sosial Dan Budaya yang Dilaksanakan Tahun 2017	74
Tabel 7.16.	Data Jumlah Kajian Penelitian Dan Pengembangan Sosial Dan Budaya yang Dilaksanakan Tahun 2018	75
Tabel 7.17.	Data Jumlah Kajian Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi dan Wilayah yang Dilaksanakan Tahun 2017-2018	75
Tabel 8.1.	Pelayanan Mobil Calling Tahun 2018	84
Tabel 8.2.	Tabel 1 Jumlah Buku Statistik Tahun 2017-2019.....	92
Tabel 8.3.	Ujian Negara Amatir Radio Tahun 2017.....	96
Tabel 8.4.	Ujian Negara Amatir Radio Tahun 2018.....	96
Tabel 8.5.	Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	97
Tabel 10.1.	Daftar Jenis Tumbuhan Endemik NTB	108
Tabel 10.2.	Daftar Jenis Serangga Endemik NTB	110
Tabel 10.3.	Daftar Jenis Reptil Endemik NTB.....	111
Tabel 10.4.	Daftar Jenis Mamalia Endemik NTB.....	111

Tabel 10.5.	Rincian Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi NTB	118
Tabel 10.6.	Jumlah Validasi Dokumen Lingkungan Provinsi NTB Tahun 2015-2018	123
Tabel 10.7.	Jumlah Kasus Pengaduan Kasus Lingkungan	124
Tabel 10.8.	Data Tindak Lanjut Penyelesaian Tenurial, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi NTB Tahun 2014-2018.....	125
Tabel 10.9.	Jumlah Perusahaan yang di Proper Tahun 2011-2018	127
Tabel 10.10.	Kelompok Usaha Produktif di Provinsi NTB Tahun 2012-2016	128
Tabel 10.11.	Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan di Provinsi NTB Tahun 202-2018.....	129
Tabel 10.12.	Kelompok Tani Hutan Kelas Madya Provinsi NTB.....	130

STATISTIK KOMINFOTIK NTB

BAB I

KONDISI WILAYAH

1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah Provinsi NTB

Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 20.153,15 km². Provinsi NTB terdiri atas dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil. Dari 421 pulau yang ada di Provinsi NTB, terdapat 40 pulau yang sudah berpenghuni.

Secara astronomis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°05' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis, Provinsi NTB memiliki batas wilayah sebelah utara Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Lombok dan Provinsi Bali, serta sebelah timur Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara Administratif Provinsi NTB terdiri dari delapan kabupaten dan dua kota yang terletak di dua pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan 116 wilayah kecamatan dan 1.137 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah wilayah kecamatan terbanyak, yaitu 24 Kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah administrasi desa/kelurahan terbanyak dengan 254 desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan.

Kondisi geografis NTB sangat bervariasi. Pulau Lombok terdiri atas perbukitan dengan pusat Gunung Rinjani, terletak di tengah-tengah Pulau Lombok, serta gugusan pegunungan yang terletak di bagian utara dan selatan. Sedangkan dataran rendah merupakan kawasan pertanian yang terhampar di bagian tengah memanjang dari timur ke barat. Sedangkan di Pulau Sumbawa, gugusan pegunungan terdapat disepanjang pulau dan dataran rendah terletak antara bukit di sepanjang pantai utara Pulau Sumbawa.



Gambar 1.1. Peta Provinsi NTB

Dilihat dari komposisi wilayah per pulau, Pulau Sumbawa luasnya mencapai 15.414,50 km² atau 76,49 persen dari luas daratan Provinsi NTB dan luas Pulau Lombok mencapai mencapai 4.738,65 km² atau 23,51 persen dari keseluruhan luas daratan Provinsi NTB. Adapun bila dirinci berdasarkan luas daratan per kabupaten/kota, kabupaten dengan wilayah terluas adalah Kabupaten Sumbawa dengan luas daratan mencapai 6.643,98 km² (32,97 persen dari luas NTB) dan wilayah tersempit adalah Kota Mataram dengan luas 61,3 km² (0,30 persen dari luas NTB). Kabupaten yang ada di Pulau Sumbawa memiliki rata-rata luas lebih besar dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Pulau Lombok. Gambaran luas wilayah masing-masing kabupaten/kota di provinsi terangkum dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi NTB Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	
		Daratan	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mataram	61,3	0,30
2	Lombok Barat	1.053,87	5,23

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	
		Daratan	Persentase
3	Lombok Tengah	1.208,40	6,00
4	Lombok Timur	1.605,55	7,97
5	Lombok Utara	809,53	4,02
PULAU LOMBOK		4.738,65	23,51
6	Sumbawa	6.643,98	32,97
7	Dompu	2.324,60	11,53
8	Bima	4.389,40	21,78
9	Kota Bima	207,5	1,03
10	Sumbawa Barat	1.849,02	9,17
PULAU SUMBAWA		15.414,50	76,49
PROVINSI NTB		20.153,15	100

Sumber : Kanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB (NTB Dalam Angka 2018)

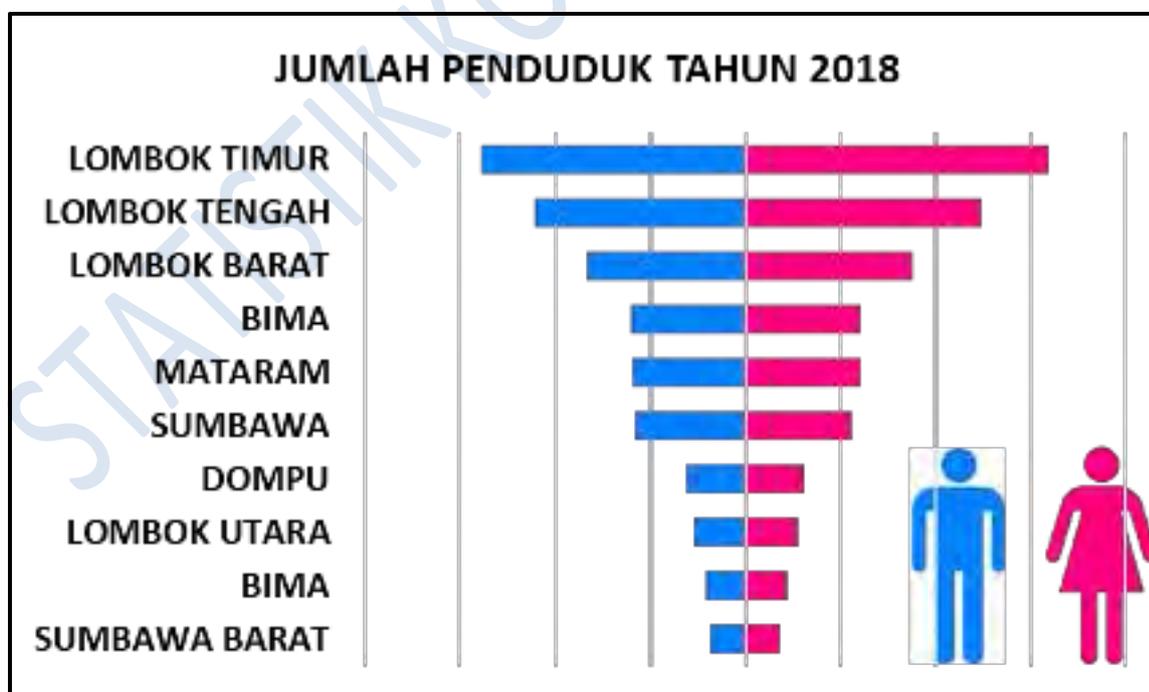
1.2. Jumlah Penduduk Provinsi NTB

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Tahun 2010 – 2020, jumlah penduduk Provinsi NTB pada Tahun 2018 mencapai 5.013.687 jiwa. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 2.433.731 jiwa dan perempuan sebanyak 2.579.956 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,33. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 1.192.110 jiwa atau 23,77 persen dari total penduduk Provinsi NTB dan yang terkecil berada di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 144.707 jiwa atau 2,88 persen dari total penduduk Provinsi NTB. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi NTB pada tahun 2018 sebesar 94,33 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih mendominasi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jumlah Penduduk di NTB Tahun 2018 menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk			
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Lombok Barat	335.111	350.050	685.161	95,73
2	Lombok Tengah	444.480	494.929	939.409	89,80
3	Lombok Timur	555.241	636.869	1.192.110	87,18
4	Sumbawa	231.486	222.311	453.797	104,12
5	Dompu	125.816	123.063	248.879	102,23
6	Bima	240.993	242.908	483.901	99,21
7	Sumbawa Barat	73.382	71.325	144.707	102,88
8	Lombok Utara	107.729	110.804	218.533	97,22
9	Kota Mataram	236.226	241.250	477.476	97,91
10	Kota Bima	83.267	86.447	169.714	96,32
Jumlah		2.433.731	2.579.956	5.013.687	94,33

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020



Gambar 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2018

1.3. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Provinsi NTB terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2010, jumlah penduduk di NTB mencapai 4.516.062 jiwa, sedangkan pada Tahun 2018 meningkat menjadi 5.013.687 atau mengalami pertambahan penduduk sebesar 497.625 jiwa selama periode 2010 - 2018. Selain mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, penduduk di Provinsi NTB pada Tahun 2018 terdistribusi tidak merata, karena 70,06% (3.512.689 jiwa) berdomisili di Pulau Lombok dan sebanyak 29,94% (1.500.998 jiwa) berdomisili di Pulau Sumbawa.

1.4. Kepadatan Penduduk

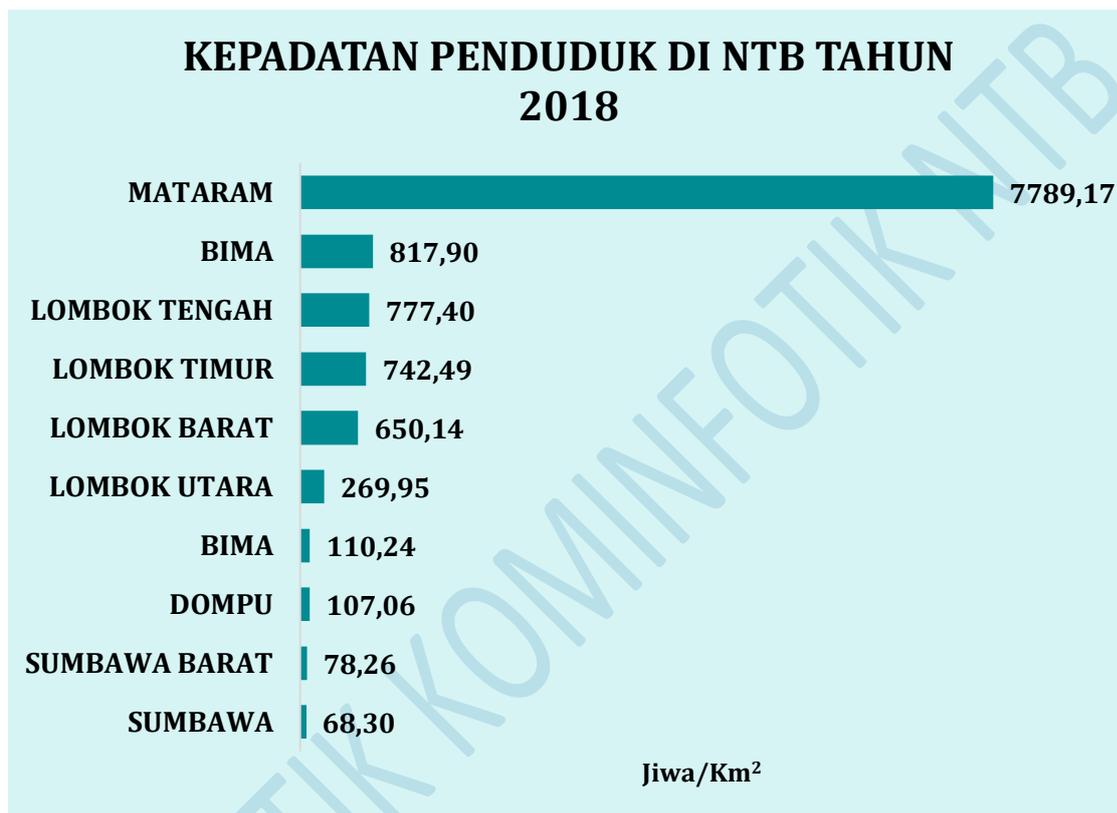
Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, kepadatan penduduk di Provinsi NTB setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk mencapai 237 jiwa per km² pada Tahun 2014 meningkat menjadi 249 jiwa per km² pada Tahun 2018. Sementara itu pada Tahun 2018 menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Kota Mataram memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 7.789 jiwa per km², sedangkan Kabupaten Sumbawa memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 68 jiwa per km². Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut berikut.

Tabel 1.3. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2014 – 2018

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lombok Barat	611,64	621,42	631,13	640,71	650,14
Lombok Tengah	747,63	755,44	763,07	770,27	777,40
Lombok Timur	718,62	725,00	731,08	736,95	742,49
Sumbawa	65,71	66,39	67,05	67,68	68,30
Dompu	100,95	102,55	104,06	105,56	107,06
Bima	105,58	106,78	107,96	109,12	110,24
Sumbawa Barat	70,16	72,14	74,13	76,20	78,26
Lombok Utara	259,57	262,21	264,84	267,46	269,95
Kota Mataram	7.195,17	7.344,63	7.492,89	7.642,89	7.789,17

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Bima	753,73	769,81	786,03	801,96	817,90
Nusa Tenggara Barat	236,88	239,94	242,95	245,90	248,78

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Data Diolah)



Gambar 1.3. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2018

1.5. Struktur dan Komposisi Penduduk

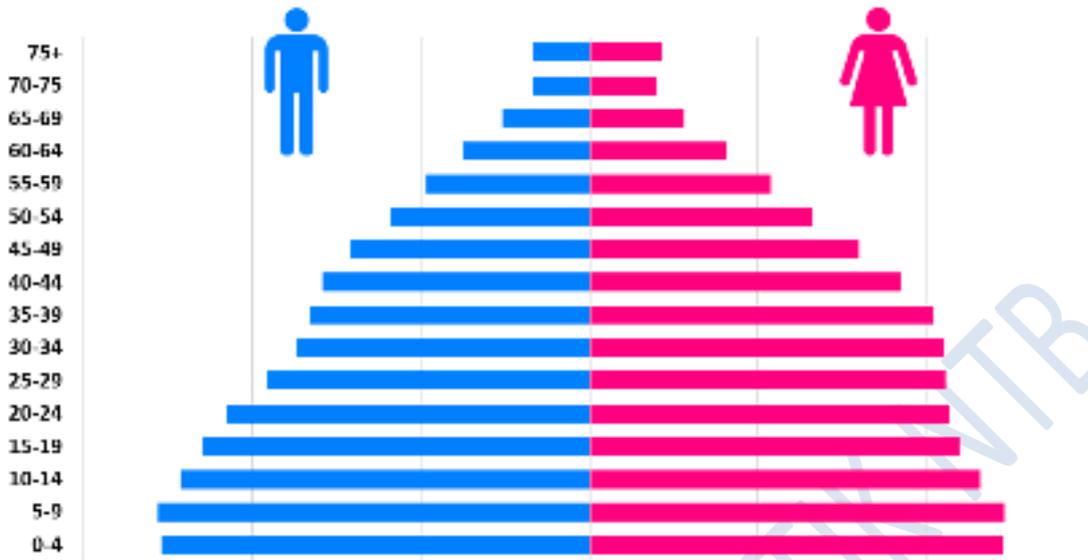
Menurut kelompok umur, komposisi penduduk pada Tahun 2018 terbanyak pada usia 0-4 tahun yaitu sejumlah 501.136 jiwa, sedangkan komposisi penduduk terkecil pada kelompok umur 70-74 tahun sebanyak 70.554 jiwa. Secara keseluruhan penduduk yang produktif atau kelompok umur 15-64 tahun sejumlah 3.237.988 atau sekitar 65,34 persen dari jumlah keseluruhan penduduk di Provinsi NTB.

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Provinsi NTB Tahun 2014-2018

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	0 - 4	508.589	506.430	503.860	501.136	498.313
2	5 - 9	483.583	490.857	496.174	499.474	501.281
3	10 - 14	454.148	457.421	461.767	467.478	474.424
4	15 - 19	441.739	443.911	445.655	446.785	447.447
5	20 - 24	415.551	418.081	421.186	424.665	427.863
6	25 - 29	391.346	393.260	395.578	398.504	401.456
7	30 - 34	378.970	380.251	381.870	382.417	382.805
8	35 - 39	354.647	359.625	362.715	366.131	369.102
9	40 - 44	317.781	324.628	331.384	337.020	342.199
10	45 - 49	268.053	275.973	284.312	292.801	301.098
11	50 - 54	222.763	229.545	235.956	242.813	250.034
12	55 - 59	178.281	185.008	192.011	198.232	204.065
13	60 - 64	129.588	135.331	141.558	148.620	156.011
14	65 - 69	94.951	98.659	101.618	104.826	108.477
15	70 - 74	64.849	66.122	68.158	70.554	73.249
16	75+	68.956	70.475	72.360	74.122	75.863
Jumlah		4.773.795	4.835.577	4.896.162	4.955.578	5.013.687

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK USIA TAHUN 2018



Gambar 1.4. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2018

BAB II

DINAS PARIWISATA

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, seni dan budaya serta tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi.

Sektor pariwisata NTB memiliki potensi yang besar dengan banyaknya destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia, mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota), Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, pesona gili-gili kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial. Pembangunan pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

2.1 Kunjungan Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya. Organisasi Wisata Dunia (WTO) menyebut wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. Terdapat dua jenis wisatawan yaitu Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman).

2.1.1. Wisatawan Nusantara

Wisatawan Nusantara (Wisnus) atau *domestic tourists* adalah seseorang yang perjalanan di wilayah teritori suatu negara dalam hal ini adalah Indonesia dengan lama perjalanan kurang dari enam bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi objek wisata komersial dan/atau

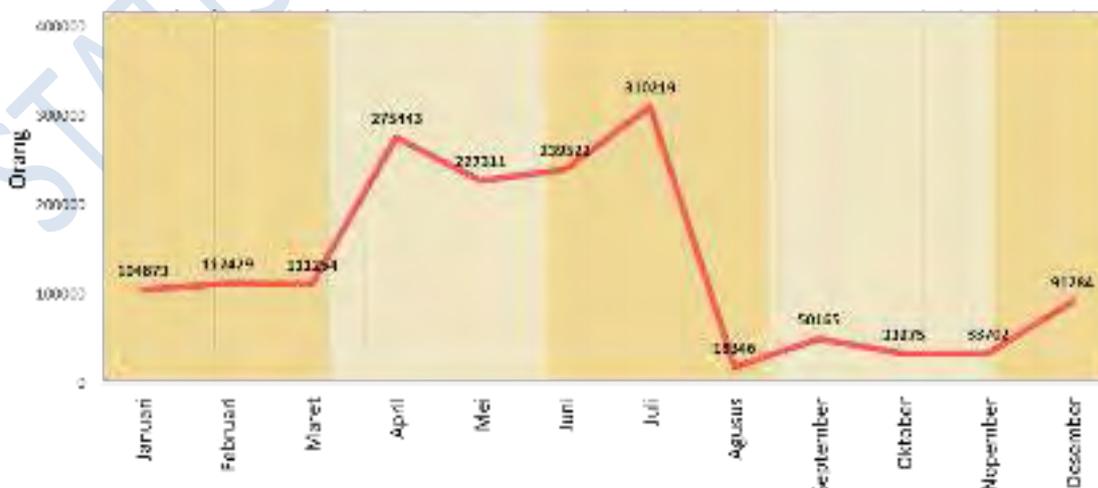
menginap di akomodasi komersial dengan jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 kilometer. Perkembangan kunjungan wisnus dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) Ke Provinsi NTB

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Pada periode Tahun 2014-2018 jumlah wisnus yang datang ke NTB mengalami peningkatan. Rata-rata Tahun 2014-2018 jumlah wisatawan nusantara (wisnus) yang berkunjung ke Provinsi NTB meningkat 19,51 persen atau sejumlah 731.007 orang. Kunjungan wisnus paling tinggi terjadi pada Tahun 2017 sejumlah 2.078.654 orang dan menurun sebesar 22,65 persen pada Tahun 2018 menjadi 1.307.823 orang.



Gambar 2.2. Perkembangan Kunjungan Wisnus Setiap Bulan Tahun 2018

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Pada Tahun 2018, jumlah kunjungan wisnus ke Provinsi NTB mencapai 1.607.823 orang. Rata-rata pada Tahun 2018 kunjungan wisnus ke Provinsi NTB meningkat 35,36 persen setiap bulannya. Kunjungan wisnus paling tinggi pada bulan Juli yaitu sejumlah 310.219 orang dan mengalami penurunan sebesar 94,09 persen pada Bulan Agustus menjadi 18.346 orang.

2.1.2. Wisatawan Mancanegara

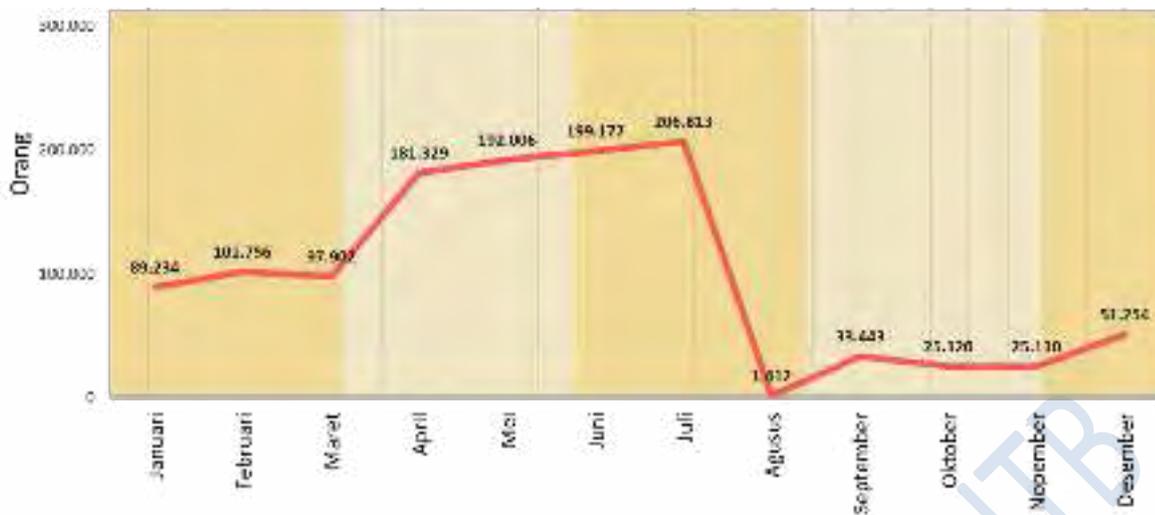
Wisman atau *foreign tourists* sesuai dengan rekomendasi *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari dua belas bulan.



Gambar 2.3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) ke Provinsi NTB

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Pada periode Tahun 2014-2018 jumlah wisnus yang datang ke NTB mengalami peningkatan. Rata-rata Tahun 2014-2018 jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Provinsi NTB meningkat 19,51 persen atau sejumlah 452.250 orang. Kunjungan wisman paling tinggi terjadi pada Tahun 2017 sejumlah 1.430.249 orang dan menurun sebesar 15,78 persen pada Tahun 2018 menjadi 1.204.556 orang.



Gambar 2.4. Perkembangan Kunjungan Wisman Setiap Bulan Tahun 2018

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Pada Tahun 2018, jumlah kunjungan wisman ke Provinsi NTB mencapai 1.204.556 orang. Rata-rata pada Tahun 2018 kunjungan wisnus ke Provinsi NTB menurun sejumlah 4.220 orang setiap bulannya. Kunjungan wisnus paling tinggi pada bulan Juli yaitu sejumlah 206.813 orang dan mengalami penurunan sebesar 99,32 persen pada Bulan Agustus menjadi 1.412 orang.

2.2 Hotel

Pembangunan pariwisata di NTB selama ini telah memberikan hasil yang terus meningkat. Hal tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang. Sejalan dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung, NTB dituntut untuk memperbanyak akomodasi, termasuk pula kamar dan tempat tidur hotel.

Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya. Hotel terdiri dari hotel berbintang dan hotel non bintang.

Perkembangan jumlah hotel baik bintang maupun nonbintang di provinsi NTB menunjukkan perkembangan signifikan. Pertumbuhan jumlah hotel meningkat seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.

2.2.1 Hotel Bintang

Hotel bintang atau *star hotel* adalah suatu usaha akomodasi yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pariwisata.

Pada gambar di bawah ini pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 jumlah hotel berbintang di Provinsi NTB meningkat. Angka terakhir mencatat jumlah hotel berbintang di Provinsi NTB pada Tahun 2018 yaitu sebesar 88 unit.



Gambar 2.5. Perkembangan Hotel Bintang di Provinsi NTB

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia (dalam persen). Dalam tiga tahun terakhir rata-rata TPK hotel berbintang di NTB mencapai 47,39 persen dan meningkat sebesar 4,21 persen setiap tahunnya. Perkembangan TPK hotel berbintang di Provinsi NTB Tahun 2016 sampai dengan 2018 dapat ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2.6. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di Provinsi NTB

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB

2.2.2. Hotel Non Bintang

Hotel Melati atau hotel non bintang adalah hotel yang belum memenuhi persyaratan untuk menjadi hotel bintang.

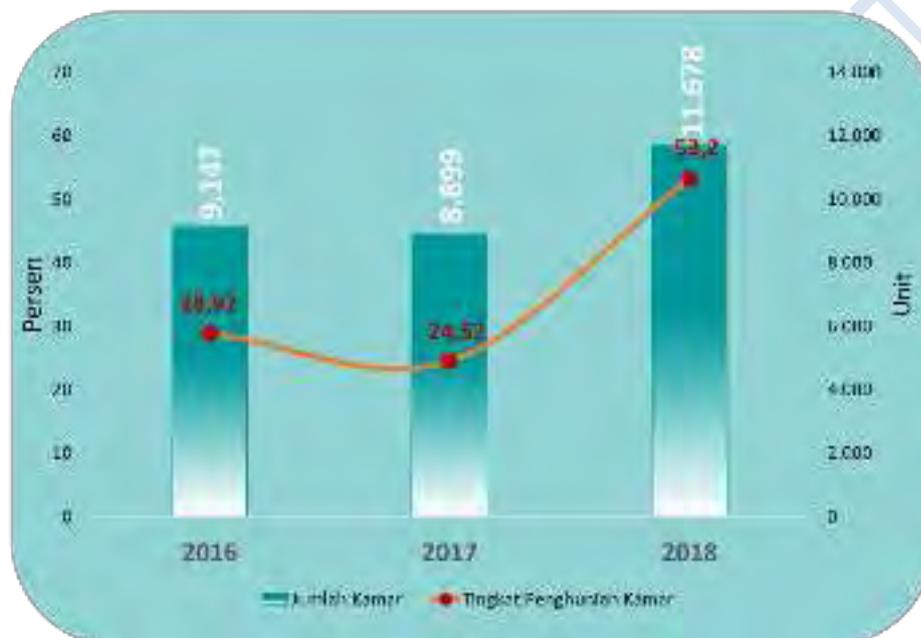
Pada gambar di bawah ini jika dilihat pada Tahun 2016-2017 jumlah hotel non bintang di Provinsi NTB mengalami penurunan akan tetapi pada Tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Angka terakhir mencatat jumlah hotel non bintang di Provinsi NTB pada Tahun 2018 yaitu sebesar 1.244 unit.



Gambar 2.7. Perkembangan Hotel Non Bintang di Provinsi NTB

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Tingkat penghunian kamar hotel non bintang di Provinsi NTB jika dilihat pada tahun 2014 sampai 2017 mengalami perkembangan yang fluktuatif jika dilihat berdasarkan grafik di bawah ini. Dalam tiga tahun terakhir persentase rata-rata TPK hotel non bintang sebesar 35,54 persen dan tumbuh sebesar 12,14 persen setiap tahunnya. Peningkatan paling besar terjadi pada Tahun 2017 menuju Tahun 2018 dimana TPK hotel non-bintang berada pada angka 24,52 persen 2018 menjadi 53,2 persen.

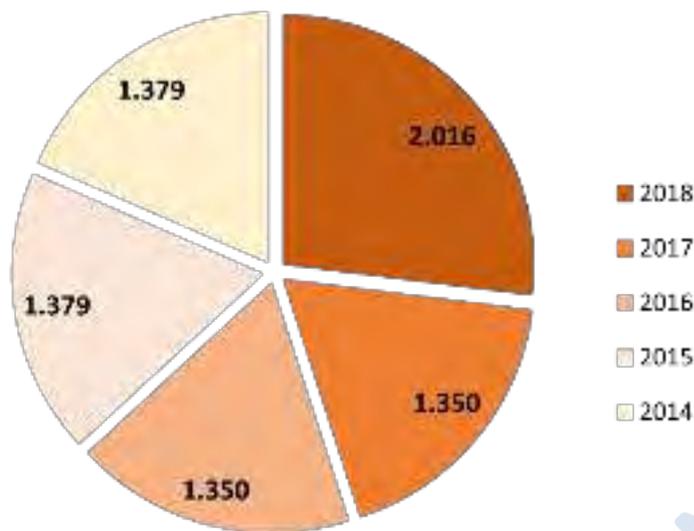


Gambar 2.8. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Non Bintang di Provinsi NTB

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB

2.3 Restoran

Restoran adalah suatu usaha komersil yang menyediakan pelayanan makan dan minum bagi umum dan di kelola secara profesional yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan kepuasan bagi tamu.



Gambar 2.9. Perkembangan Restoran di Provinsi NTB

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Jumlah restoran di Provinsi NTB berdasarkan gambar di atas mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 jumlah restoran di Provinsi NTB mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 49,33 persen sehingga menjadi 2.016 unit restoran.



Gambar 2.10. Perkembangan Restoran di Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2018

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Berdasarkan masing-masing kabupaten/kota, jumlah restoran paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok Utara yaitu sejumlah 375 unit dan paling sedikit terdapat di Kabupaten Dompu yaitu sejumlah 38 unit.

STATISTIK KOMINFOTIK NTB

STATISTIK KOMINFOTIK NTB

BAB III

DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi diantaranya perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan; perencanaan program dan kegiatan bidang perhubungan; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan; pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang perhubungan; pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan mencakup bidang darat, laut dan udara dimana masing-masing bidang melakukan pembinaan/sosialisasi pada masing-masing sektor yaitu transportasi darat, laut dan udara.

3.1. Lalu Lintas Angkutan Darat

Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan

akhir suatu perjalanan, sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, dan berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang (Departemen Perhubungan, 1996).

Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat pemberhentian sementara (transit) maka di dalam terminal akan terjadi perpindahan penumpang atau barang dari satu jenis angkutan ke jenis moda angkutan yang lainnya, sehingga tuntutan efisiensi dari suatu perjalanan bisa tercapai. Berdasarkan tuntutan tersebut maka suatu terminal harus mampu menampung, menata dan mengendalikan serta melayani semua kegiatan yang terjadi akibat adanya perpindahan kendaraan, penumpang maupun barang sehingga semua kegiatan yang ada pada terminal dapat berjalan lancar, tertib, teratur, aman dan nyaman.

3.1.1. Kendaraan yang Melalui Terminal

a. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Menurut Keputusan Menteri Nomor 35 Tahun 2003 angkutan kota dalam provinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil, bus umum yang terkait dalam trayek.

b. Angkutan Desa (AngDes)

Angkutan Desa disebut juga Angdes atau Angkudes adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek angkutan kota yang berada dalam wilayah ibu kota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

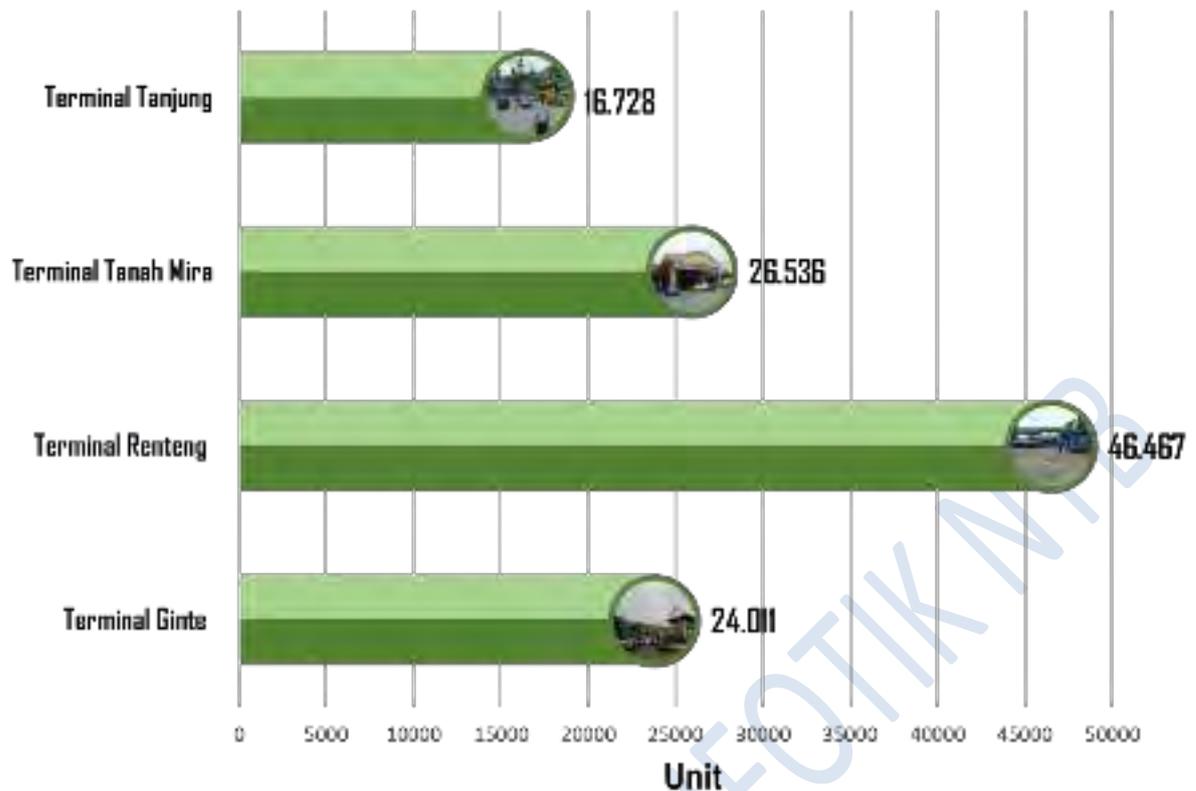
c. Travel

d. Mobil

e. Sepeda Motor

f. Mobil Pick Up

g. Cidomo



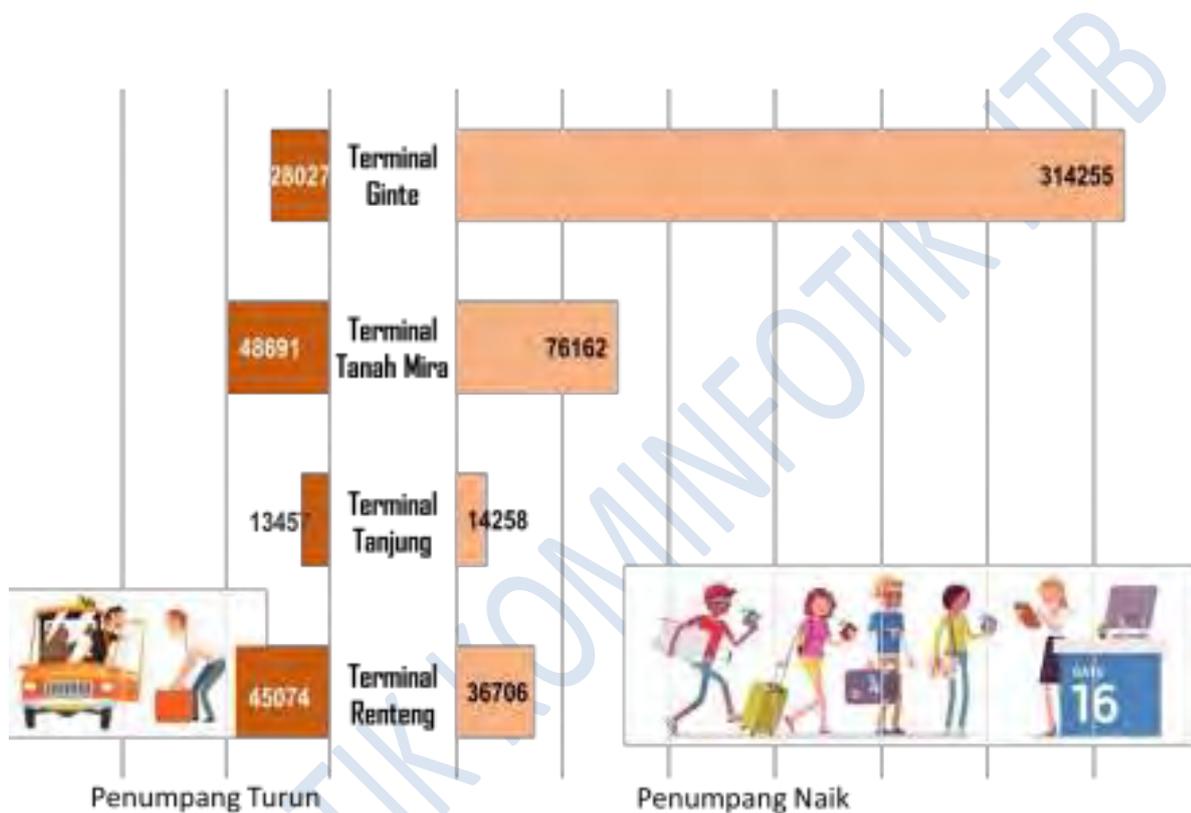
Gambar 3.1. Jumlah Kendaraan Melalui Terminal di NTB Tahun 2018

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB

Berdasarkan gambar 3.1. di atas dapat ditunjukkan bahwa jumlah kendaraan paling banyak terdapat di terminal Renteng. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas datang dan keluar kendaraan lebih banyak terjadi di Terminal Renteng. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang melalui empat terminal di NTB, jumlah penumpang paling banyak terdapat di Terminal Ginte, sehingga kendaraan yang datang dan keluar terminal renteng yaitu sepeda motor karena mampuangkut penumpang dalam jumlah yang minim. Jenis-jenis kendaraan yang melalui terminal di Provinsi NTB yaitu Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) berupa bus dan kendaraan umum, Angkutan Desa (AngDes), Sepeda Motor, Mobil, Pick Up dan Cidomo.

3.1.2. Penumpang yang Melalui Terminal

Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk melayani kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda yang lain, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi (pelataran, teluk, ruang tunggu, papan informasi, toilet, kiosk, loket, fasilitas parkir dari kendaraan pribadi dan lain-lain).



Gambar 3.2. Jumlah Penumpang Melalui Terminal di NTB Tahun 2018

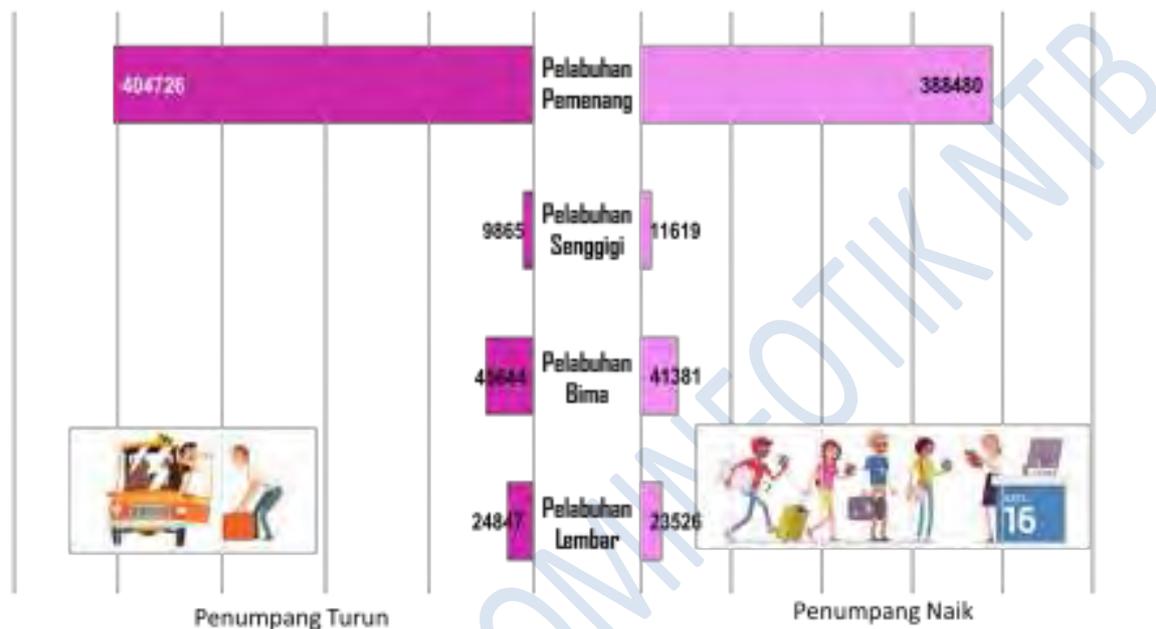
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB

Berdasarkan gambar 3.2. di atas dapat ditunjukkan bahwa jumlah penumpang paling banyak terdapat di terminal Ginte di Kabupaten Dompu dan didominasi oleh penumpang naik atau berpergian dari Dompu ke daerah lain. Kemudian dilanjutkan oleh terminal Tanah Mira yang juga di dominasi oleh penumpang naik.

3.2. Lalu Lintas Angkutan Laut

3.2.1. Penumpang Pelabuhan

Penumpang pelabuhan adalah sejumlah orang yang melakukan perjalanan melalui laut menuju suatu daerah tertentu dengan maksud dan tujuan tertentu.



Gambar 3.3. Jumlah Penumpang Melalui Pelabuhan di NTB Tahun 2018

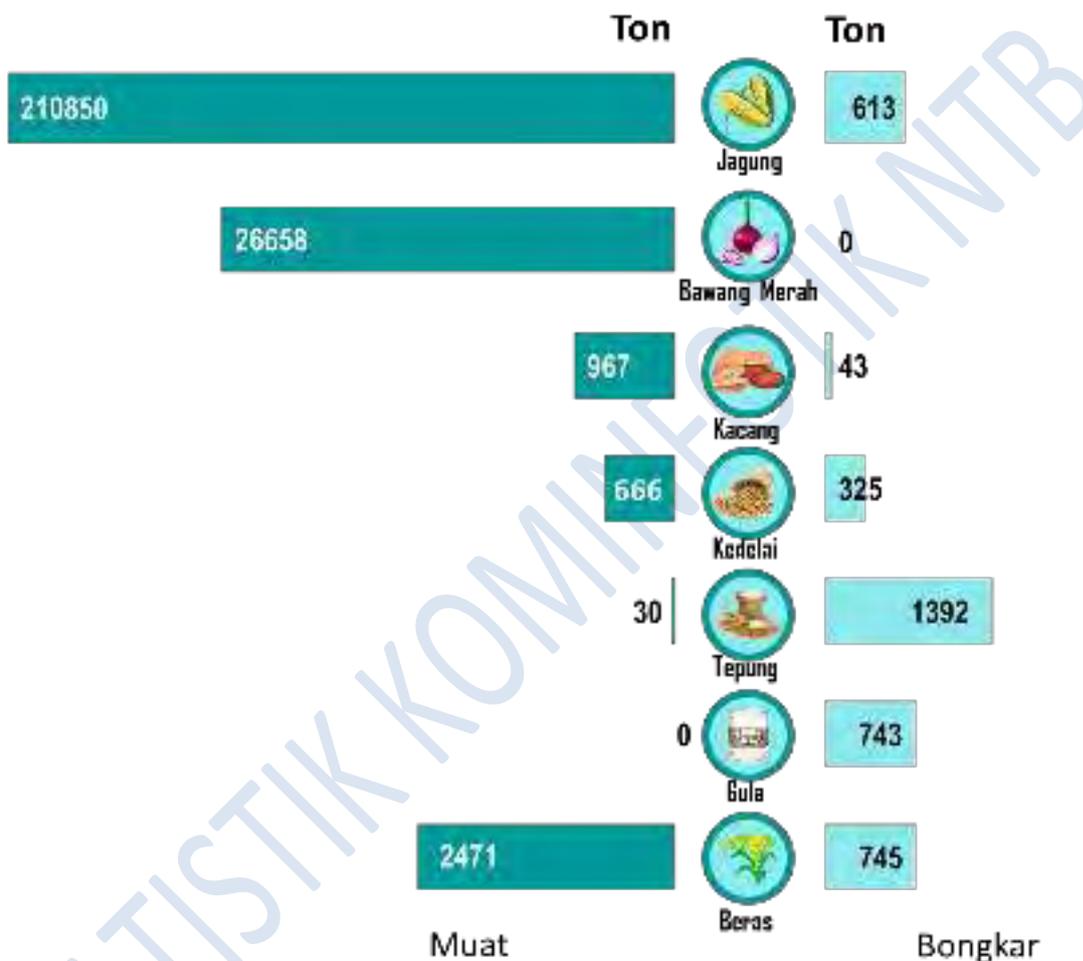
Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB

Berdasarkan gambar 3.3. di atas dapat ditunjukkan bahwa jumlah penumpang paling banyak melalui pelabuhan pemenang baik dari segi penumpang naik maupun turun. Jumlah penumpang di Pelabuhan Pemenang didominasi oleh penumpang wisata yang melakukan penyebrangan menuju tempat wisata Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air. Sehingga jumlah penumpang yang melalui pelabuhan pemenang akan sebanding dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi NTB.

3.2.2. Bongkar Muat Barang di Pelabuhan

Bongkar muat barang di Pelabuhan adalah kegiatan yang mendukung kelancaran angkutan dari darat ke kapal ke suatu pelabuhan sehingga kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal mempunyai kedudukan yang penting. Aktivitas/kegiatan

bongkar muat barang di pelabuhan yang dilaksanakan oleh perusahaan bongkar muat (PBM), pada dasarnya ada tiga hal/kegiatan yaitu meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodiring* dan *receiving/delivery*, sedangkan dalam pelaksanaan meliputi persiapan pembongkaran dan pemuatan barang yang dilakukan sebelum kapal tiba dan pada waktu kapal tiba di dermaga pelabuhan.



Gambar 3.4. Jumlah Bongkar Muat Barang Melalui Pelabuhan di NTB Tahun 2018

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB

Pada gambar di atas dapat ditunjukkan daftar bongkar muat barang pokok melalui tiga pelabuhan yang ada di Provinsi NTB yaitu Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Badas dan Pelabuhan Bima. Jumlah barang yang dimuat lebih banyak dibandingkan jumlah barang yang dibongkar. Berdasarkan jenis komoditi, komoditi paling banyak yaitu jagung sejumlah 211.463 ton dan lebih banyak dimuat. Kemudian disusul oleh komoditi bawang merah dan beras.

3.3. Lalu Lintas Angkutan Udara

3.3.1. Bandar Udara (Bandara)

Bandar udara (bandara) merupakan sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. Bandara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landas pacu namun bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunaannya. Provinsi NTB memiliki beberapa bandara seperti yang dapat di tunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.5. Bandar Udara di Provinsi NTB Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB

Pada gambar 3.5. menunjukkan bahwa Provinsi NTB memiliki empat bandara dengan beberapa jenis. Provinsi NTB memiliki satu bandara internasional yaitu Bandara Internasional Zainul Abdul Majid (ZAM) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, dua bandara lokal yaitu Bandara Sultan M. Kaharuddin yang berada di Kabupaten Sumbawa dan Bandara Sulatan M. Salahuddin di Kabupaten Bima dan satu bandara khusus di Kabupaten Sumbawa Barat.

3.3.2. Jumlah Pesawat Melalui Bandar Udara di NTB



Gambar 3.6. Jumlah Pesawat yang Datang dan Berangkat Tahun 2018

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB

Berdasarkan gambar di atas dapat ditunjukkan bahwa jumlah pesawat yang datang dan berangkat di beberapa Bandara di NTB di dominasi oleh penerbangan domestik yang berada di Bandara ZAM yaitu sejumlah 55.171 pesawat. Kemudian dilanjutkan oleh jumlah pesawat yang datang dan berangkat dari Bandara Sultan M. Salahuddin di Kabupaten Bima yaitu sejumlah 9.829 pesawat.

3.3.3. Jumlah Penumpang Melalui Bandara

Penumpang angkutan udara adalah seorang yang melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara dan tidak terdaftar sebagai awak pesawat udara yang bersangkutan.



Gambar 3.7. Jumlah dan Perkembangan Penumpang yang Melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid (ZAM)

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB

Berdasarkan gambar di atas dapat ditunjukkan bahwa jumlah penumpang yang melalui Bandara Internasional ZAM mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, pada Tahun 2018 peningkatan jumlah penumpang yang melalui bandara tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya bahkan kurang dari satu persen sebesar 0,96 persen atau sejumlah 3.691.972 jiwa.



Gambar 3.8. Jumlah dan Perkembangan Penumpang yang Melalui Bandara Sultan M. Kaharuddin Sumbawa

Sumber: Dinas Perhubungan Prvinsi NTB

Berdasarkan gambar di atas dapat ditunjukkan bahwa jumlah penumpang yang melalui Bandara Sultan M. Kaharuddin Sumbawa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 peningkatan jumlah penumpang yang melalui bandara tersebut mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,34 persen menjadi 15,82 persen atau sejumlah 146.565 jiwa.



Gambar 3.9. Jumlah dan Perkembangan Penumpang yang Melalui Bandara Sultan M. Salahuddin Bima

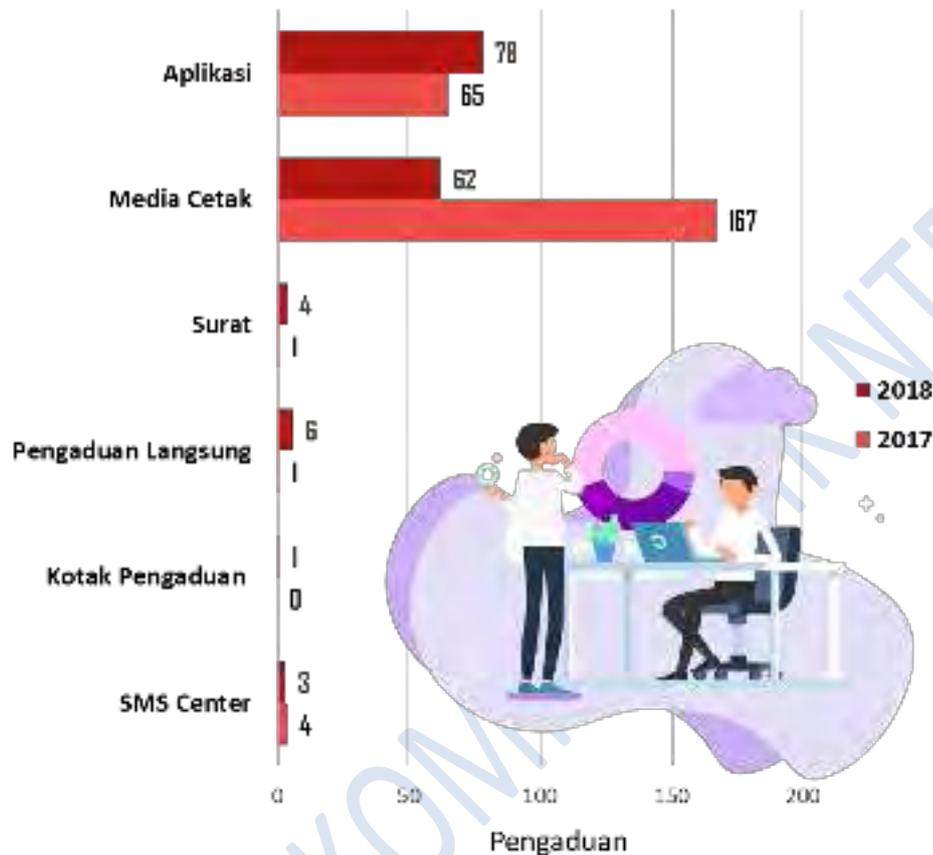
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB

Berdasarkan gambar di atas dapat ditunjukkan bahwa jumlah penumpang yang melalui Bandara Sultan M. Salahuddin Bima mulai mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2016. Pada Tahun 2018 peningkatan jumlah penumpang yang melalui bandara tersebut mengalami peningkatan sebesar 23,77 persen atau sejumlah 363.959 jiwa.

3.4. Jumlah Pengaduan Perhubungan

Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan, Pemerintah melalui Dinas Perhubungan membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa kurang puas terutama berkaitan dengan penggunaan

jalan. Tujuannya lain dari layanan pengaduan adalah agar masyarakat juga ikut mengawasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang perhubungan.



Gambar 3.10. Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perhubungan Berdasarkan Jenis Sarana Pengaduan

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB

Pada gambar 3.10. dapat ditunjukkan bahwa jumlah pengaduan masyarakat pada Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 35,29 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan Pemerintah perhubungan di bidang perhubungan semakin meningkat. Berdasarkan jenis sarana pengaduan ditunjukkan bahwa pengaduan masyarakat paling banyak disampaikan melalui media cetak dan aplikasi layanan pengaduan perhubungan masing-masing sejumlah 62 dan 78 pengaduan pada Tahun 2018.

STATISTIK KOMINFOTIK NTB

BAB IV

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

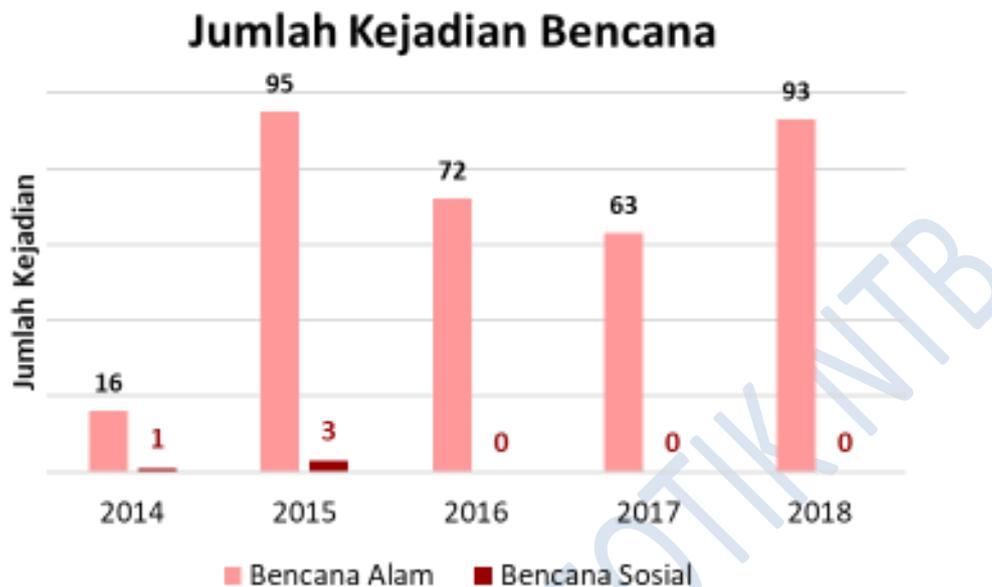
4.1 Data Kejadian Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana ada tiga jenis yaitu:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas masyarakat serta terror.

Provinsi NTB sendiri merupakan salah satu daerah di Indonesia yang merupakan daerah rawan bencana. BPBD Provinsi NTB mencatat sejumlah kejadian bencana yang terjadi di Provinsi NTB periode Tahun 2014-2018. Berdasarkan data, menunjukkan kejadian bencana yang terjadi di provinsi NTB merupakan kejadian bencana alam dan bencana sosial yang artinya bahwa bencana tersebut disebabkan oleh kejadian alam dan konflik sosial. Data menunjukkan bahwa pada periode Tahun 2014-2017 kejadian bencana yang paling tinggi di NTB terjadi pada Tahun 2015 dengan jumlah 95 kejadian bencana alam dan tiga kejadian bencana sosial, sementara

pada Tahun 2018 telah terjadi sebanyak 93 kejadian bencana alam. Rekap kejadian bencana Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 secara rinci dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



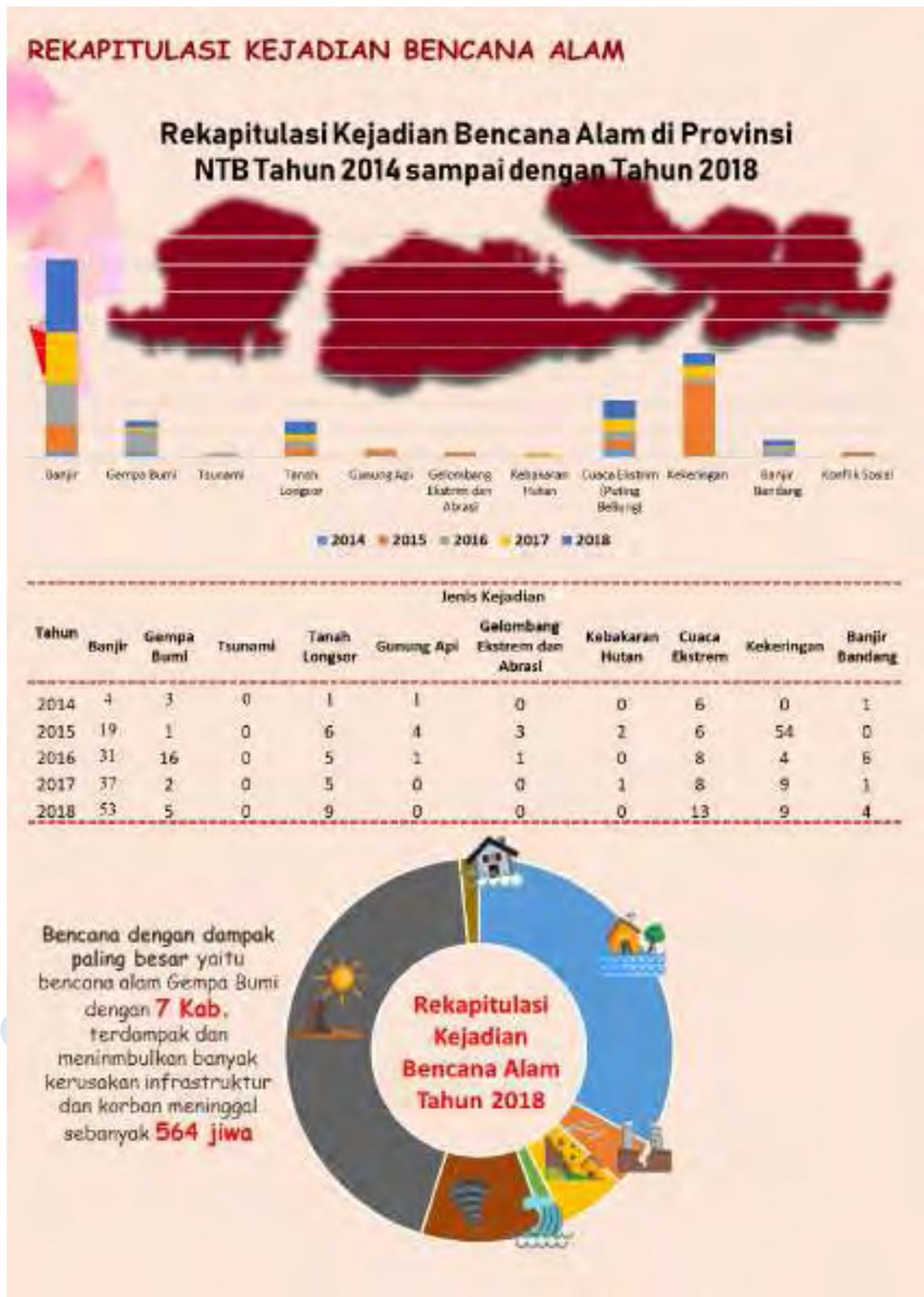
Gambar 4.1. Jumlah Kejadian Bencana di Provinsi NTB Tahun 2014-2018

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

Berdasarkan rekap kejadian bencana yang ditunjukkan pada gambar di atas menunjukkan bahwa jenis kejadian bencana yang terjadi di Provinsi NTB di dominasi oleh kejadian bencana alam. Kejadian bencana alam sendiri terbagi dalam beberapa jenis seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya.

Berdasarkan data periode tahun 2014-2017, menunjukkan bahwa jenis kejadian bencana alam yang paling banyak terjadi di NTB yaitu bencana banjir kemudian disusul dengan bencana kekeringan, sementara untuk data Tahun 2018 jenis bencana alam yang terjadi dalam satu tahun terakhir diantaranya banjir, gempa bumi, tanah longsor, cuaca ekstrim (puting beliung), dan banjir bandang. Pada Tahun 2018 bencana yang dominan terjadi berupa bencana banjir, tanah longsor dan gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang memeberikan dampak kerugian paling besar di NTB. Bencana ini terjadi dikarenakan kondisi wilayah NTB yang berada pada jalur lintasan tektonik, sementara jika dilihat berdasarkan data setiap tahunnya jumlah kejadian bencana banjir di NTB semakin meningkat bahkan hingga menimbulkan timbulnya banjir bandang. Kondisi ini dapat disebabkan karena kurangnya daerah resapan untuk menampung volume air hujan. Data mengenai

kejadian bencana alam yang terekam berdasarkan data dari BPBD NTB ditunjukkan secara rinci pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.2. Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

4.2 Rekapitulasi Wilayah Terdampak Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan.



Gambar 4.3. Rekapitulasi Wilayah Terdampak Bencana Tahun 2017-2018

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

Pada gambar di atas menunjukkan pada Tahun 2017-2018. Kasus kekeringan menyebabkan beberapa daerah yang terdampak mengalami kekurangan air bersih dan akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan penduduk. Berdasarkan data Tahun 2017-2018 jumlah wilayah dan penduduk yang terdampak kekeringan mengalami

penurunan. Jumlah kecamatan terdampak kekeringan berkurang sebanyak 3 kecamatan, jumlah desa terdampak berkurang sebanyak 20 desa, jumlah korban terdampak berkurang sebanyak 111.037 orang atau sebesar 17,35 persen.

4.3 Sekolah Aman Bencana

Sekolah aman dibagi menjadi tiga definisi, yaitu definisi umum, definisi khusus dan definisi terkait Pengurangan Resiko Bencana (PRB). Menurut pengertian secara umum sekolah aman adalah sekolah yang mengakui dan melindungi hak-hak anak dengan menyediakan suasana dan lingkungan yang menjamin proses pembelajaran, kesehatan, keselamatan, dan keamanan siswanya terjamin setiap saat. Berdasarkan definisi khusus sekolah aman adalah sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana dan pengertian terkait PRB sekolah aman adalah komunitas pembelajar yang berkomitmen akan budaya aman dan sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana yang matang dan mapan sebelum, saat, dan sesudah bencana, dan selalu siap untuk merespons pada saat darurat dan bencana.

Berikut ini ditunjukkan daftar sekolah aman bencana yang ada di Provinsi NTB Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.

Tabel 4.1. Daftar Sekolah Aman Bencana di Provinsi NTB Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018

No.	Tahun	Sekolah/Madrasah	Kecamatan	Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2015	Ponpes Nahdlatul Mujahidin NW	Rembiga	Lombok Barat
2	2015	SDN 47 Bintaro	Ampenan	Mataram
3	2015	SDN Buwun Mas	Sekotong	Lombok Barat
4	2015	SDN 1 Karang Sidemen	Batukliang Utara	Lombok Tengah
5	2015	SDN 7 Pemenang Barat	Pemenang	Lombok Utara
6	2016	SMAN 1 Woha	Woha	Kabupaten Bima
7	2016	SDN Brang Kolong	Plampang	Sumbawa
8	2016	SDN 6 Labuhan Haji	Labuhan Haji	Lombok Timur
9	2016	SDN 1 Selong Belanak	Praya Barat	Lombok Tengah
10	2016	SDN 2 Tegal Maja	Pemenang	Lombok Utara
11	2017	MAN 2 Mataram	Mataram	Mataram
12	2017	SMAN 4 Praya	Praya	Lombok Tengah

No. (1)	Tahun (2)	Sekolah/Madrasah (3)	Kecamatan (4)	Kabupaten/Kota (5)
13	2017	SMAN 1 Batukliang Utara	Batukliang Utara	Lombok Tengah
14	2017	Ponpes NW Glogor	Kediri	Lombok Barat
15	2017	SMAN 1 Bolo	Bolo	Kabupaten Bima
16	2017	MAN 1 Kota Bima	Rasanae Barat	Kota Bima
17	2017	SMKN 1 Keruak	Keruak	Lombok Timur
18	2017	SMAN 2 Bayan	Bayan	Lombok Utara
19	2017	SMAN 1 Alas	Alas	Sumbawa
20	2017	SMAN 1 Taliwang	Taliwang	Sumbawa Barat
21	2017	SLB Burul Bayan	Bayan	Lombok Utara
22	2017	SLB Pembina Lingsar	Lingsar	Lombok Barat
23	2017	SLBN Praya	Praya	Lombok Tengah
24	2018	MAN 1 Mataram	Mataram	Mataram
25	2018	SMAN Batukliang	Batukliang	Lombok Tengah
26	2018	SMK 1 Kuripan	Kuripan	Lombok Barat
27	2018	SMK Kehutanan Qomarul Huda	Narmada	Lombok Barat
28	2018	SMAN 1 Montong Gading	Montong Baan	Lombok Timur
29	2018	SMAN 1 Kabupaten Bima	-	Kabupaten Bima
30	2018	SMK Kelautan Alas	Alas	Sumbawa
31	2018	SMAN Seteluk	Seteluk	Sumbawa
32	2018	SMAN Kayangan	Kayangan	Lombok Timur
33	2018	SMA 3 Mataram	Mataram	Mataram
34	2018	SLBN Gerung	Gerung	Lombok Barat
35	2018	SLBN Hassanain Praya Timur	Praya	Lombok Tengah
36	2018	SLBN Praya Barat	Praya	Lombok Tengah
37	2019	SMAN 1 Bayan	Bayan	Lombok Utara
38	2019	SMPN 1 Bayan	Bayan	Lombok Utara
39	2019	SMA 1 Kayangan	Kayangan	Lombok Utara
40	2019	MA NW Santong	Kayangan	Lombok Utara
41	2019	SMA 1 Tanjung	Tanjung	Lombok Utara
42	2019	SDN 1 Kayangan	Kayangan	Lombok Utara
43	2019	SDN 2 Selengen	Kayangan	Lombok Utara
44	2019	SDN 6 Sesait	Kayangan	Lombok Utara
45	2019	SDN Sukadana	Bayan	Lombok Utara
46	2019	SDN 2 Loloan	Bayan	Lombok Utara
47	2019	SDN 3 Bayan	Bayan	Lombok Utara

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 sekolah aman bencana diharapkan menjadi suatu lingkungan yang aman terhadap aman bencana dan secara terus menerus mengimplementasikan upaya pengurangan resiko bencana. Dalam pedoman penetapan sekolah sebagai

sekolah aman bencana perlu diperhatikan beberapa aspek dan parameter diantaranya lokasi aman dari bencana, struktur bangunan yang secara umum harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan termasuk kelayakan bagi anak berkebutuhan khusus, kenyamanan dan keamanan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 dan Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan gedung Tahan Gempa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2006. Selain struktur bangunan, desain dan penataan ruang kelas harus ideal sehingga memiliki resiko sekecil mungkin bila sewaktu-waktu terjadi bencana mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006.

Penetapan sekolah aman bencana mulai ditetapkan pada Tahun 2015 dan telah ditetapkan sebanyak lima sekolah yang ada di Pulau Lombok, kemudian pada Tahun 2016 telah ditetapkan sebanyak lima sekolah di Pulau Lombok dan di Pulau Sumbawa, pada Tahun 2017 sebanyak 13 sekolah di Pulau Lombok dan Sumbawa dan Tahun 2018 sebanyak 13 sekolah yang terdapat di Pulau Lombok dan Sumbawa dan pada Tahun 2019 ditetapkan sejumlah 11. Sebaran sekolah aman bencana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.4. Sebaran Lokasi Sekolah Aman Bencana di Provinsi NTB Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

4.4 Desa Tangguh Bencana

Desa tangguh bencana (Destana) adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012). Kemampuan mandiri berarti serangkaian upaya yang dilakukan sendiri dengan memberdayakan dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki masyarakat desa untuk mengenali ancaman dan risiko bencana yang dihadapi, meliputi juga evaluasi dan monitoring kapasitas yang dimilikinya.

Berikut ini ditunjukkan daftar sekolah aman bencana yang ada di Provinsi NTB Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018.

Tabel 4.2. Daftar Desa Tangguh Bencana di Provinsi NTB Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018

No.	Tahun	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2015	Ampenan Selatan	Ampenan	Mataram
2	2015	Desa Pemepek	Pringgarata	Lombok Tengah
3	2015	Selong	Selong	Lombok Timur
4	2015	Kaijawa	Dompu	Dompu
5	2015	Potu	Dompu	Dompu
6	2015	Dodu	Rasanae Timur	Kota Bima
7	2015	Manggemaci	Punda	Kota Bima
8	2016	Guntur Macan	Gunung Sari	Lombok Barat
9	2016	Merta	Pujut	Lombok Tengah
10	2016	Lenting	Sakra	Lombok Timur
11	2016	Sampir	Taliwang	Sumbawa Barat
12	2016	Pelat	Untir Iwis	Sumbawa
13	2017	Lembuak	Narmada	Lombok Barat
14	2017	Mekar Sari	Suela	Lombok Timur
15	2017	Kandai	Woja	Dompu
16	2017	Matakando	Mpunda	Kabupaten Bima
17	2017	Tiwuh Galih	Praya	Lombok Tengah
18	2017	Cendi Manik	Lembar	Lombok Barat
19	2017	Sekotong Timur	Sekotong	Lombok Barat
20	2017	Mareje	Sekotong	Lombok Barat
21	2017	Banyu Urip	Lembar	Lombok Barat

No. (1)	Tahun (2)	Desa/Kelurahan (3)	Kecamatan (4)	Kabupaten/Kota (5)
22	2017	Kuripan Selatan	Kuripan	Lombok Barat
23	2018	Rite	Ambalawi	Kabupaten Bima
24	2018	Rite	Raba	Kota Bima
25	2018	Panggah	Punda	Kota Bima
26	2018	Pemenang Timur	Pemenang	Lombok Utara
27	2018	Selong Belanak	Praya Barat	Lombok Tengah
28	2018	Badrain	Narmada	Lombok Barat
29	2018	Malaka	Pemenang	Lombok Utara
30	2018	Tapir	Seteluk	Sumbawa Barat
31	2018	Seteluk	Seteluk	Sumbawa Barat
32	2019	Lohan	Bayan	Lombok Utara
33	2019	Pendua	Kayangan	Lombok Utara
34	2019	Tempek	Gangga	Lombok Utara
35	2019	Semalun Lawang	Semalun	Lombok Timur
36	2019	Semalun Bumbung	Semalun	Lombok Timur
37	2019	Sajan	Semalun	Lombok Timur
38	2019	Sambi Elen	Semalun	Lombok Timur
39	2019	Genggelang	Gangga	Lombok Utara

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

Penetapan desa tangguh bencana mulai ditetapkan pada Tahun 2015 dan telah ditetapkan sebanyak tujuh desa yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, kemudian pada Tahun 2016 telah ditetapkan sebanyak lima desa di Pulau Lombok dan di Pulau Sumbawa, pada Tahun 2017 sebanyak 10 desa yang terdapat di Pulau Lombok dan Sumbawa dan pada Tahun 2018 sebanyak sembilan desa dan pada Tahun 2019 ditetapkan sejumlah delapan desa. Sebaran desa tangguh bencana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.5. Sebaran Lokasi Desa Tangguh Bencana di Provinsi NTB Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

BAB V

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sesuai Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Secara kelembagaan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan infrastruktur dan utilitas wilayah meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan kondisi dan ketersediaan tingkat layanan yang dapat diandalkan.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

1. Urusan pekerjaan umum, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya (perkotaan dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, bangunan gedung dan lingkungan) dan jasa konstruksi;
2. Urusan penataan ruang, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Adapun peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi:

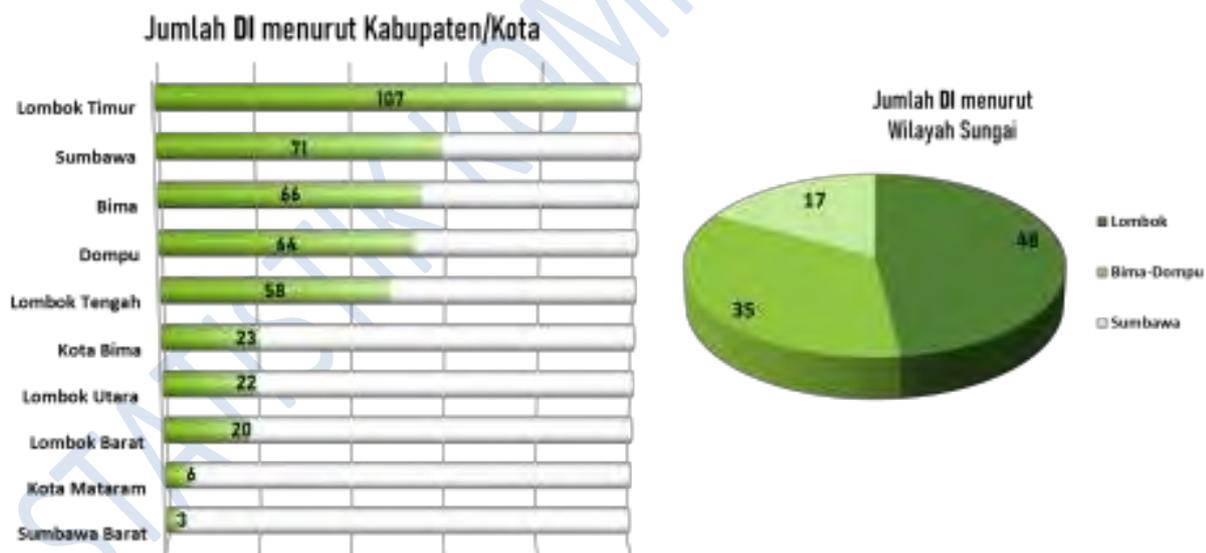
5.1 Daerah Irigasi

Pengelolaan sumber daya air yang dilakukan pemerintah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi. Salah satu yang menjadi isu strategis dalam pengelolaan sumber daya air adalah isu yang berkaitan dengan sungai. Sejak dulu keberadaan sungai sangat penting perannya bagi manusia. Terlihat dari berkembangnya peradaban manusia di muka bumi sebagian besar terjadi di sekitar

wilayah sungai. Dalam kehidupan yang semakin maju saat ini, manusia tetap harus memelihara serta mengelola sungai sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi menjelaskan bahwa irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa Daerah Irigasi (DI) adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi terdiri dari saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dalam penyediaan, pembangunan, pemberian, penggunaan, dan pembuangan irigasi. Berikut adalah rekapitulasi daerah irigasi di NTB.

Pada gambar 5.1 di bawah ini ditampilkan jumlah Daerah Irigasi (DI) menurut kabupaten/kota dan jumlah DI menurut wilayah sungai di NTB yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.



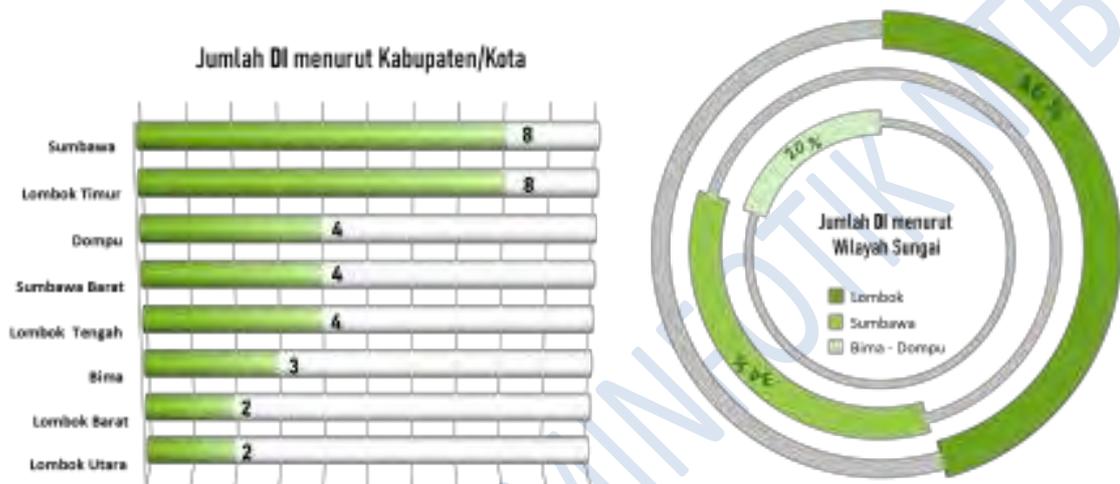
Gambar 5.1. Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber : Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

Dari gambar 5.1. diketahui bahwa total DAS yang menjadi wewenang kabupaten/kota di NTB yaitu 440 buah, 48 persen diantaranya termasuk dalam wilayah sungai Pulau Lombok, 35 persen termasuk wilayah sungai Bima-Dompu dan 17 persen

sisanya merupakan wilayah sungai Sumbawa. Kabupaten/kota yang memiliki (berwenang) DI paling banyak adalah Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar 107 buah DI, sedangkan kabupaten/kota dengan DAS paling sedikit adalah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 6 buah DI.

Pada gambar 5.2. di bawah ini ditampilkan jumlah DI menurut kabupaten/kota dan jumlah DI menurut wilayah sungai di NTB yang menjadi kewenangan provinsi.

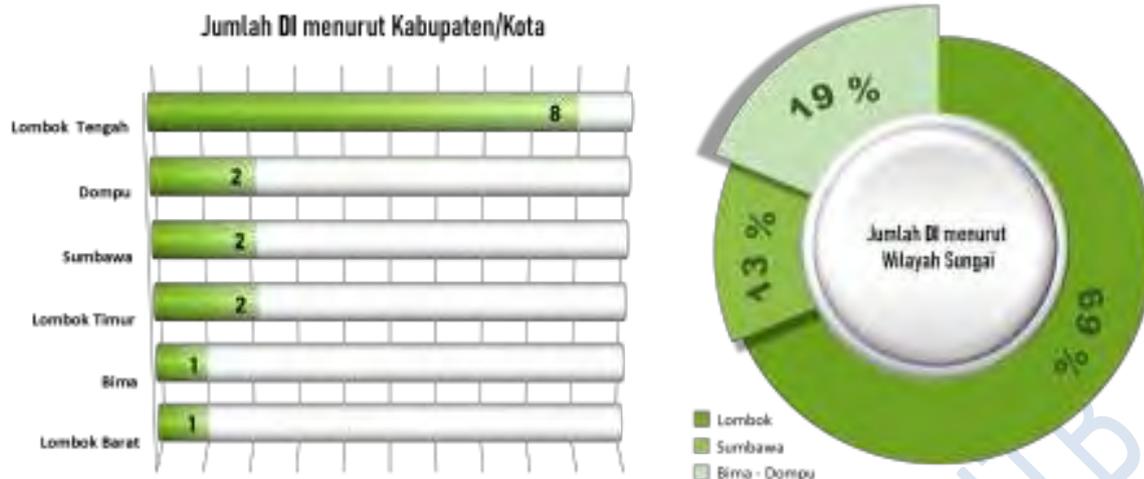


Gambar 5.2. Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang Menjadi Kewenangan Provinsi sampai dengan Tahun 2018

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

Dari gambar 5.2. sampai dengan Tahun 2018 diketahui bahwa total DI yang menjadi wewenang provinsi di NTB yaitu 35 buah, 46 persen diantaranya termasuk dalam wilayah sungai Pulau Lombok, 20 persen termasuk wilayah sungai Bima-Dompu dan 34 persen sisanya merupakan wilayah sungai Sumbawa. Kabupaten/kota yang memiliki DI paling banyak adalah Kabupaten Lombok Timur dan Sumbawa yaitu sebesar 8 buah DI, sedangkan kabupaten/kota dengan DI paling sedikit adalah Kota Mataram dan Kota Bima yaitu 0 buah DI.

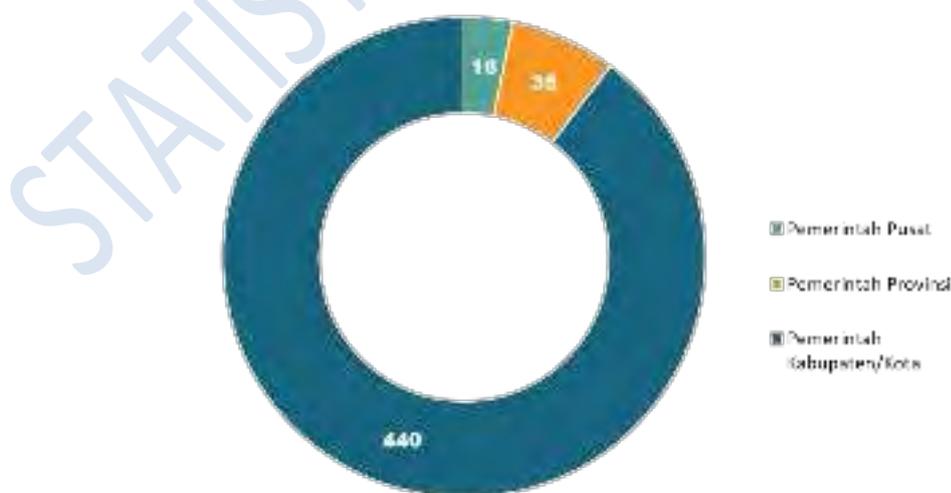
Pada Gambar 5.3 di bawah ini ditampilkan jumlah DI menurut kabupaten/kota dan jumlah DI menurut wilayah sungai di NTB yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.



Gambar 5.3. Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat sampai dengan Tahun 2018

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

Dari gambar 5.3. sampai dengan Tahun 2018 diketahui bahwa total DI yang menjadi wewenang pemerintah pusat di NTB yaitu 16 buah, 69 persen diantaranya termasuk dalam wilayah sungai Pulau Lombok, 19 persen termasuk wilayah sungai Bima-Dompu dan 13 persen sisanya merupakan wilayah sungai Sumbawa. Kabupaten/kota yang memiliki DI paling banyak adalah Kabupaten Lombok Tengah yaitu sebanyak 8 buah DI, sedangkan kabupaten/kota dengan DI paling sedikit adalah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Bima yaitu 1 buah DI. Berikut adalah perbandingan jumlah DI wewenang pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

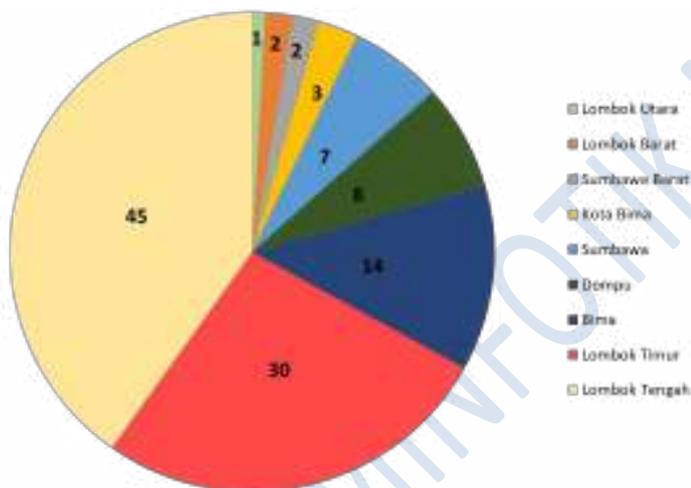


Gambar 5.4. Perbandingan Jumlah Daerah Irigasi (DI) Wewenang Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

5.2 Embung

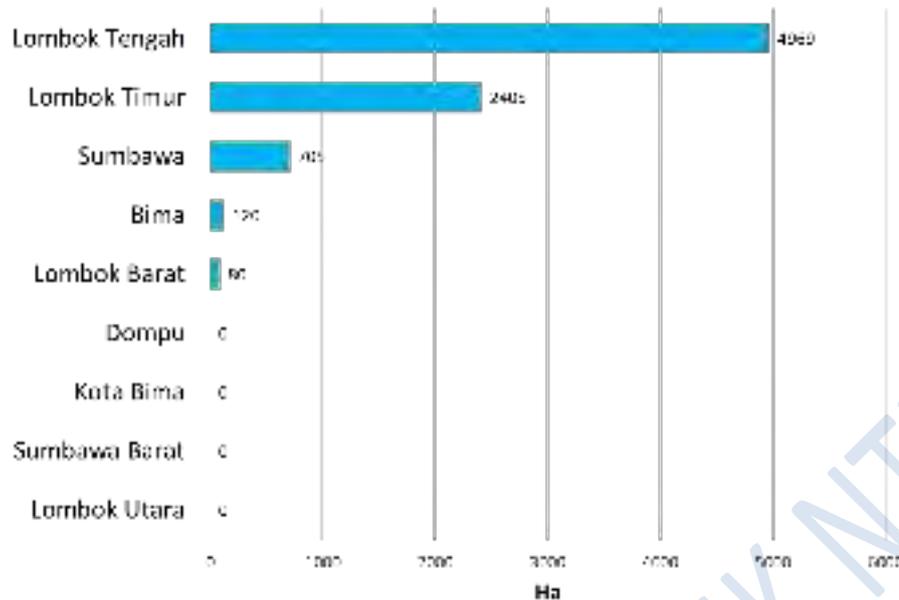
Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian, perkebunan dan peternakan. Secara operasional sebenarnya embung berfungsi untuk mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan pasokan air untuk keperluan tanaman ataupun ternak di musim kemarau dan penghujan. Pada gambar 5.5. di bawah ini disajikan data rekapitulasi jumlah embung.



Gambar 5.5. Rekapitulasi Jumlah Embung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

Pada gambar 5.5. dapat dilihat bahwa jumlah embung terbanyak di NTB menurut kabupaten/kota berada di Kabupaten Lombok Tengah dengan nilai presentase sebesar 40 persen dari total embung yang dimiliki NTB. Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten kedua yang memiliki jumlah embung paling banyak, yaitu dengan nilai presentase sebesar 27 persen. Kabupaten ketiga yang memiliki jumlah embung terbanyak berada pada Kabupaten Bima, dengan presentase sebesar 13 persen. Kota Mataram merupakan kabupaten/kota di NTB yang tidak memiliki embung di wilayahnya.



Gambar 5.6. Total Pemanfaatan Embung Sebagai Irigasi

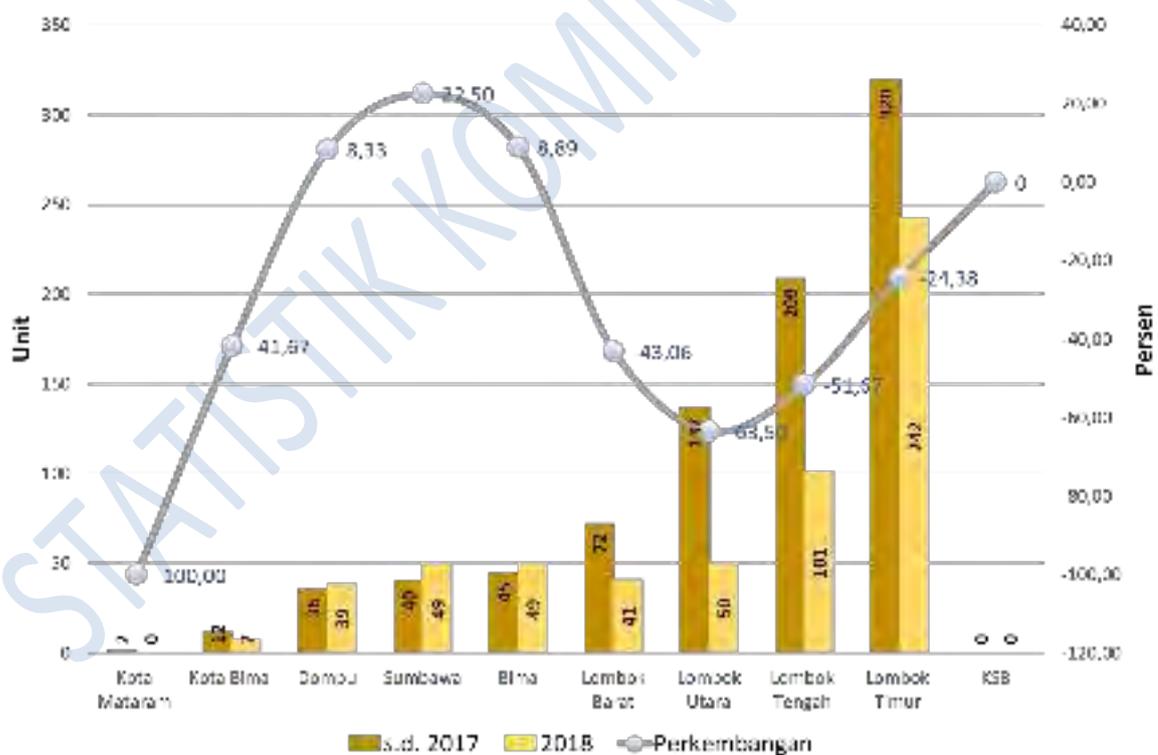
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

Salah satu tujuan dibangun embung adalah untuk mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan pasokan air untuk keperluan tanaman ataupun ternak di musim kemarau dan penghujan. Pemenuhan kebutuhan air bakal menciptakan lompatan ekonomi karena dapat meningkatkan volume dan hasil pertanian. Seluruh embung di NTB dapat mengairi total 8.279 Ha irigasi. Dilihat dari luasan irigasi yang dapat diairi dengan bantuan embung, kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten dengan pemanfaatan embung sebagai irigasi terbesar yaitu 4.969 Ha, sedangkan kabupaten Lombok Barat merupakan kabupaten dengan pemanfaatan embung sebagai irigasi terkecil yaitu 80 Ha.

5.3 Mata Air

Menurut Hendrayana (1994) mata air adalah tempat dimana air tanah merembes atau mengalir keluar ke permukaan tanah secara alamiah. Mata air adalah tempat pemunculan air tanah pada lapisan akuifer dari bawah permukaan tanah ke atas permukaan tanah secara alamiah. Selanjutnya, air yang keluar dari mata air akan mengalir di permukaan tanah sebagai air permukaan melalui alur-alur sungai. Menurut Kresic dan Stevanovic (2010), mata air (*springs*) adalah lokasi pemusatan keluarnya air tanah yang muncul di permukaan tanah, karena terpotongnya lintasan aliran air

tanah oleh fenomena alam. Beberapa pengertian lain dari beberapa ahli, antara lain menyebutkan, bahwa mata air adalah sebuah tempat di permukaan tanah dimana air tanah mengalir keluar dari akuifer dan menunjukkan adanya aliran air yang disebabkan oleh adanya perbedaan elevasi "hydraulic head" pada akuifer dengan elevasi "hydraulic head" di permukaan tanah dimana air tanah muncul. Apabila keluarnya air tanah tersebut tidak menunjukkan sebagai aliran air, maka dapat disebut sebagai "seepage" atau rembesan, dengan demikian sebenarnya rembesan air yang terdapat pada lereng-lereng dan lembah-lembah sungai dapat diklasifikasikan juga sebagai mata air. Dari beberapa definisi atau pengertian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa terjadinya mata air haruslah secara alamiah, yaitu terjadi karena proses-proses geologi ataupun proses alam lainnya. Dengan demikian, apabila keluarnya air tanah tersebut karena pengaruh aktivitas manusia, seperti pemboran dan penggalian, maka tidak termasuk sebagai mata air. Berikut adalah jumlah mata air di NTB menurut kabupaten/kota.



Gambar 5.7. Jumlah dan Perkembangan Mata Air di Provinsi NTB

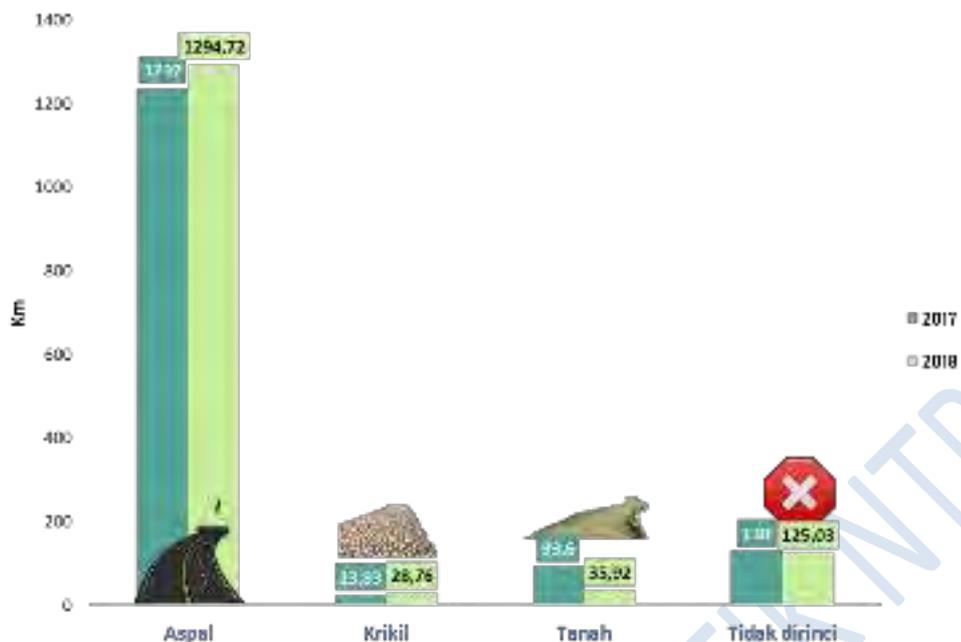
Sumber: Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

Dari gambar 5.7. diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2017 di NTB terdapat 873 buah mata air yang tersebar di seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Sumbawa Barat. Pada Tahun 2018 terjadi penurunan jumlah mata air di beberapa kabupaten/kota di NTB akibat bencana gempa bumi pada pertengahan Tahun 2018 menjadi 578 titik mata air. Penurunan paling besar terjadi di Kota Mataram sebesar 100 persen dikarenakan kedua sumber mata air di Kota Mataram hilang kemudian Kabupaten Lombok Utara sebesar 63,50 persen menjadi 101 mata air dari 209 mata air. Sementara pada beberapa kabupaten/kota lainnya terjadi peningkatan jumlah mata air seperti pada Kabupaten Sumbawa sebesar 22,50 persen dan Kabupaten Dompu sebesar 8,33 persen. Berdasarkan data Tahun 2018 sebagian besar mata air terletak di Pulau Lombok atau 74,01 persen diantaranya terletak di Pulau Lombok dan 24,91 persen terletak di Pulau Sumbawa. Jumlah mata air yang paling banyak terdapat pada Kabupaten Lombok Timur sebanyak 242 unit dan Kabupaten Sumbawa Barat merupakan satu-satunya kabupaten di NTB yang tidak memiliki mata air di daerahnya.

5.4 Ruas Jalan Provinsi

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi pengembangan sistem transportasi di tanah air. Infrastruktur jalan menjadi unsur sentral dalam pengembangan wilayah serta peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Jaringan transportasi yang baik akan membawa dampak pada peningkatan kegiatan ekonomi suatu wilayah. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi program prioritas seiring dengan semakin bertambahnya populasi penduduk dan kendaraan pengguna jalan. Pada gambar di bawah ini ditampilkan jumlah unit jalan provinsi beserta total panjang jalan provinsi.

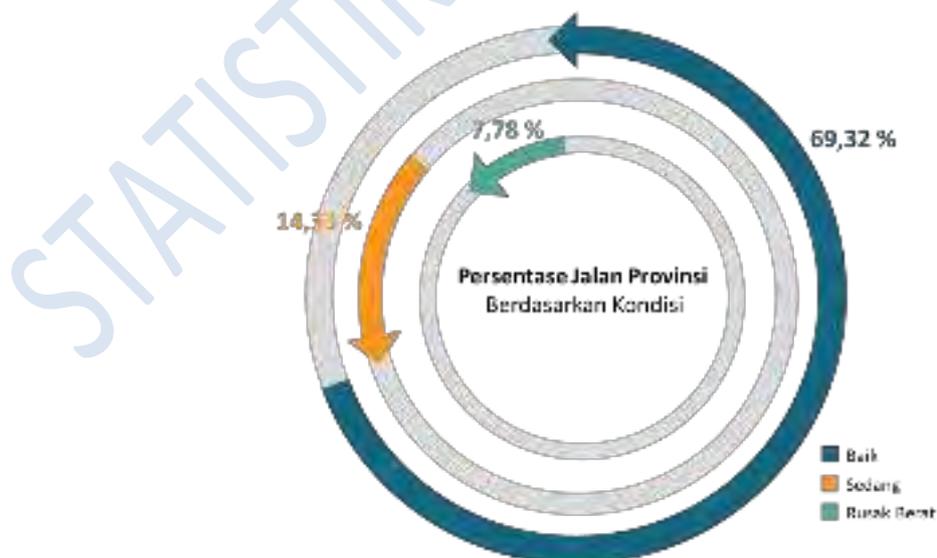
Jaringan jalan menjadi bagian penting dalam sistem transportasi daerah. Pemeliharaan dan pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan jaringan jalan. Berdasarkan gambar 5.8., pada Tahun 2017-2018 panjang jalan provinsi yang menggunakan aspal meningkat 4,67 persen, yang menggunakan krikil meningkat 20,68 persen.



Gambar 5.8. Perkembangan Panjang Jalan Provinsi Berdasarkan Bahan Penyusun Tahun 2017-2018

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

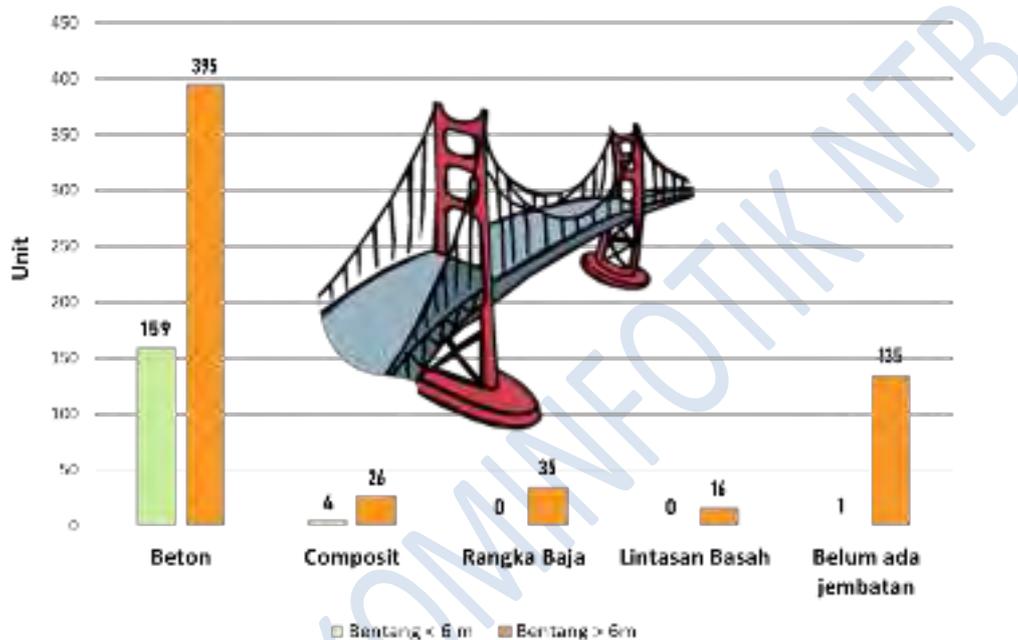
Sementara dari sisi kondisi, seperti pada gambar di bawah ini sampai dengan Tahun 2018 sebesar 69,32 persen jalan dalam kondisi baik, 14,33 persen dalam kondisi sedang, 0,15 persen dalam kondisi rusak sedang dan 7,78 persen dalam kondisi rusak berat.



Gambar 5.9. Persentase Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi sampai dengan Tahun 2018

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

Jembatan merupakan bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai penghubung dua ujung jalan yang terputus oleh sungai, saluran, lembah, selat, laut, jalan raya dan jalan kereta api. Teknologi pembangunan jembatan juga telah berkembang dengan pesat, mulai dari perencanaan, teknologi bahan (beton, baja, kabel), teknologi perencanaan dan pelaksanaan serta teknologi rehabilitasi dan perkuatan.



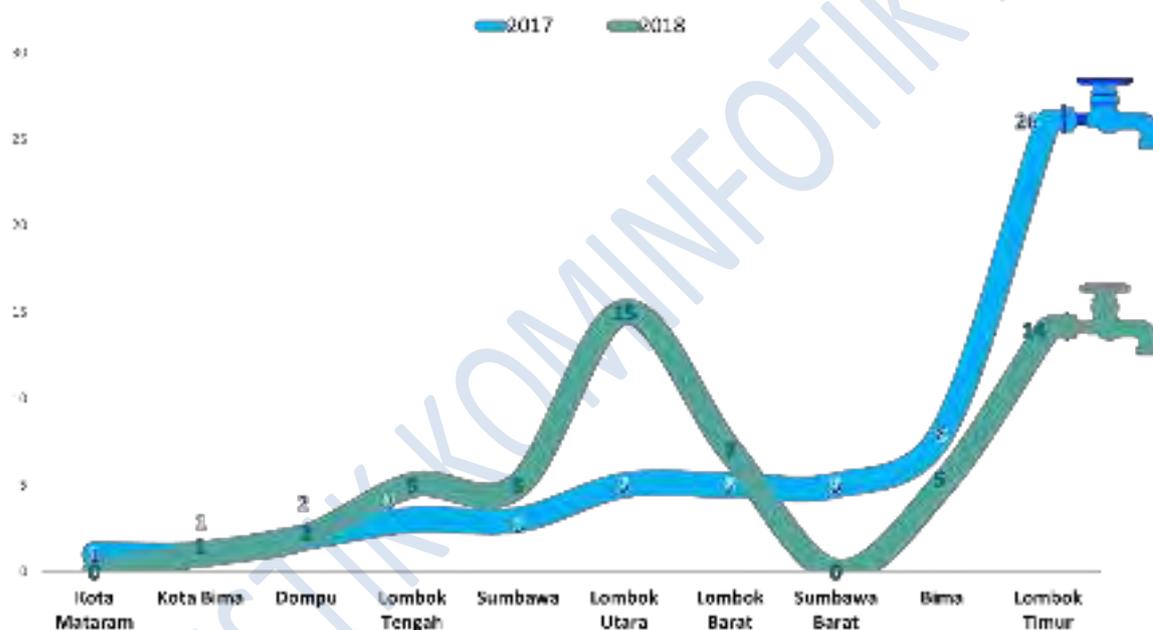
Gambar 5.10. Jumlah Jembatan Provinsi di NTB sampai dengan Tahun 2018 Menurut Komponen Penyusun Jembatan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

Pembangunan jembatan Provinsi lebih banyak terdapat pada jalan dengan bentang lebih besar dari 6 meter dibandingkan dengan jalan dengan bentang kurang dari 6 meter. Samapi dengan Tahun 2018 jumlah jembatan di Provinsi NTB yaitu 771 jembatan dengan 164 jembatan di jalan dengan bentang kurang dari 6 meter dan 607 jembatan di jalan dengan bentang lebih dari 6 meter. Jembatan di Provinsi NTB sebagian besar terbuat dari beton dan paling sedikit berupa lintasan basah. Jumlah jembatan terbuat dari beton yaitu sejumlah 554 jembatan atau 71,8 persen.

5.5 Air Minum

Menurut Permenkes RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat dan dapat langsung diminum. Air minum harus terjamin dan aman bagi kesehatan, air minum aman bagi kesehatan harus memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Selanjutnya menurut Sutrisno (1991:1) air minum dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan paling esensial, sehingga kita perlu memenuhinya dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Berikut adalah target layanan air minum di NTB Tahun 2014-2018.

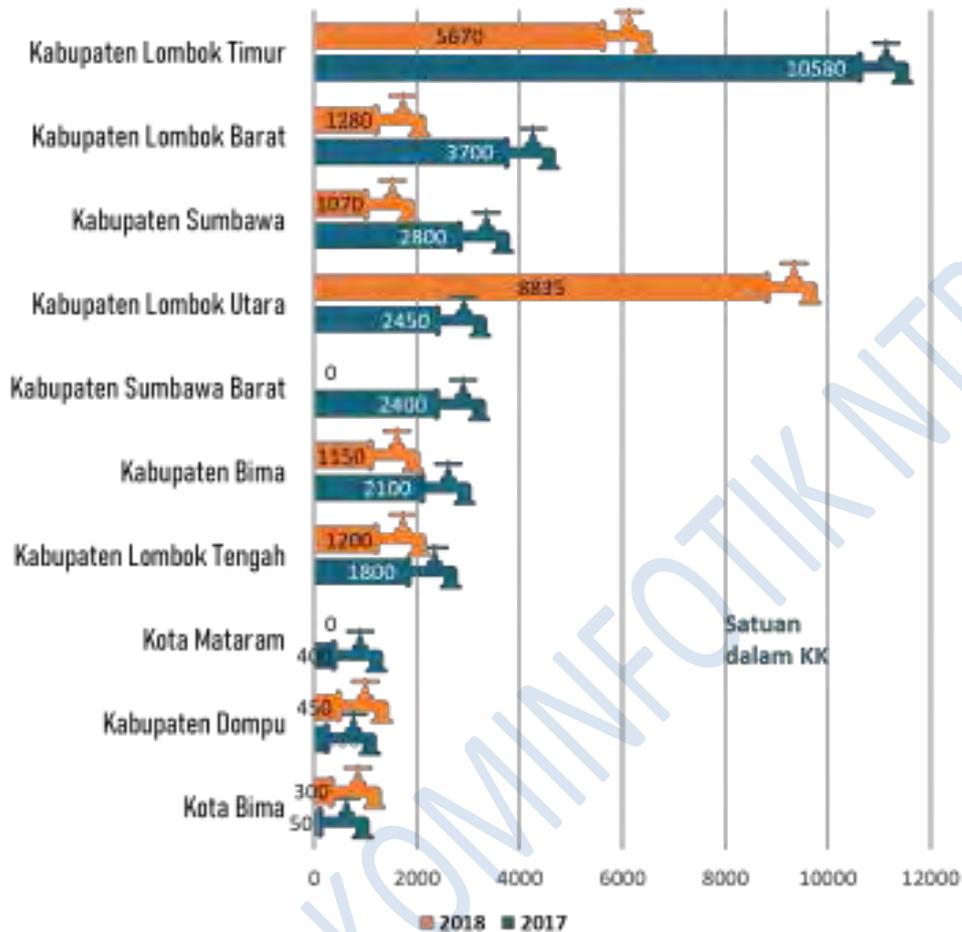


Gambar 5.11. Jumlah Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2017-2018

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah memiliki program 100-0-100, yakni 100 persen ketersediaan akses air minum, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen ketersediaan akses sanitasi sehat yang ditargetkan bisa tercapai pada tahun 2019. Pelayanan air minum ini diwujudkan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menyuplai ketersediaan air minum di beberapa kabupaten/kota. Pada Tahun 2017 jumlah SPAM yang ada di NTB yaitu 59 unit SPAM dan pada Tahun 2018 kembali di bangun sejumlah 54 unit SPAM. Sampai dengan Tahun 2018 jumlah SPAM paling banyak terdapat di Kabupaten

Lombok Timur sejumlah 30 unit SPAM dan paling sedikit di Kota Mataram sejumlah satu unit SPAM.



Gambar 5.12. Jumlah KK Terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2017-2018

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

Seperti dilihat pada gambar 5.12. jumlah KK yang terlayani sistem penyediaan air minum (SPAM) di NTB Tahun 2017-2018. Pada Tahun 2017 jumlah KK yang terlayani SPAM mencapai 26.580 KK dan pada Tahun 2018 mencapai 19.955 KK. Dalam dua tahun terakhir tersebut jumlah KK terlayani SPAM mengalami penurunan sebesar 24,92 persen. Menurut wilayah kabupaten/kota jumlah KK yang terlayani SPAM paling banyak di Kabupaten Lombok Timur dan paling sedikit di Kota Mataram. Hal ini sesuai dengan jumlah SPAM yang dibangun pada kedua kabupaten/kota tersebut.

BAB VI

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana di dalamnya termasuk urusan Bidang Perumahan, Bidang Permukiman, dan Bidang Bina Usaha Perumahan dan Permukiman.

Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinas Perkim) Provinsi NTB memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah, urusan sekretariat, urusan perumahan, urusan permukiman dan urusan bina usaha perumahan dan permukiman. Secara kelembagaan Dinas Perkim merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan perumahan dan permukiman meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan kondisi dan ketersediaan tingkat layanan yang dapat diandalkan.

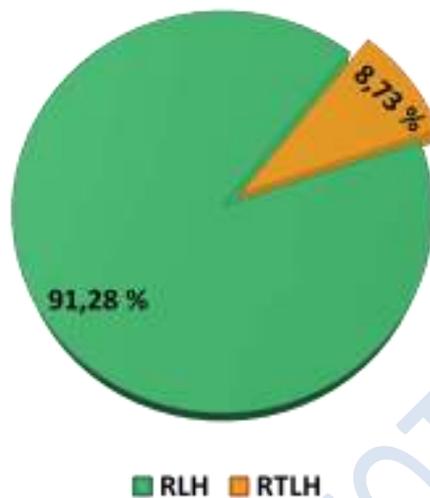
6.1 Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Data RTLH diperoleh dari jumlah rumah miliki sendiri yang dikurangi dengan jumlah Rumah Layak Huni (RLH) seperti berikut ini.

Derajat kelayakan rumah tempat tinggal diukur dari dua aspek yaitu kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC).

Berdasarkan informasi dari Dinas Perumahan dan Perukiman Provinsi NTB, kualitas fisik RTLH dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria ALADIN (Atap, Lantai dan Dinding), jenis atap rumah terbuat dari daun Rumbia, Alang-alang atau sejenisnya, lantai rumah masih menggunakan tanah atau kayu murahan dan dinding rumah terbuat dari bambu, bedeg atau kayu tidak berkualitas. Menurut informasi yang

diperoleh jika salah satu kriteria ALADIN telah terpenuhi didukung dengan kondisi lingkungan dan perekonomian yang rendah, maka rumah tersebut dapat dikategorikan sebagai RTLH.



Gambar 6.1. Presentase RTLH dan RLH Berdasarkan Basis Data Perumahan Tahun 2018

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB

Berdasarkan gambar 6.1 di atas, sebanyak 8,73 persen atau sejumlah 101.852 unit rumah yang merupakan rumah milik sendiri tergolong RTLH. Berdasarkan peta sebaran lokasi RTLH seperti pada gambar di bawah menunjukkan bahwa sebaran RTLH lebih banyak terdapat dipulau Lombok dibandingkan dengan Pulau Sumbawa. Sebanyak 65,44 persen atau sejumlah 66.655 unit RTLH tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota yang ada di Pulau Lombok. Hal ini sejalan dengan tingkat kepadatan penduduk NTB yang 70,06 persennya berdomisili di Pulau Lombok. Sementara sebesar 34,56 persen atau sejumlah 35.197 unit RTLH tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota yang ada di Pulau Sumbawa.



Gambar 6.2. Peta Sebaran Lokasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Basis Data Perumahan Tahun 2018

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB

Tabel 6.1. Jumlah Rumah yang Terkategori Milik Sendiri Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018

No. (1)	Kabupaten/Kota (2)	RTLH (3)	RLH (4)	JUMLAH (5)
1	Mataram	946	69.035	69.981
2	Lombok Barat	6.314	157.613	163.927
3	Lombok Utara	10.214	47.079	57.293
4	Lombok Tengah	13.973	258.564	272.537
5	Lombok Timur	35.208	278.688	313.896
6	Sumbawa	10.071	84.165	94.236
7	Sumbawa Barat	3.631	22.673	26.304
8	Dompu	8.006	40.322	48.328
9	Bima	10.070	85.145	95.215
10	Kota Bima	3.419	21.690	25.109
NTB		101.852	1.064.974	1.166.826

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB

6.2 Pembangunan Rumah Layak Huni

Rumah layak huni merupakan kondisi ideal di mana bangunan tersebut memiliki kecukupan minimal dalam unsur ruang dan luas ruangan. Selain itu, juga memperhatikan kualitas material pembangunan seperti dinding, hingga memenuhi aspek pendidikan bagi siapa pun yang menempatinnya.

Terdapat lima standar yang harus dipenuhi untuk rumah layak huni:

1. Desain

Luas rumah minimal 3,5 m²/orang dengan minimum dua ruangan. Bahan baku menggunakan material lokal yang aman bagi lingkungan dan kesehatan penghuni rumah, serta memungkinkan perawatan yang mudah melalui penggunaan sumber daya lokal. Lokasi rumah terletak di lokasi yang aman, resiko dari bencana alam diupayakan seminimal mungkin, dan bukan wilayah yang mudah terjangkit penyakit menular, serta ancaman kesehatan.

2. Ketahanan

Pencegahan bencana di wilayah yang rawan bencana, konstruksi dan spesifikasi material dapat mencegah dampak terburuk dari bencana yang mungkin terjadi. Keamanan material struktur cukup kuat untuk memberi kesempatan kepada penghuni rumah guna menyelamatkan diri pada saat terjadi bencana alam, serta memenuhi standar konstruksi yang disetujui Pemerintah dan Habitat for Humanity Indonesia.

3. Kepemilikan Tanah

Kepemilikan ada hak kepemilikan tanah dan bangunan yang sah dari Pemerintah berupa Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintah setempat.

4. Air Bersih

Akses dan kuantitas air bersih yang aman dan mencukupi untuk kebutuhan minum, memasak serta kebutuhan pribadi. *Public Water Point* cukup dekat dengan rumah sebagai suplai minimum kebutuhan air keluarga (minimum 15 liter / hari, jarak maksimal *public water point* 500 meter waktu mengantri tidak melebihi 30 menit).

5. Sanitasi

Komunitas memiliki jumlah toilet yang cukup dekat dengan rumah dan memungkinkan untuk dijangkau dengan cepat dan aman setiap waktu. Untuk pembangunan rumah baru, wajib disertai dengan toilet pribadi



Gambar 6.3. Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB

Gambar 6.3. menunjukkan data rumah layak huni yang telah dilaksanakan. Dari gambar tersebut dapat ditunjukkan bahwa pembangunan rumah layak huni di Provinsi NTB paling banyak dilakukan pada Tahun 2018 yaitu sebanyak 2.171 unit dan paling sedikit pada Tahun 2015 yaitu sebanyak 800 unit. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2018 pembangunan rumah layak huni paling banyak dilakukan di Kabupaten Lombok Timur yaitu sebanyak 1.689 unit atau 30 persen persen dari total pembangunan rumah pada Tahun tersebut.

6.3 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan kegiatan program bantuan perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat penerima bantuan dalam hal ini masyarakat yang terkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

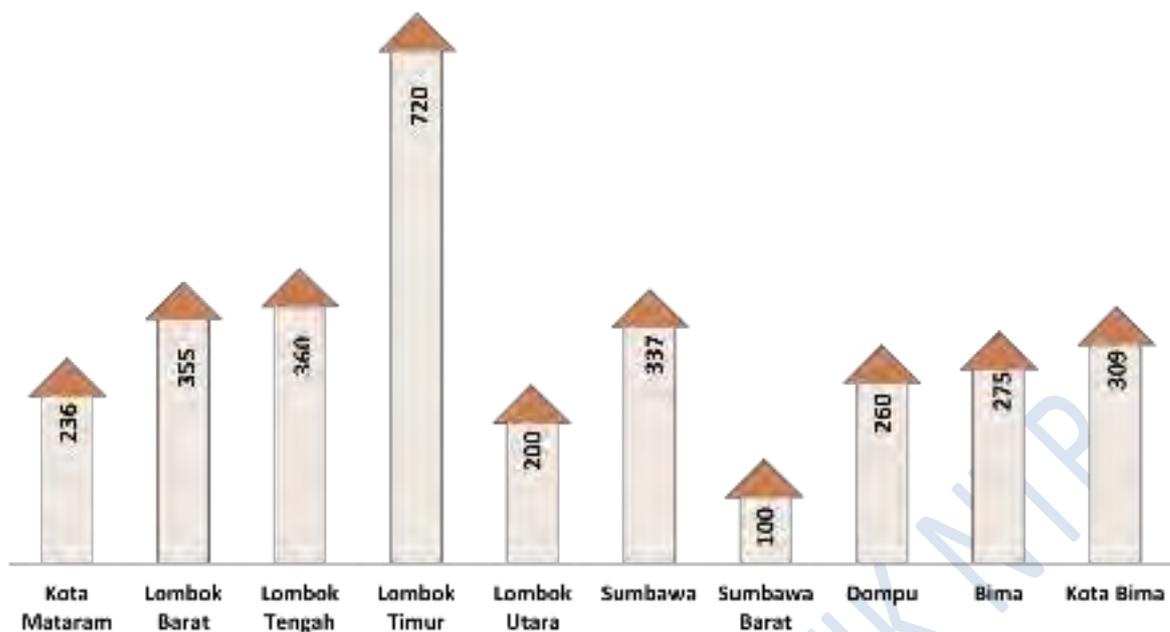


Gambar 6.4. Jumlah Rumah BSPS yang Telah Diperbaiki di Provinsi NTB Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB

Berdasarkan gambar 6.4. dapat ditunjukkan bahwa jumlah rumah yang telah diperbaiki dengan program BSPS paling banyak pada Tahun 2015 yaitu sejumlah 4.837 unit rumah dan paling sedikit terdapat pada Tahun 2016 yaitu sejumlah 2.329 unit rumah.

Jika dilihat berdasarkan data selama Tahun 2018 berdasarkan kabupaten/kota perbaikan rumah paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok Timur yaitu sejumlah 720 unit rumah dan paling sedikit di Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah 100 unit rumah. Jumlah perbaikan rumah pada Tahun 2018 berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar 6.5. berikut.



Gambar 6.5. Jumlah Rumah BSPS yang Telah Diperbaiki di Provinsi NTB Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB

6.4 Pembangunan Rumah Khusus

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 Angka 11 menjelaskan bahwa rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Dalam Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa rumah khusus disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus menjelaskan bahwa Penyediaan Rumah Khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Jika dilihat dari isi pasalnya, dapat diketahui bahwa rumah khusus sama seperti rumah lainnya yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Selanjutnya, dalam Pasal 5 pun dijelaskan bahwa luas lantai bangunan rumah khusus paling rendah 28 m² dan paling tinggi 45 m².

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2017, tepatnya di dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria masyarakat penerima rumah khusus yaitu tinggal di perbatasan negara, tinggal di

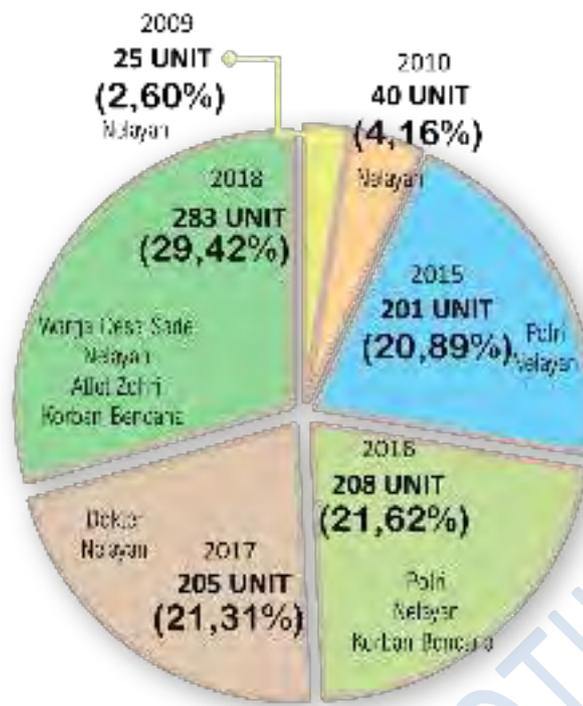
pesisir pantai dan berprofesi sebagai nelayan, korban bencana, tinggal di kawasan terpencil, terkena dampak pembangunan Pemerintah Pusat, pekerja industri, termasuk buruh, pekerja pariwisata yang ada di destinasi wisata, pindah melalui program transmigrasi, lansia, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, yatim piatu, dan anak terlantar, dan pemuka adat atau agama, tinggal dalam kawasan cagar budaya, hingga petugas medis yang bekerja di wilayah pengolahan sumber daya alam.



Gambar 6.6. Persentase Pemanfaatan Pembangunan Rumah Khusus di Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2018

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB

Berdasarkan gambar di atas dapat ditunjukkan bahwa pemanfaatan pembangunan rumah khusus (rusus) di Provinsi NTB paling banyak dimanfaatkan untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir (nelayan) sebesar 68,40 persen kemudian ditujukan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana yaitu sebesar 25,68 persen, masyarakat yang tinggal di daerah wisata Sade sebesar 4,18 persen dan rumah dinas Polisi sebesar 1,56 persen dan untuk atlet dan dokter yang berjasa untuk daerah sebesar 0,01 persen.



Gambar 6.7. Jumlah Pembangunan Rumah Khusus di Provinsi NTB Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2018

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB

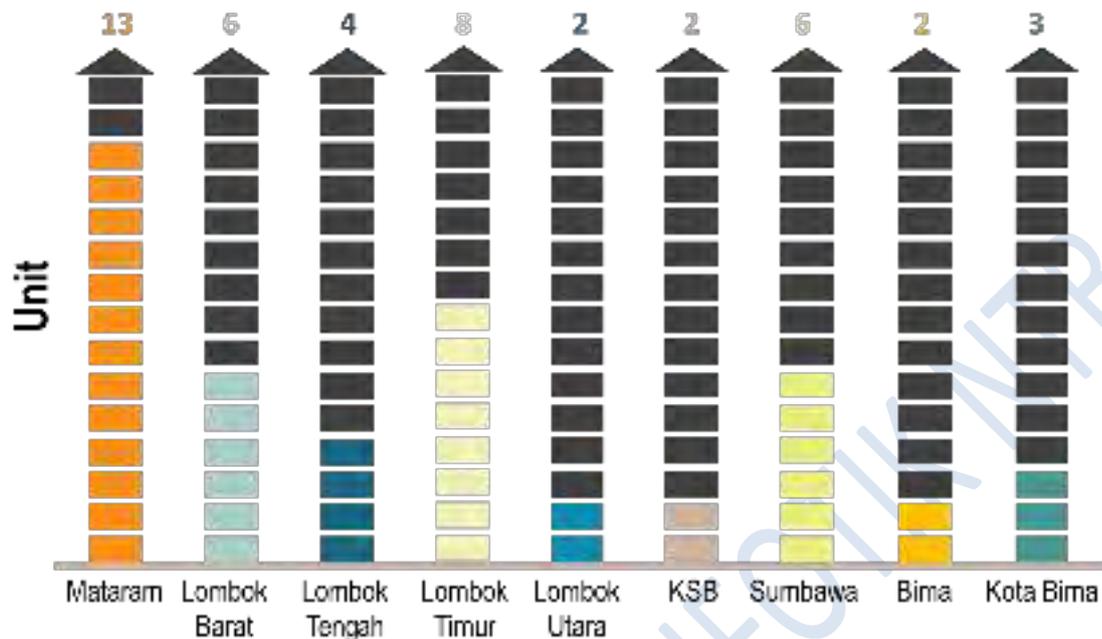
Pada gambar di atas dapat ditunjukkan bahwa pembangunan rumah khusus paling tinggi pada Tahun 2018 sejumlah 208 unit dan ditujukan untuk warga di daerah wisata Sade, nelayan, atlet Zohri korban bencana dan paling kecil pada Tahun 2009 sejumlah 25 unit yang ditujukan untuk para nelayan.

6.5. Pembangunan Rumah Susun (Rusun)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun pada Pasal 1 Ayat 1 menerangkan bahwa rumah susun adalah bangunan Gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertical dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Penyelenggaraan rumah susun salah satunya bertujuan untuk menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang

sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

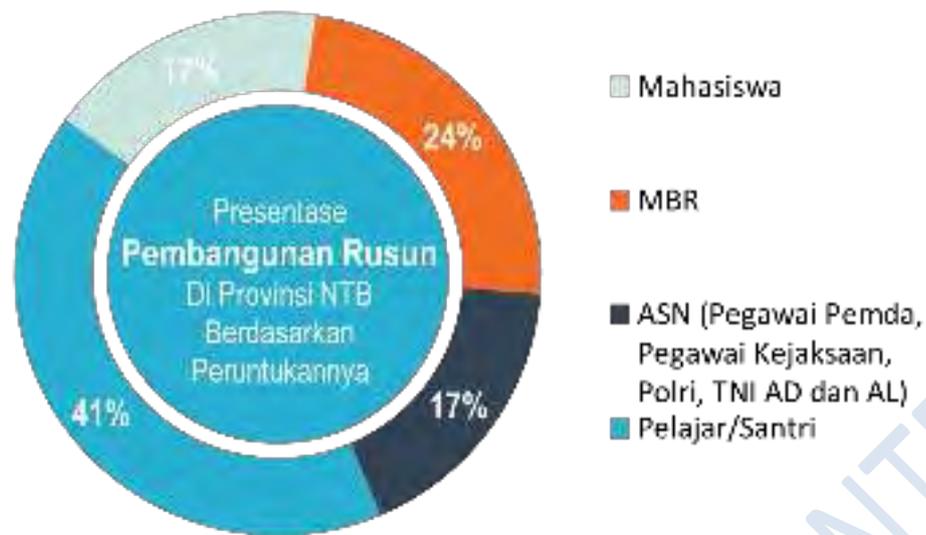


Gambar 6.8. Jumlah Pembangunan Rumah Susun di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2018

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB

Berdasarkan gambar di atas, sampai dengan tahun 2018 telah dibangun sejumlah 46 unit rusun di Provinsi NTB yang tersebar dimasing-masing kabupaten/kota kecuali Kabupaten Dompu. Jumlah rusun yang telah terbangun paling banyak terdapat di Kota Mataram yaitu sejumlah 13 unit rusun dan paling sedikit terdapat di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Bima sejumlah 2 unit rusun.

Pembangunan rusun di Provinsi NTB sebagian besar diperuntukkan untuk para Pelajar/Santri, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), ASN dan Mahasiswa. Persentasi masing-masing peruntukkan dari pembangunan rusun di Provinsi NTB dapat ditunjukkan seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 6.9. Persentase Pembangunan Rusun di Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2018 Berdasarkan Peruntukannya

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB

STATISTIK KOMINFOTIK NTB

BAB VII

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah organisasi pemerintah yang berada di bawah Kepala Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai koordinator perencanaan pembangunan di daerahnya. Bappeda Provinsi NTB merupakan salah satu unsur satuan perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur NTB.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang koordinasi perencanaan dan penyusunan rencana kerja pemerintah jangka panjang, penetapan plafon anggaran sementara (PPAS), serta penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Beberapa perencanaan dan penyusunan rencana kerja pemerintah yang telah disiapkan oleh bappeda di tuangkan dalam beberapa data dalam bentuk dokumen seperti yang dapat ditunjukkan sebagai berikut.

7.1 Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Perencanaan pembangunan ekonomi adalah pengendalian dan pengaturan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Perencanaan pembangunan ekonomi juga berarti proses yang berkesinambungan dalam membuat keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan berbagai alternatif sumberdaya untuk mengandalikan suatu perekonomian guna mencapai sasaran atau tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Unsur-unsur perencanaan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan.
2. Adanya kerangka rencana makro.
3. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten seperti misalnya kebijaksanaan fiskal, moneter, pembangunan, harga dan kebijaksanaan sektoral lainnya
4. Perkiraan sumber daya bagi pembangunan khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

5. Perencanaan pembangunan merupakan program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi sektoral ini dilakukan bersama-sama dengan penyusunan rencana rencana sasaran.

Tabel 7.1. Data Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2015

No.	Uraian	Satuan	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen	1
2	Laporan Pelaksanaan DBHCHT Provinsi NTB	Dokumen	1
3	Penyusunan Dokumen Milenium Development Goals (MDG's)	Dokumen	1
4	Laporan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi (KEK) Khusus Mandalika	Dokumen	2
Jumlah		Dokumen	5

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

Tabel 7.2. Data Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2016

No.	Uraian	Satuan	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen	1
2	Laporan Pelaksanaan DBHCHT Provinsi NTB	Dokumen	1
3	Dokumen Kajian Keterkaitan Harga Umum (Inflasi) dan Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi NTB	Dokumen	1
4	Penyusunan Dokumen Milenium Development Goals (MDG's)	Dokumen	1
5	Laporan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi (KEK) Khusus Mandalika	Dokumen	2
6	Laporan Tahunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika	Dokumen	1
Jumlah		Dokumen	7

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

Tabel 7.3. Data Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2017

No. (1)	Uraian (2)	Satuan (3)	2017 (4)
1	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen	1
2	Laporan Pelaksanaan DBHCHT Provinsi NTB	Dokumen	1
3	Dokumen Perencanaan Pangan Pertanian Provinsi NTB	Dokumen	1
4	Laporan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi (KEK) Khusus Mandalika	Dokumen	2
5	Laporan Tahunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika	Dokumen	1
6	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata	Dokumen	1
Jumlah		Dokumen	7

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

Tabel 7.4. Data Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2018

No. (1)	Uraian (2)	Satuan (3)	2018 (4)
1	Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Dokumen	1
2	Dokumen Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang meliputi dokumen pelaksanaan kegiatan DBHCHT Provinsi NTB Tahun 2014-2017	Dokumen	1
3	Dokumen Pelaksanaan DBHCHT semester I TA. 2018	Dokumen	1
4	Dokumen Pelaksanaan Rekonsiliasi DBHCHT	Dokumen	1
5	Penyusunan Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs)	Dokumen	1
6	Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	Dokumen	1
7	Laporan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika	Dokumen	2
8	Dokumen Laporan Tahunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika	Dokumen	1
Jumlah		Dokumen	9

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

7.2 Perencanaan Pemerintahan NTB

Dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Tahunan, maka daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat propinsi, termasuk menyelenggarakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Propinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD).

Tabel 7.5. menunjukkan beberapa dokumen perencanaan yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan dan Politik Tahun 2015 sampai dengan 2018.

Tabel 7.5. Data Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik Provinsi NTB Tahun 2015 - 2018

No.	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Laporan Sosialisasi Pergub NTB Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Bale Mediasi	Dokumen	1	-	-	-
2	Laporan Tahunan Subbidang Pemerintahan	Dokumen	1	-	-	-
3	Laporan Tahunan Subbidang Pemerintahan	Dokumen	-	1	-	-
4	Naskah Akademik Bale Mediasi	Dokumen	-	-	1	-
5	Laporan Aksi Daerah Pencegahan Korupsi dan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (HAM)	Dokumen	-	-	4	-
6	Dokumen Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi	Dokumen	-	-	-	1
7	Laporan Aksi Daerah Pencegahan Korupsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusi (RAN HAM)	Dokumen	-	-	-	8
Jumlah		Dokumen	2	1	5	9

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

7.3 Perencanaan Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan adalah sebuah subsistem dari sebuah sistem pembangunan bangsa bersama sistem yang lain seperti sistem ekonomi dan sistem politik. Tujuan pendidikan adalah radar bagi perencanaan pendidikan jangka panjang yang akan menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang telah dihadapi pada periode sebelumnya dan kemudian memformulasikan rencana proyeksi solusi yaitu bangsa Indonesia yang lebih baik dan akan menjadi dasar bagi manajemen untuk bertindak.

Tabel 7.6. Data Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2017

No.	Uraian	Satuan	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah	Dokumen	1	-
2	Dokumen Peraturan Gubernur GERMAS	Dokumen	1	-
3	Laporan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Menengah	Dokumen	-	1
4	Dokumen RAD Pangan dan Gizi Provinsi NTB Tahun 2018-2023	Dokumen	-	1
5	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Generasi Emas NTB (GEN)	Dokumen	-	1
Jumlah		Dokumen	2	3

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

Tabel 7.6 menunjukkan beberapa rencana yang sudah disusun oleh Bappeda Provinsi NTB pada Tahun 2017 dan 2018 dalam perencanaan pembangunan pendidikan dan kesehatan di Provinsi NTB yang tertuang secara tertulis dalam beberapa dokumen.

7.4 Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Provinsi NTB

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali lebih dari satu kali dalam lima Tahun. Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan:

1. Perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;
2. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;
3. Keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;
4. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;

6. Rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
7. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
8. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Tabel 7.7. Data Jumlah Dokumen Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Provinsi NTB Tahun 2015

No. (1)	Uraian (2)	Satuan (3)	Jumlah (4)
1	Dokumen Profile Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI)	Dokumen	1
2	Penyusunan Master Plan / Rencana Induk Geopark Rinjani	Dokumen	1
Jumlah		Dokumen	2

Sumber: Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur

Tabel 7.8. Data Jumlah Dokumen Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Provinsi NTB Tahun 2016

No. (1)	Uraian (2)	Satuan (3)	Jumlah (4)
1	Pergub Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI)	Dokumen	1
2	Penyusunan Master Plan / Rencana Induk Geopark Rinjani	Dokumen	1
3	Penyusunan Master Plan / Rencana Induk Pengembangan Geopark Gunung Tambora	Dokumen	1
4	Penyusunan Dasser Tambora	Dokumen	1
Jumlah		Dokumen	4

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

Tabel 7.9. Data Jumlah Dokumen Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Provinsi NTB Tahun 2017

No. (1)	Uraian (2)	Satuan (3)	Jumlah (4)
1	Dokumen Updating Profile Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI)	Dokumen	1
2	Dokumen Profile Infrastruktur Provinsi NTB	Dokumen	1
3	Review RTRW Provinsi NTB (Draft blm di PERDA-kan)	Dokumen	1
Jumlah		Dokumen	3

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

Tabel 7.10. Data Jumlah Dokumen Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur Provinsi NTB Tahun 2018

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dokumen Profile Infrastruktur Provinsi NTB	Dokumen	1
2	Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK)	Dokumen	7
3	Dokumen PPIU (Provincial Project Implementation Unit)	Dokumen	1
4	Dokumen PPMU IPDMIP (Provincial Project Management Unit - Integrated Participatory Development and Management Irrigation Project)	Dokumen	1
5	Penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) Kaji Ulang GRK (Gas Rumah Kaca) Provinsi NTB	Dokumen	1
6	Rekomendasi pemanfaatan ruang oleh BKPRD Provinsi (s.d Juni 2019)	Dokumen	1
7	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW	Dokumen	1
8	Dokumen Pergub RAD Pengembangan dan Pemanfaatan HHBK Pulau Lombok	Dokumen	1
9	Dokumen Masterplan Pengembangan Investasi Kawasan Strategis SAMOTA	Dokumen	1
10	DED Perencanaan Geosite Geopark Rinjani (Persiapan APGN 2019)	Dokumen	1
11	DED Perencanaan Geosite Sarae Nduha Kabupaten Dompu	Dokumen	1
12	Laporan Tahunan Sekretariat Geopark Tambora	Dokumen	1
13	Laporan Tahunan Sekretariat Geopark Rinjani	Dokumen	1
Jumlah		Dokumen	19

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

7.5 Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu prinsip perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan

kewenangan masing masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Tabel 7.11. Data Jumlah Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2015 – 2018

No.	Uraian	Satuan	Jumlah			
			2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dokumen RKPD MURNI DAN PERUBAHAN	Dokumen	2	2	2	2
2	Dokumen KUA PPAS MURNI DAN PERUBAHAN	Dokumen	4	4	4	4
3	Dokumen RPJMD PROVINSI NTB TAHUN 2013 - 2018	Dokumen	1	1	1	1
4	Dokumen RPJMD Revisi Provinsi Ntb Tahun 2013 - 2018	Dokumen	1	1	1	1
5	Dokumen Evaluasi Program Prioritas RPJMD Provinsi NTB Semester I dan Semester II	Dokumen	2	2	2	2
6	Dokumen Evaluasi Triwulanan APBN Triwulan IV, I, II, III	Dokumen	4	4	4	4
7	Dokumen Sinkronisasi Program Kegiatan APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama) dengan Program Kegiatan APBD	Dokumen	1	1	1	1
8	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Triwulan IV, I, II, III	Dokumen	4	4	4	4
9	Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur	Dokumen	1	1	1	1
Jumlah			20	20	20	20

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

Tabel 7.11 menunjukkan beberapa rencana yang sudah disusun oleh Bappeda Provinsi NTB pada Tahun 2018 dalam pengendalian perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTB yang tertuang secara tertulis dalam beberapa dokumen. Beberapa dokumen tersebut diantaranya dokumen RKPD murni dan perubahan,

dokumen KUA PPAS murni dan perubahan, dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, dan dokumen RPJMD revisi Provinsi NTB Tahun 2013-2018, dokumen evaluasi program prioritas RPJMD provinsi NTB semester I dan semester II, dokumen evaluasi triwulan APBN triwulan I, II, III dan IV, dokumen sinkronisasi program kegiatan APBN dan APBD, dokumen evaluasi RKPD SKPD provinsi dan kabupaten/kota triwulan I, II, III dan IV, dan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur.

7.6 Penyusunan Peta

Penyusunan peta berarti merupakan suatu proses analisa dan pengolahan data menjadi sebuah sistem informasi yang mampu di pahami dengan mudah, akurat dan cepat dari sumber data yang sudah ada dalam bentuk SIG (*Sistem Informasi Geografis*), yang bisa di layout dalam sebuah peta.

Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem informasi yang aplikatif, yang dapat digunakan oleh perencana atau oleh pengambil keputusan untuk kepentingan pengolahan sumber daya yang ada maupun berbagai kebutuhan pembangunan di suatu wilayah. Peta yang telah disusun oleh Bappeda Provinsi NTB pada Tahun 2016 – 2018 dapat ditunjukkan pada tabel 7.11 dan 7.12.

Tabel 7.12. Data Jumlah Peta yang Disusun Tahun 2016

No. (1)	Uraian (2)	Satuan (3)	Jumlah (4)
1	Peta Kemiskinan Provinsi NTB	Dokumen	1
2	Peta Tematik Administrasi Desa	Dokumen	1
3	Peta Lahan Sawah Kota Mataram	Dokumen	1
4	Peta SIG Sektor Pendidikan Lombok Barat	Dokumen	1
Jumlah		Dokumen	4

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

Tabel 7.13. Data Jumlah Peta yang Disusun Tahun 2017

No.	Uraian	Satuan	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peta Kesejahteraan Penduduk/Kemiskinan Provinsi NTB	Dokumen	1
2	Peta Tematik Sarana Prasarana Kesehatan Provinsi NTB	Dokumen	1
3	Peta Tematik Tutupan Lahan Kehutanan	Dokumen	1
4	Peta Data Kemiskinan Per Dapil Se NTB	Dokumen	1
Jumlah		Dokumen	4

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

Tabel 7.14. Data Jumlah Peta yang Disusun Tahun 2018

No.	Uraian	Satuan	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peta Sebaran Investasi	Dokumen	1
2	Peta Sebaran UMKM di Pulau Lombok	Dokumen	1
3	Peta Tematik Lahan Sawah Beririgasi/LP2B	Dokumen	1
4	Pergub Simpul Jaringan Provinsi NTB	Dokumen	1
Jumlah		Dokumen	4

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

Tabel 7.12, 7.13 dan 7.14 beberapa peta yang telah disusun oleh Bappeda Provinsi NTB dalam menunjang tugas pemerintah Provinsi NTB Tahun 2016, 2017 dan 2018 diantaranya peta kemiskinan provinsi NTB, peta tematik administrasi desa, peta lahan sawah kota Mataram, peta SIG sektor pendidikan Lombok Barat, peta kesejahteraan penduduk, peta sarana prasaran kesehatan, peta tematik tutupan lahan kehutanan, peta data kemiskinan per dapil se-NTB, peta sebaran investasi, peta sebara UMKM di Pulau Lombok, peta tematik lahan sawa beririgasi dan Pergub simpul jaringan Provinsi NTB.

7.7 Kajian Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Budaya

Tabel 7.15. Data Jumlah Kajian Penelitian Dan Pengembangan Sosial Dan Budaya yang Dilaksanakan Tahun 2017

No.	Uraian	Satuan	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kajian Profil Fasilitas Pelayanan Dasar Kesehatan Di NTB	Dokumen	1
2	Kajian Strategis Pencapaian SDGs	Dokumen	1
3	Kajian Kemiskinan Perkotaan	Dokumen	1

No.	Uraian	Satuan	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kajian Pemetaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan di Pulau Lombok	Dokumen	1
5	Kajian Capaian Indikator RPJMD Bidang Sosial dan Budaya	Dokumen	1
6	Kajian Upaya Minimalisasi Dampak Negatif Usia Perkawinan Dini di Pulau Lombok	Dokumen	1
7	Kajian Profil fasilitas Dasar Pendidikan di NTB	Dokumen	1
Jumlah		Dokumen	7

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

Tabel 7.16. Data Jumlah Kajian Penelitian Dan Pengembangan Sosial Dan Budaya yang Dilaksanakan Tahun 2018

No.	Uraian	Satuan	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kajian Pengembangan Culture Divercity di Tambora	Dokumen	1
2	Masterplan Geosite Rinjani	Dokumen	1
3	Kajian Geo Homestay Geopark Tambora	Dokumen	1
4	Penyusunan buku Melawan Kemiskinan dari Desa	Dokumen	1
5	Kajian Kelembagaan kawasan Agro Eduwisata Banyumulek	Dokumen	1
Jumlah		Dokumen	5

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

7.8 Kajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi

Tabel 7.17. Data Jumlah Kajian Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi dan Wilayah yang Dilaksanakan Tahun 2017-2018

No	Uraian	Satuan	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kajian Pengembangan Kelembagaan Kawasan Strategis SAMOTA	Dokumen	1	1
2	Kajian capaian Indikator RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Dokumen	1	1
3	Kajian pemetaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan di Pulau Sumbawa	Dokumen	1	1
4	Kajian capaian Indikator RPJMD Bidang Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Infrastruktur	Dokumen	1	1
5	Kajian Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Strategis SAMOTA	Dokumen	1	1
Jumlah		Dokumen	5	5

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB

Berdasarkan tabel 7.17 beberapa dokumen yang disusun oleh Bappeda Provinsi NTB dalam rangka kajian penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah yang dilaksanakan Tahun 2017-2018 diantaranya dokumen kajian pengembangan kelembagaan kawasan strategis SAMOTA, kajian capaian indikator RPJMD bidang perencanaan pembangunan ekonomi, kajian pemetaan rencana penanggulangan kemiskinan di pulau Sumbawa, dan kajian capaian indikator RPJMD bidang perencanaan.

STATISTIK KOMINFOTIK NTB

BAB VIII

DINAS KOMINFOTIK

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinas Kominfotik) Provinsi NTB merupakan Perangkat Daerah baru, yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta memperhatikan kebutuhan pelayanan masyarakat sebagaimana hasil analisa Tim Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja dalam rangka pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, maka dibentuklah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada bagian kedua belas Pasal 15 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dinyatakan bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

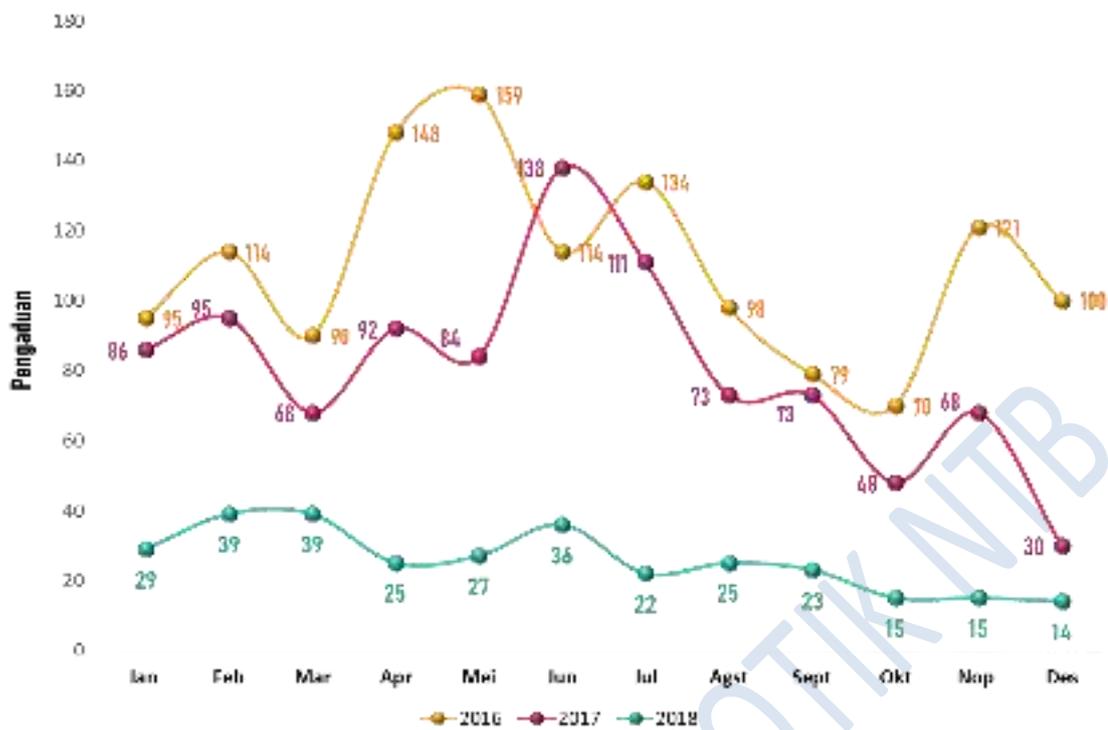
Dinas Kominfotik Provinsi NTB sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentunya diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informasi kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi *e-Government* yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi

informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumber daya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

8.1 Short Message Service Centre (SMS CENTRE)

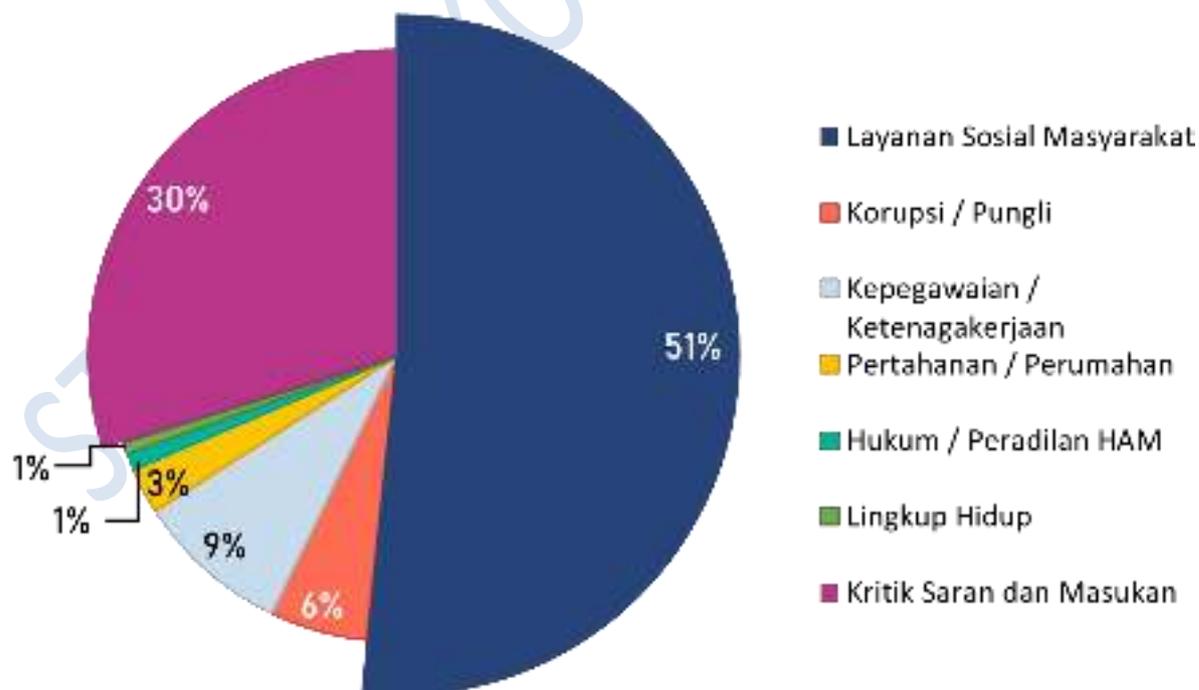
Short Message Service Centre (SMS CENTRE) adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. *SMS center* adalah program yang memiliki fungsi utama untuk mengatur distribusi data dan informasi dalam format dan aturan penulisan tertentu agar bisa memberikan *output* dan keluar informatif yang beragam sesuai dengan kategorinya. *SMS center* harus memiliki kehandalan, kapasitas pelanggan, dan *throughput* pesan yang tinggi. *SMS center* mentransfer pesan dalam format *point-to-point* pada sistem yang melayani. Berikut adalah rekapan penggunaan *SMS center* di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Selain difungsikan untuk menyebarluaskan informasi, SMS Center melalui Dinas Kominfo Prov NTB difungsikan sebagai media untuk menampung aduan-aduan informasi yang dibutuhkan masyarakat terhadap Pemprov NTB. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum, terhadap seseorang yang telah melakukan Tindak Pidana Aduan (TPA) yang merugikan. Dalam mengajukan aduan, harus disertai dengan objek yang diadukan, seperti tempat, lokasi, waktu terjadi dan apa saja yang ada di lokasi. Hal tersebut diperlukan agar aduan tersebut dapat ditindaklanjuti. Berikut adalah jumlah pengaduan secara online di NTB Tahun 2014-2018.



Gambar 8.1. Rekap Pengaduan SMS Center Menurut Bulan Tahun 2016-2018

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB



Gambar 8.2. Rekap Pengaduan Melalui SMS Center Menurut Kategori Tahun 2018

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB

Pada gambar 8.1. menunjukkan rekap penggunaan SMS Center berdasarkan bulan Tahun 2016 sampai dengan 2018. Secara umum SMS Center lebih difungsikan untuk menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Provinsi NTB. Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa jumlah pengaduan melalui SMS center setiap tahunnya mengalami penurunan dengan rata-rata 47,47 persen. Pada Tahun 2018 jumlah pengaduan melalui SMS Center yaitu sejumlah 309 pengaduan.

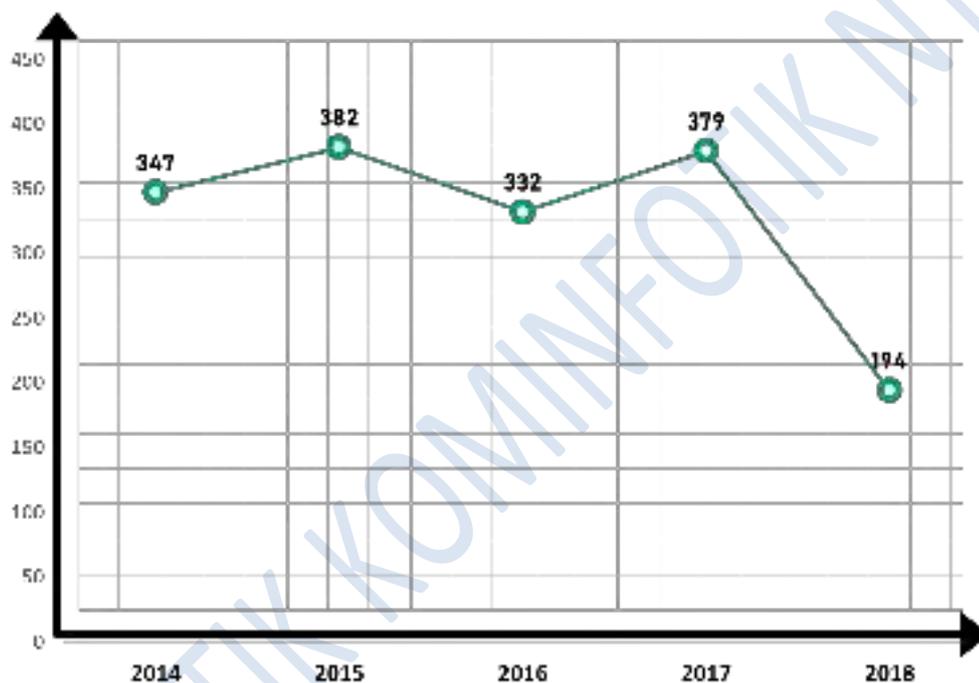
Sementara pada gambar 8.2. menunjukkan rekap penggunaan SMS Center berdasarkan kategori pada Tahun 2018. Pada Tahun 2018 sebagian besar jenis pengaduan yang masuk ke dalam SMS Center terkategori dalam layanan sosial masyarakat dan kritik saran dan masukan dengan persentase sebesar 51 persen dan 30 persen.

8.2 Pengadaan Secara Online

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam sektor pembangunan memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pengadaan barang dan jasa agar dapat mewujudkan infrastruktur yang layak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengadaan sendiri merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Di NTB, lembaga negara yang mengatur dan mengelola pengadaan barang atau jasa secara *online* adalah Dinas Kominfotik Pemprov NTB. Dalam proses pengadaan *online*, Dinas Kominfotik Pemprov NTB memanfaatkan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah *e-tendering* yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *e-tendering*. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (*e-Catalogue*) yang merupakan system informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (*e-Audit*), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (*e-Purchasing*).

Pengadaan barang dan jasa adalah merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar mencapai kesepakatan harga jasa

dapat berjalan dengan baik, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpedoman kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, taat kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang dan jasa yang sudah standar menurut peraturan yang berlaku. Proses pengadaan barang dan jasa terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Berikut adalah jumlah kasus pengadaan secara online di NTB Tahun 2014-2018.



Gambar 8.3. Data Jumlah Layanan Pengadaan secara *Online* di NTB Tahun 2017

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB

Dari gambar 8.3. diketahui bahwa jumlah pengadaan secara *online* melalui Dinas Kominfotik mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2014-2018. Jumlah pengadaan secara *online* melalui Dinas Kominfotik kurun waktu 2014-2018 menurun sebesar 9,41 persen per Tahun. Total ada 194 pengadaan melalui Dinas Kominfotik Pemprov NTB Tahun 2018. Tahun 2018 merupakan tahun terendah adanya proses pengadaan *online*. Pada tahun sebelumnya, ada 379 pengadaan. Sementara itu, pada 2016, terdapat 332 pengadaan, disusul pada Tahun 2015, yang mencapai angka 382 pengadaan dan pada Tahun 2014 mencapai angka 347 pengadaan.

8.3 Kampung Media

Kampung Media adalah program penyebaran informasi berbasis komunitas dan seluruh kegiatannya menggunakan sebuah portal informasi, berita dan jurnalisme. Dituangkan dalam sebuah media online yang berlandaskan kekuatan jurnalisme warga, yang menampung konten yang dapat diunggah oleh setiap orang yang sudah terdaftar sebagai Warga Kampung Media (sebutan bagi pengguna Kampung Media). Partisipasi publik dapat didorong melalui tingkat penyebaran informasi yang merata di tengah masyarakat. Dengan demikian, menyebarkan informasi sudah pasti memiliki jalinan amat kuat dengan upaya mendorong partisipasi publik dalam pembangunan. Dalam ungkapan lain, kata kunci partisipasi publik adalah penyebaran informasi. Berikut adalah data jumlah warga kampung media Tahun 2017 menurut kabupaten/kota.



Gambar 8.4. Data Jumlah Komunitas Kampung Media Tahun 2017-2018

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB

Dari gambar 8.4 diketahui bahwa jumlah warga kampung media Tahun 2017 adalah 201 komunitas dan meningkat pada Tahun 2018 sebesar 7,46 persen menjadi 216 komunitas. Kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah dengan komunitas

kampung media terbesar di NTB. Pada Tahun 2017 di Lombok Timur terdapat 57 komunitas kampung media dan bertambah sebanyak 5 komunitas pada Tahun 2018 menjadi 62 komunitas. Lima wilayah dengan jumlah komunitas kampung media terbesar adalah Lombok Timur, Lombok Barat, Kabupaten Bima, Lombok Tengah dan Kota Mataram. Komunitas warga kampung media terkecil berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan total hanya 6 (enam) komunitas dan pada Tahun 2018 bertambah sebanyak 1 (satu) warga dan menjadi 7 komunitas kampung media. Apabila dilihat menurut pulau berdasarkan total data pada Tahun 2018, 69,98 persen komunitas kampung media berada di Pulau Lombok dan 31,02 persen sisanya berada di Pulau Sumbawa.

8.4 Pelayanan Mobil Calling

Untuk melaksanakan sebagian tugas Kementerian Kominfo sebagai *Government Public Relations* (GPR) melalui penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat, selain bekerjasama dengan pemerintah daerah, juga perlu adanya kendaraan pelayanan informasi publik dalam rangka menjalin komunikasi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan Mitra Strategis Kementerian Kominfo, serta masyarakat, begitu juga sebaliknya dalam rangka menentukan kebijakan pemerintah. Untuk itu, Kementerian Kominfo telah memberikan sarana kendaraan penyuluhan informasi publik kepada sejumlah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, termasuk di lingkup Dinas Kominfotik Pemprov NTB. Untuk di NTB sendiri kendaraan penyuluhan informasi publik disebut dengan mobil calling. Dilaksanakannya kegiatan ini, nantinya diharapkan seluruh daerah bisa menerima manfaat dengan mendapatkan informasi yang mencerahkan, mendidik dan memberdayakan, sehingga bisa meningkatkan pengetahuannya. Berikut adalah data mengenai kegiatan yang sudah disebarkan informasinya dengan menggunakan mobil calling Tahun 2018.

Tabel 8.1. Pelayanan Mobil Calling Tahun 2018

No. (1)	Tanggal (2)	Jenis Kegiatan (3)	Lokasi (4)	Keterangan (5)
1.	28-01-2018	Lombok Marathon 5K, 10K, 21K, 42K	- Senggigi-Lobar - Mataram	DMB dan DISPAR Prov. NTB
2.	18-02-2018	Deklarasi Damai dan Berintegritas	Mataram	KPU Prov.NTB
3.	24-03-2018	Bantuan Publikasi	Islamic Center	DPP-APII
4.	13-04-2018	Tour de Lombok Mandalika	Kuta- Mataram	KONI-DISPAR Prov. NTB
5.	14-04-2018	Tour de Lombok Mandalika	Mataram-Sembalun	KONI-DISPAR Prov. NTB
6.	15-04-2018	Tour de Lombok Mandalika	Sangkareang-Mataram	KONI-DISPAR Prov. NTB
7.	12-05-2018	MNEK (Multilateral Naval Exercise Komodo)	Pelabuhan Lembar- Lap Malomba- Ampenan	Pemprov NTB- TNI AL
8.	15-05-2018	PKR (Pesona Khazanah Ramadhan)	Masjid Hubbul Wathan Islamic Center	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
9.	18-05-2018	Tausiyah Akbar Ustaz	Masjid Hubbul Wathan Islamic Center	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
10.	25-05-2018	Nobar Film Islam	Masjid Hubbul Wathan Islamic Center	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
11.	27-05-2018	Festival Dolanan Santri	Masjid Hubbul Wathan Islamic Center	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
12.	03-06-2018	Pameran Khazanah Dunia Islam	Masjid Hubbul Wathan Islamic Center	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
13.	08-06-2018	1000 Tabuh Gendang Beleq Rekor Muri	Masjid Hubbul Wathan Islamic Center	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
14.	08-07-2018	Bulan Bhakti Karantina	Mataram-Inspiratif Expo	Diskominfotik Provinsi NTB- Karantina Klas I
15.	24-07-2018	Penyambutan dan Pawai Obor Asian Games 2018	Bandara LIA-Mataram	Koni NTB
16.	14-09-2018	Arak-arakan Para Atlet Berprestasi NTB pada Asian Games 2018	Mataram-Lap. Tanjung KLU	Koni NTB
17.	19-09-2018	Closing Ceremoni Sail Moyo 2018	Gili Mas-Lembar Lobar	Dinas Pariwisata Provinsi NTB

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	23-09-2018	Deklarasi Kampanye Damai	Tugu Batu-Udayana	KPU Provinsi NTB
19.	29-09-2018	Festval Holtikultura Sembalun 2018 dirangkaikan HUT ke-73 TNI	Desa Sembalun-Lotim	Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan KOREM 162 WIRABHAKTI
20.	30-09-2018	Pembukaan Festival Holtikultura Sembalun 2018 dirangkaikan HUT ke-73 TNI	Desa Sembalun-Lotim	Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan KOREM 162 WIRABHAKTI
21.	03-10-2018	Festival Kota Tua Ampenan	Mataram	Dinas Pariwisata Prov.NTB dan KOREM 162 WIRABHAKTI
22.	05-10-2018	Night Fun Run	Mataram	TNI RI
23.	11-10-2018	Koling Pesta Rakyat Trauma Healing Pasca gempa	Desa Batulayar	Kementerian Kominfo
24.	12-10-2018	Koling Pesta Rakyat Trauma Healing pasca gempa	Desa Mas Mas, Kec. Batukliang Utara	Kementerian Kominfo
25.	02-11-2018	TNI International Marathon 2018	Kuta Beach	TNI RI
26.	04-12-2018	Koling NTB Expo 2018 dalam rangka HUT ke 60 NTB	STIP Desa Lelede, Kec. Banyumulek	Pemda Prov.NTB dan Dinas Koperasi Provinsi
27.	05-12-2018	Koling NTB Expo 2018 dalam rangka HUT ke-60 NTB	STIP Desa Lelede, Kec. Banyumulek	Pemda Prov.NTB dan Dinas Koperasi Provinsi
28.	10-12-2018	Koling Kirab Pataka Lambang Daerah NTB dan Lambang NTB Bersaing keliling Kab. Bima	Kab. Bima	SATPOL PP Provinsi NTB
29.	10-12-2018	Koling Kirab Pataka Lambang Daerah NTB dan Lambang NTB Bersaing Keliling Kota Bima menuju Kab. Dompu	Kota Bima Menuju Kab. Dompu.	SATPOL PP Provinsi NTB

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	11-12-2018	Koling Kirab Pataka Lambang Daerah NTB dan Lambang NTB Bersaing keliling Kab. Dompu	Kab. Dompu	SATPOL PP Provinsi NTB
31.	11-12-2018	Koling Kirab Pataka Lambang Daerah NTB dan Lambang NTB Bersaing dari Kab. Dompu menuju Kab. Sumbawa	Kab. Dompu menuju Kab. Sumbawa	SATPOL PP Provinsi NTB
32.	11-12-2018	Koling Kirab Pataka Lambang Daerah NTB dan Lambang NTB Bersaing keliling Kab. Sumbawa	Kab. Sumbawa	SATPOL PP Provinsi NTB
33.	12-12-2018	Koling Kirab Pataka Lambang Daerah NTB dan Lambang NTB Bersaing dari Kab. Sumbawa ke Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa	SATPOL PP Provinsi NTB
34.	12-12-2018	Koling Kirab Pataka Lambang Daerah NTB dan Lambang NTB Bersaing dari Kab. Sumbawa Barat ke Kab. Lombok Timur	Kab. Sumbawa Barat	SATPOL PP Provinsi NTB
35.	13-12-2018	Koling Kirab Pataka Lambang Daerah NTB dan Lambang NTB Bersaing dari Kab. Lombok Timur ke Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Timur	SATPOL PP Provinsi NTB
36.	13-12-2018	Koling Kirab Pataka Lambang Daerah NTB dan Lambang NTB Bersaing dari Kab. Lombok Tengah ke Kab. Lombok Barat	Kab. Lombok Tengah	SATPOL PP Provinsi NTB
37.	14-12-2018	Koling Kirab Pataka Lambang Daerah NTB dan Lambang NTB Bersaing dari Kab. Lombok Barat ke Kab. Lombok Utara	Kab. Lombok Utara	SATPOL PP Provinsi NTB

No. (1)	Tanggal (2)	Jenis Kegiatan (3)	Lokasi (4)	Keterangan (5)
38.	14-12-2018	Koling Kirab Pataka Lambang Daerah NTB dan Lambang NTB Bersaing dari Kab. Lombok Utara ke Kota Mataram	Kota Mataram	SATPOL PP Provinsi NTB
39.	15-12-2018	Penyerahan Pataka Lambang Daerah dan Lambang NTB Bersaing kembali setelah dikirab dari Walikota Mataram kepada Gubernur NTB	Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB	SATPOL PP Provinsi NTB
40.	16-12-2018	Koling Touring kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam rangka HUT ke-60 NTB	Kuta Beach	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
41.	17-12-2018	Koling giat bersih sungai Jangkok kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai khususnya dan masyarakat umum sekitarnya, dalam rangka HUT NTB ke-60	Sepanjang Sungai Jangkok	ASN Provinsi dan Kota Mataram serta masyarakat
42.	18-12-2018	Koling dalam rangka Pencanaan Penggunaan Kain Tenun Ikat sebagai seragam dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.	Kota Mataram	Dinas Perdagangan Provinsi NTB
43.	29-12-2018	Koling Bazaar Mandalika /Creativity Culture Of Lombok Tgl. 30-31-2018	Kek Mandalika, Kuta Lombok	BUMN, ITDC

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB

Dari tabel 8.1 pada Tahun 2018, mobil *calling* Dinas Kominfotik Pemprov NTB hanya menyebarkan 43 informasi. Sebagian besar informasinya merupakan informasi yang menunjang pariwisata Lombok, seperti Lombok Maraton, Tour de Lombok Mandalika dan MNEK. Mobil *calling* pernah sekali (1 kali) menyebarkan informasi terkait

Deklarasi Damai dan Berintegrasi, yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi NTB. Rata-rata setiap bulannya, mobil *calling* menyebarkan 1 (satu) informasi dengan intensitas yang berbeda-beda (rata-rata dua kali keluar memberikan informasi). (belum)

8.5 Aktivitas Website dan Medsos Perangkat Daerah Provinsi NTB

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah di bawah lingkup pemerintah provinsi NTB memiliki website sebagai sarana penyebarluasan informasi. Selain website, media sosial (Medsos) juga digunakan sebagai sarana penyebarluasan informasi. Website dan Medsos yang resmi dikelola perangkat daerah juga dapat membantu dalam mencegah penyebaran informasi "Hoax".

Berikut adalah rekapitulasi jumlah informasi yang disebar oleh perangkat daerah Pemprov NTB menurut jenis media/sarananya.



Gambar 8.5. Jumlah Informasi/Postingan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB Tahun 2017-2018 Menurut Jenis Media/Sarananya

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB

Kurun waktu 2018, Perangkat Daerah Pemprov NTB telah memposting 15.227 informasi. Dari gambar 8.6. diketahui bahwa perangkat daerah yang paling sering memposting informasi adalah Biro Humas dan Protokol dengan 3.201 informasi. Pada peringkat kedua terdapat Dinas Kominfotik dengan 3.153 informasi. Peringkat ketiga, keempat dan kelima adalah BAPPENDA, Dinas Rumah Sakit Umum Daerah, dan Rumah Sakit Orang Mutiara Sukma. Perangkat daerah yang paling jarang memposting informasi adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

8.6 Website <https://www.ntbprov.go.id/>

Situs web Pemerintah Daerah dapat dikatakan sebagai salah satu media informasi dan komunikasi dari suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakat/publik dan pihak-pihak lain. Hal yang diinformasikan dan dikomunikasikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan daerah bersangkutan. Bentuk penyajian informasinya dibuat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi komunikasi (*Information Communication Technology*). Situs web Pemerintah Daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan *e-government* secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Situs web Pemerintah Daerah NTB adalah <https://www.ntbprov.go.id/>. Website ini dapat menghubungkan masyarakat/publik dengan seluruh website/situs Perangkat Daerah NTB. Berikut adalah rekapitulasi jumlah pengunjung website <https://www.ntbprov.go.id/>.



Gambar 8.7. Data Jumlah Pengunjung Website <https://www.ntbprov.go.id/>

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB

Dari gambar 8.9 diketahui bahwa jumlah pengunjung website <https://www.ntbprov.go.id/> mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2015-2018. Jumlah pengunjung website <https://www.ntbprov.go.id/> kurun waktu 2015-2018 meningkat sebesar 38,96 persen per Tahun. Total ada 74.890 pengunjung website <https://www.ntbprov.go.id/> Tahun 2015, kemudian meningkat 36,97 persen menjadi 102.578 pengunjung di Tahun 2016. Tahun 2017 terjadi penurunan jumlah pengunjung sebesar 10,84 persen apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, yaitu turun 11.123 pengunjung menjadi 91.445 pengunjung Tahun 2017. Pada Tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah pengunjung sebesar 90,75 persen apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, yaitu meningkat 83.001 pengunjung menjadi 174.456 pengunjung Tahun 2018.

8.7 Data Statistik Sektoral

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Manfaat yang akan diperoleh antara lain adalah untuk mengetahui kecenderungan (*trend*) yang akan terjadi pada masa datang, menentukan prioritas, sebagai acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakanantisipasi terhadap resiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan.

Bidang statistik yang bernaung dibawah Dinas Kominfotik sesuai dengan tupoksinya bertindak sebagai walidata untuk mengumpulkan dan mengolah data statistik sektoral dari organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Data statistik sektoral yang dikumpulkan oleh seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB dibuat infografis dan dianalisis deskriptif dan disajikan dalam bentuk buku statistik sektoral. Produk yang berupa buku statistik sektoral dibuat setiap tahunnya dan menyesuaikan dengan time series data yang diberikan oleh masing-masing OPD. Terdapat tiga macam buku statistik sektoral diantaranya buku statistik sektoral sosial, ekonomi, SDA dan Infrastruktur. Ketiga buku tersebut dibedakan berdasarkan OPD yang bersesuaian dengan tema dari buku.

Selain buku statistik sektoral, sebagian dari data statistik sektoral tersebut disajikan dalam buku tematik yang bersesuaian dan mendukung program pemerintah.

Buku ini membahas secara lebih terperinci suatu tema tertentu. Pada tabel di bawah ini dapat ditunjukkan jumlah buku yang dibuat pada Tahun 2017-2019.

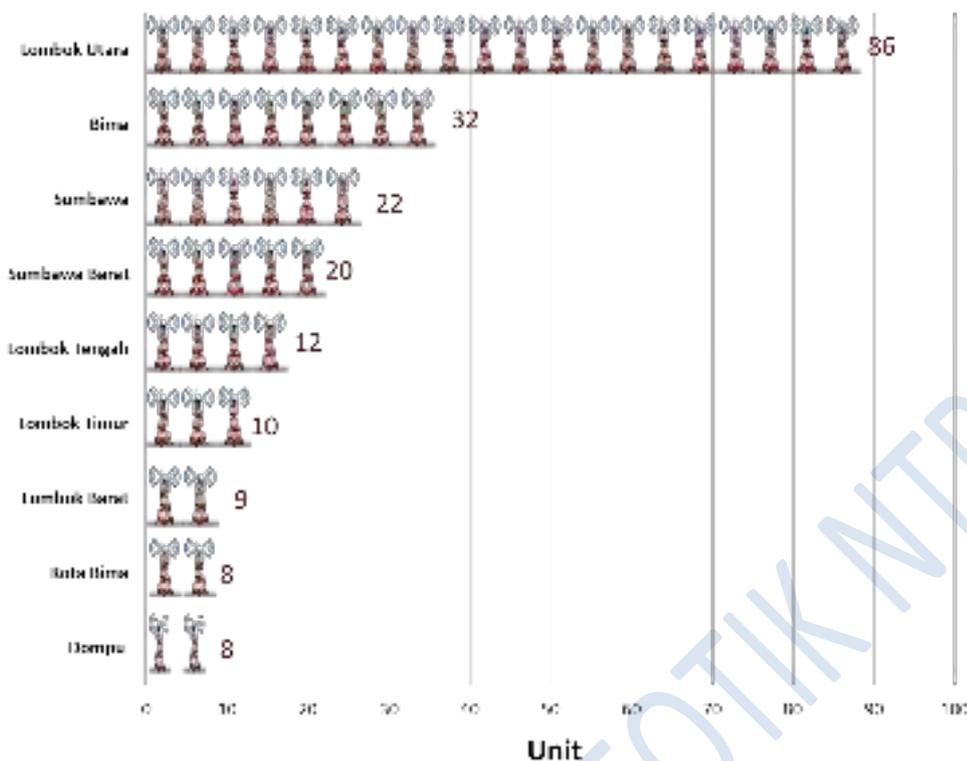
Tabel 8.2. Tabel 1 Jumlah Buku Statistik Tahun 2017-2019

Tahun	Buku Statistik Sektoral			Buku Tematik		
	Sosial	Ekonomi	SDA dan Infrastruktur	Sosial	Ekonomi	SDA dan Infrastruktur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	0	0	0	3	3	3
2018	1	1	1	0	0	1
2019	1	1	1	2	2	2

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB

8.8 Rekapitulasi Pembangunan BTS di NTB

Base Transceiver Station (BTS) adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. Piranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telepon, telepon seluler, jaringan nirkabel sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA, atau platform TDMA. BTS mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan mengkonversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data.



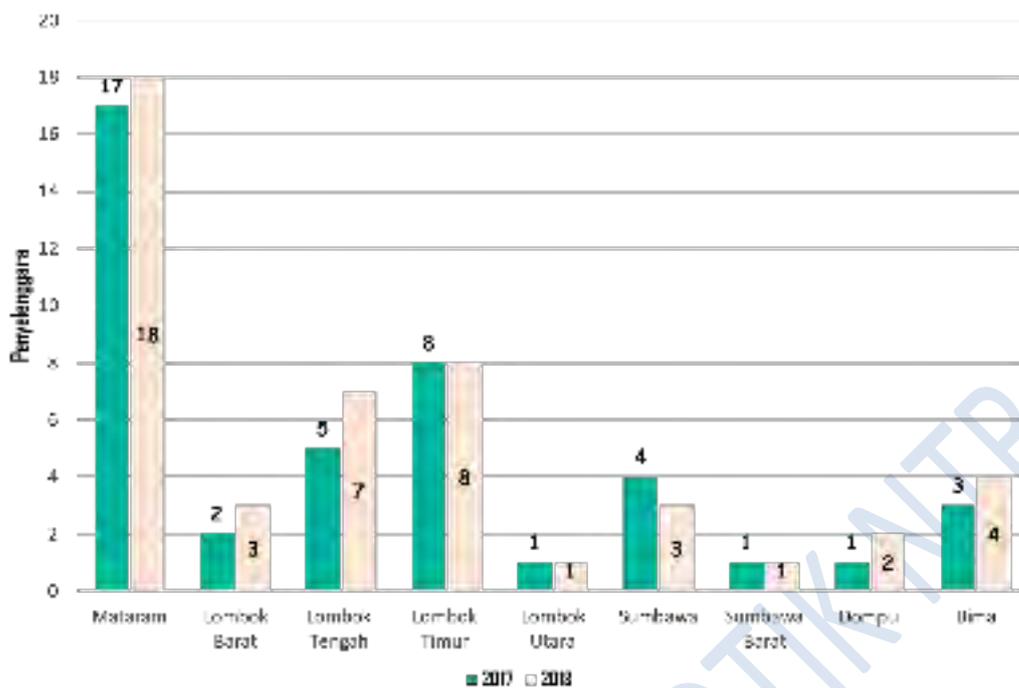
Gambar 8.8. Rekapitulasi Pembangunan BTS pada Area Blankspot di NTB sampai dengan Tahun 2017

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB

Pada gambar diatas ditunjukkan jumlah pembangunan BTS yang dilakukan Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan Tahun 2017 sejumlah 207 unit dan paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok Utara sejumlah 86 unit BTS dan paling sedikit terdapat di Kabupaten Dompu dan Kota Bima sejumlah 8 unit.

8.9 Perkembangan Penyelenggara Radio Siaran FM

Perkembangan radio siaran dengan menggunakan frekuensi modulasi (FM) di wilayah Provinsi NTB pada Tahun 2017 mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang semakin luas, seiring dengan peningkatan tersebut maka loka monitor spektrum frekuensi radio (monspekfrekrad) Mataram selaku pengawas dan pengendali penggunaan spektrum frekuensi radio di NTB telah melakukan pengawasan dan pengendalian serta inventarisasi terhadap penyelenggara stasiun radio siaran FM baik yang berbentuk lembaga penyiaran publik (LPP), lembaga penyiaran swasta (LPS) maupun lembaga penyiaran Komunitas (LPK).



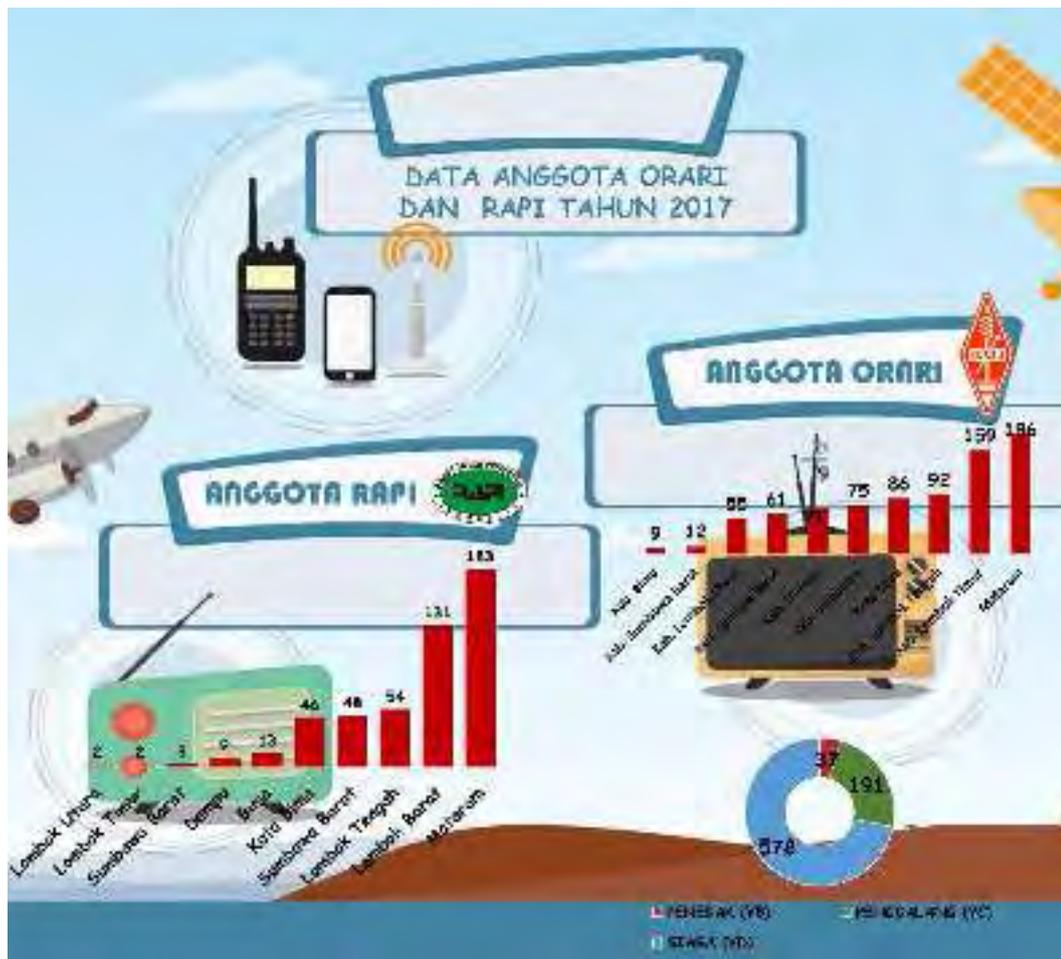
Gambar 8.9. Perkembangan Penyelenggara Radio Siaran FM yang telah ISR Tahun 2017-2018

Sumber: Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Monspekfrekrad) Mataram

Pada gambar diatas ditunjukkan perkembangan penyelenggara radio siaran FM yang telah ISR Tahun 2017 dan 2018. Tahun 2017 jumlah penyelenggara radio siaran FM yang telah ber ISR di Provinsi NTB yaitu 42 penyelenggara. Pada Tahun 2018 bertambah menjadi 47 penyelenggara. Penambahan terjadi pada beberapa kabupaten/kota seperti Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kabupaten Bima.

8.10 Anggota ORARI dan RAPI

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 33/PER/M.KOMINFO/8/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang penyelenggaraan Amatir Radio dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tanggal 31 Agustus tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk maka pembinaan dan pengawasan penyelenggara Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) menjadi tanggung jawab secara langsung Direktorat Jendral Sumber Daya dan Perangkat POS dan Informatika yang pelaksanaannya di daerah dilaksanakan oleh UPT Ditjen SDPPI.



Gambar 8.10. Perkembangan Pengguna ORARI dan RAPI Tahun 2017

Sumber: Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Monspekrekrad) Mataram

Data Tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah anggota RAPI diseluruh kabupaten/kota di NTB paling banyak terdapat di kota Mataram yaitu sebanyak 183 anggota kemudian dari Kabupaten Lombok Barat sebanyak 131 anggota dan paling sedikit terdapat pada Kabupaten Lombok Utara yaitu sebanyak 2 anggota, sementara untuk anggota ORARI paling banyak terdapat di Kota Mataram sebesar 186 pengguna kemudian dari Kabupaten Lombok Timur sebesar 159 anggota dan paling sedikit dari Kabupaten Bima sebesar 9 anggota.

Berdasarkan tingkatan ORARI terbagi atas tiga kategori yaitu tingkat siaga, penggalang dan penegak. Masing-masing tingkatan dibedakan berdasarkan hak-hak khusus yang dimiliki. Siaga adalah tahap atau tingkatan paling rendah ORARI. Untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya anggota ORARI harus mengikuti ujian negara radio amatir. Dari jumlah anggota ORARI pada Tahun 2017, berdasarkan tingkatnya terdapat 37 ORARI penegak, 191 ORARI penggalang, dan 578 ORARI siaga.

8.11 Ujian Negara Amatir Radio

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 33/PER/M.KOMINFO tanggal 31 Agustus 2009 tentang Penyelenggara Amatir Radio, loka monspekfrekrad Mataram bekerjasama dengan Direktorat Operasi SDPPI, Ditjen SDPPI dan ORARI daerah NTB dan ORARI lokal se-NTB menyelenggarakan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) di 2 (dua) lokasi yang berbeda yaitu di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Bima sebagai berikut.

Tabel 8.3. Ujian Negara Amatir Radio Tahun 2017

No	Tempat	Jumlah Pendaftar			Jumlah Kelulusan		
		Siaga (YD)	Penggalang (YC)	Penegak (YB)	Siaga (YD)	Penggalang (YC)	Penegak (YB)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Lombok Barat	237	8	0	224	3	0
2	Kota Bima	70	9	0	67	9	0
Jumlah		307	17	0	291	12	0

Sumber: Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Monspekfrekrad) Mataram

Tabel 8.4. Ujian Negara Amatir Radio Tahun 2018

No	Tempat	Jumlah Pendaftar			Jumlah Kelulusan		
		Siaga (YD)	Penggalang (YC)	Penegak (YB)	Siaga (YD)	Penggalang (YC)	Penegak (YB)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Lombok Timur	217	33	4	192	13	4
2	Sumbawa	69	6	1	60	2	0
Jumlah		286	39	5	252	15	4

Sumber: Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Monspekfrekrad) Mataram

Pada Tahun 2018 ujian negara amatir radio juga diadakan di dua kabupate n yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa. Jumlah peserta ujian amatir radio pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sejumlah 21 orang seperti ditunjukkan pada tabel 8.3 dan 8.4.

8.12 Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mendefinisikan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi menurut ketentuan yang diatur dalam UU KIP.

Pengguna Informasi Publik adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik yang menggunakan Informasi Publik. Selanjutnya yang dimaksud dengan Pemohon Informasi Publik adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik menurut peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi penyelesaian sengketa informasi publik yang terjadi di Provinsi NTB ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Tabel 8.5. Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No.	Tahun	Jumlah			
		Permohonan Sengketa	Putusan		
			Tolak	Mediasi	Ajudikasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2013	14	3	5	6
2	2014	43	33	1	9
3	2015	9	8	0	1
4	2016	4	1	3	0
5	2017	5	2	3	0
6	2018	9	1	3	5
Jumlah		84	48	15	21

Sumber: Komisi Informasi Provinsi NTB

STATISTIK KOMINFOTIK NTB

BAB IX

BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP

Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tugas pokok dari Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPBJP) yaitu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi program pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, fisik prasarana, pembinaan pembangunan kabupaten/kota serta pelaksanaan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dari beberapa tugas pokok yang dijalankan, Biro Bina Administrasi Pembangunan dan LPBJP menyediakan data mengenai rekapitulasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah pada ULP Biro Administrasi Pembangunan dan LPBJP Provinsi NTB Tahun anggaran 2014-2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut penegrtiannya pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan. Jenis-jenis pengadaan diantaranya:

1. Pengadaan Barang

Barang publik adalah barang yang penggunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan barang privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok tertentu.

2. Pengadaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

3. Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*). Apapun produk dari pengadaan jasa konsultasi namun pada intinya jasa konsultansi memerlukan keahlian tenaga ahli dari berbagai bidang keilmuan sesuai dengan bidang jasa yang dibutuhkan.

4. Jasa Lainnya

Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan Barang.



Gambar 9.1. Rekapitulasi Lelang di Provinsi NTB pada Tahun 2014 sampai dengan 2018

Sumber: Biro Bina APP dan LPBJP Provinsi NTB

Gambar 9.1 menunjukkan beberapa jenis lelang barang dan jasa pemerintah provinsi NTB Tahun 2014-2018 yang bersumber dari dana APBD. Pada Tahun 2018 terjadi penurunan pada semua jenis lelang. Lelang konsultan menurun sejumlah 59 paket, konstruksi menurun sejumlah 120 paket, barang menurun sejumlah 21 paket dan lelang jasa lainnya menurun sejumlah 2 paket.

BAB X

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan urusan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas dekonsentrasi serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10.1 Kawasan Hutan dan Planologi

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.

Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global.

Kawasan hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi. Penunjukan kawasan hutan mencakup pula kawasan perairan yang menjadi bagian dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi kedalam kelompok hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi dengan pengertian sebagai berikut:



Gambar 10.1. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Berdasarkan data sampai dengan Tahun 2018, total luas kawasan hutan di Provinsi NTB mencapai 1.071.722,83 ha yang terbagi dalam tiga kelompok kawasan hutan yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Terdapat sebesar 16,20 persen Kawasan hutan konservasi, 41,44 persen kawasan hutan lindung dan 42,36 persen kawasan hutan produksi.

10.1.1 Hutan Konservasi

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari:

- a. Kawasan Hutan Suaka Alam (KSA) adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dan juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. KSA dapat berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM).
- CA adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan perkembangannya berlangsung secara alami.
 - SM adalah wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam punah.
- b. Kawasan Hutan Pelestarian Alam (KPA) adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. KPA berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Wisata Alam (TWA); dan Taman Buru (TB).
- TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan/atau satwa, pariwisata dan rekreasi.
 - THR adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan jenis asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan atau satwa, budaya, pariwisata dan rekreasi.
 - TWA adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
- c. Taman Buru (TB) adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu



Gambar 10.2. Luas Kawasan Hutan Konservasi Di Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Pada gambar di atas dapat ditunjukkan bahwa kawasan hutan konservasi di Provinsi NTB terdiri dari cagar alam, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya dan taman berburu. Kawasan hutan konservasi di Provinsi NTB di dominasi oleh taman nasional sebesar 65,05 persen dari total luas kawasan konservasi, kemudian taman berburu sebesar 12,98 persen, dan taman wisata alam sebesar 12,66 persen. Berdasarkan lokasinya, kawasan hutan konservasi di Provinsi NTB paling tinggi terdapat di Kabupaten Bima sebesar 32 persen atau sejumlah 55.999,69 hektare kemudian di Kabupaten Sumbawa sebesar 17,4 persen atau sebesar 30.279,65 hektare dan Kota Bima menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang tidak memiliki kawasan hutan konservasi.

10.1.2 Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutang yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah.



Gambar 10.3. Presentase Luas Hutan Lindung Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

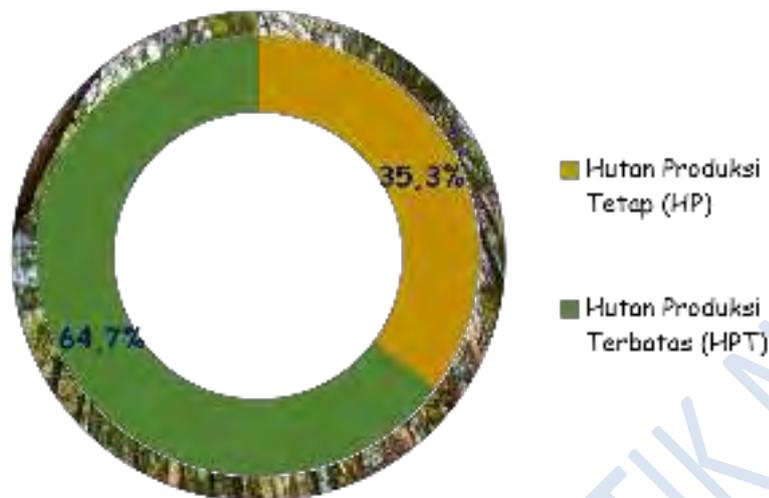
Gambar di atas menunjukkan data mengenai kawasan hutan lindung yang ada di NTB. Hutan lindung hampir tersebar diseluruh kabupaten/kota yang ada di NTB dan paling tinggi terdapat di Kabupaten Sumbawa yaitu sebesar 37,98 persen dari total luas kawasan hutan lindung yang ada atau sebesar 168.667,68 ha dan paling kecil terdapat di Kabupaten Kota Bima yaitu sebesar 0,07 persen atau 323,8 ha.

10.1.3 Hutan Produksi

Hutan produksi adalah hutan yang sengaja ditanam dan diambil kayunya. Hasil hutan yang dimanfaatkan dapat berupa kayu dan nonkayu. Hutan produksi terdiri atas hutan produksi tetap (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT).

- a. HP adalah hutan yang dapat di eksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
- b. HPT adalah hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan produksi terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan

intensitas rendah. HPT ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.



Gambar 10.4. Presentase Hutan Produksi Menurut Jenisnya di Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2018

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

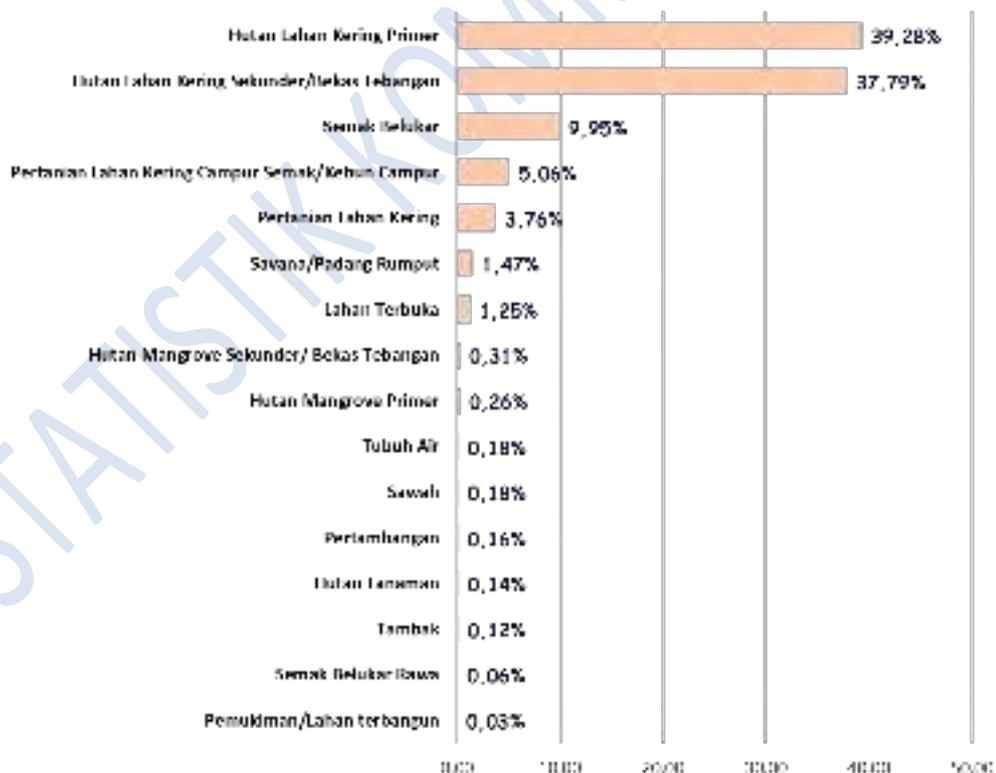
Gambar 10.4. menunjukkan data mengenai kawasan hutan produksi yang ada di NTB. Hutan produksi terbagi atas dua jenis yaitu hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Dari total luas hutan produksi yang ada, 64,70 persen merupakan hutan produksi terbatas dan 35,30 persen merupakan hutan produksi tetap. Hutan produksi tersebar hampir diseluruh kabupaten/kota yang ada di NTB. Jenis hutan produksi tinggi terdapat di Kabupaten Sumbawa yaitu sebesar 22,7 persen yang terdiri dari 30,2 persen hutan produksi terbatas atau sebesar 137.036,14 ha dan 11,8 persen hutan produksi tetap atau sebesar 53.691,88 ha dan paling rendah terdapat di Kabupaten Lombok Timur yang hanya memiliki hutan produksi tetap dengan luas 5.565 hektare atau 3,47 persen dari total luas hutan produksi tetap di NTB.

10.2 Penutupan Lahan

Penutupan lahan yaitu tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pihak antara lain Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan yaitu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang tersebar di seluruh Indonesia, menggunakan Landsat 8 OLI dan Landsat 7 ETM + sebagai pelengkap untuk eliminasi awan. Kegiatan penafsiran dilaksanakan oleh BPKH I-XXII yang kemudian dikoordinasikan, dikompilasi dan dikontrol kualitas oleh Dit. IPSDH.

Penutupan lahan di Provinsi NTB diperoleh dari hasil pengolahan data yang berasal dari BPKH wilayah VIII Denpasar. Memiliki 16 kelas penutupan lahan dengan 5 kelas penutupan hutan dan 11 kelas penutupan bukan hutan yaitu : Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder/ Bekas Tebangan, Hutan Tanaman, Lahan Terbuka, Pemukiman/Lahan terbangun, Pertambangan, Pertanian Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering Campur Semak/Kebun Campur, Savana/Padang Rumput, Sawah, Semak Belukar, Semak Belukar Rawa, Tambak, dan Tubuh Air.



Gambar 10.5. Persentase Tutupan Lahan dalam Kawasan Hutan di Provinsi NTB Menurut Tipe Tutupan sampai dengan Tahun 2018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Gambar di atas menunjukkan bahwa persentase tipe tutupan lahan yang paling tinggi dalam kawasan hutan di Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2018 yaitu hutan lahan kering primer sebesar 39,28 persen kemudian hutan lahan kering sekunder sebesar 37,98 persen dan paling rendah yaitu pemukiman/lahan terbangun sebesar 0,03 persen.

10.3 Hewan dan Tumbuhan Endemik

Hewan endemik adalah jenis hewan yang secara alami hanya terdapat pada wilayah tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lain. Hewan endemik menjadi hewan khas suatu daerah dan sebagian dinamai sesuai dengan nama daerahnya.

Tumbuhan endemik adalah jenis tumbuhan yang secara alami hanya terdapat pada wilayah tertentu saja dan tidak ditemukan di wilayah lain. Wilayah disini bisa dalam ruang lingkup satu provinsi, pulau, negara atau kawasan zona tertentu.

Data ini berisi informasi tumbuhan endemik di Gunung Rinjani dan satwa endemik NTB hasil penelusuran pustaka dan koleksi oleh Pusat Penelitian Biologi-LIPI. Jenis-jenis tersebut masih perlu dilakukan studi ekologi di alam guna memastikan populasinya di alam.

Tabel 10.1. Daftar Jenis Tumbuhan Endemik NTB

No.	Nama Suku	Nama Jenis	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Acanthaceae	Strobilanthes renschiae	Pussuk Gebingers (Pussuk Forest Sembalun)
2	Asteraceae	Gynura elbertii	Segara anak, Sangkareang
3	Asteraceae	Senecio lombokensis	Rinjani, Pesugulan Plawangan, Kembang Kerang
4	Asteraceae	Vernonia albifolia	Rinjani, Sajang, Sembalun
5	Asteraceae	Vernonia tengwallii	Rinjani
6	Begoniaceae	Begonia lombokensis	Jeruk Manis Waterfall, Rinjani bagian Selatan
7	Begoniaceae	Begonia multibracteata	Senaru, Rinjani bagian utara
8	Clethraceae	Clethra javanica var. lombokensis	Rinjani
9	Convolvulaceae	Stictocardia cordatosepala	Rinjani, Sapit, Poesoek, Swela
10	Cucurbitaceae	Pilogyne elbertii	Sembalun

No. (1)	Nama Suku (2)	Nama Jenis (3)	Lokasi (4)
11	Flacourtiaceae	Flacourtia inermis var. rindjanica	Rinjani
12	Gentianaceae	Swertia oxyphylla var. parvula	Rinjani caldera
13	Hymenophyllaceae	Hymenophyllum elbertii	Sangkareang, Rinjani
14	Orchidaceae	Dendrobium eriiflorum var. lombokense	Kalimati, Sembalun
15	Orchidaceae	Dendrobium rindjaniense	Segara Anak, Rinjani
16	Orchidaceae	Oberonia elbertii	Tengengeah, Rinjani
17	Orchidaceae	Peristylus elbertii	Kalimati, Sembalun
18	Orchidaceae	Peristylus lombokensis	Pusuk
19	Orchidaceae	Peristylus rindjaniensis	Tengengeah, Rinjani
20	Orchidaceae	Thrixspermum lombokense	Sangkareang, Rinjani
21	Orchidaceae	Vanda lombokensis	Sembalun
22	Pandanaceae	Freycinetia lombokensis	Hutan Pusuk, Sembalun
23	Piperaceae	Piper aberrans	Sapit-Swela, SE Rinjani
24	Piperaceae	Piper curtilimum	Kembang Kerang, Rinjani bagian Tenggara
25	Piperacea Lawang	Piper kalimatina	Kalimati, Sembalun Lawang
26	Piperaceae	Piper mollicaulis	Sadjang Forest, Rinjani
27	Piperaceae	Piper pubicaulis	Tengengeah, Sembalun Lawang
28	Piperaceae	Piper reflexa forma nana	Tengengean, Sembalun Lawang
29	Piperaceae	Piper rigidicaulis	Hutan Sadjang, Rinjani
30	Piperaceae	Piper rindjanense	Kembang Kerang
31	Piperaceae	Piper sapitense	Sapit, Pusuk
32	Piperaceae	Piper tenuipeduncula	Tengengeah E Rinjani
33	Pteridaceae	Pteris tremula var. cheilanthoides	Segara Anak Lake, Rinjani
34	Symplocaceae	Symplocos brandisii var. pseudoclethra	Hutan Sadjang, Rinjani
35	Tectariaceae	Tectaria lombokensis	Rinjani
36	Verbenaceae	Clerodendrum hettae	Rinjani bagian utara, timur dan tenggara

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 10.2. Daftar Jenis Serangga Endemik NTB

No.	Nama Suku	Jenis	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Curculionidae	Trigonopterus lombokensis	Lombok (Santong, Senaru, Sesaot, Tetebatu)
2	Curculionidae	Trigonopterus sumbawaensis	Sumbawa (Batu Dulang)
3	Curculionidae	Trigonopterus pseudosumbawaensis	Sumbawa (Batu Dulang)
4	Curculionidae	Trigonopterus parasumbawaensis	Sumbawa (Batu Dulang)
5	Curculionidae	Trigonopterus pauxillus	Sumbawa (Batu Dulang, Tepal)
6	Curculionidae	Trigonopterus dentipes	Lombok (Santong, Senaru, Sesaot, Tetebatu)
7	Curculionidae	Trigonopterus fulgidus	Lombok (Santong, Sembalun, Senaru)
8	Curculionidae	Trigonopterus cupreus	Sumbawa (Batu Dulang, Tepal)
9	Curculionidae	Trigonopterus sinuatus	Sumbawa (Batu Dulang, Tepal)
10	Curculionidae	Trigonopterus dacrycarpi	Sumbawa (Batu Dulang, Tepal)
11	Curculionidae	Trigonopterus sasak	Lombok (Gn. Pusuk, Sajang, Sembalun, Sesaot)
12	Curculionidae	Trigonopterus disruptus	Lombok (Gn. Pengasingan, Sajang, Santong, Sembalun, Senaru, Sesaot, Tetebatu)
13	Curculionidae	Trigonopterus rinjaniensis	Lombok (Senaru, Sembalun, Tetebatu)
14	Curculionidae	Trigonopterus aeneomicans	Lombok (Santong, Sembalun, Senaru, Tetebatu) Sumbawa Batu dulang, Tepal)
15	Curculionidae	Trigonopterus punctatoseriatus	Sumbawa (Batu Dulang, Tepal)
16	Curculionidae	Trigonopterus sembilan	Sumbawa (Batu Dulang, Tepal)
17	Curculionidae	Trigonopterus saltator	Sumbawa (Tambora)
18	Curculionidae	Trigonopterus tepalensis	Sumbawa (Tepal)
19	Scarabaeidae	Glycyphana tambora	Sumbawa (Tambora)
20	Scarabaeidae	Glycyphana sumbana	Sumbawa
21	Buperstidae	Agrilus calabai	Sumbawa (Tambora)
22	Creambycidae	Polyphidia lombokiana	Lombok
23	Carabidae	Dolichoctis pedestris	Sumbawa
24	Chrysomelidae	Aspidomorpha sumbawaensis	Sumbawa
25	Chrysomelidae	Paraplotes granulata	Lombok (Sapit-Sembalun Bumbung)
26	Chrysomelidae	Hespera foveipennis	Lombok (Sembalun Lawang, Gn. Rinjani)
27	Chrysomelidae	Hespera lombokana	Lombok (Sapit-Semalun Bumbung)
28	Staphylinidae	Scaphisoma aequum	Sumbawa (Batu Dulang)
29	Staphylinidae	Scaphisoma aereum	Sumbawa (Batu Dulang)
30	Staphylinidae	Scaphisoma angulare	Sumbawa (Batu Dulang)

No.	Nama Suku	Jenis	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
31	Staphylinidae	Scaphisoma activum	Sumbawa (Batu Dulang)
32	Staphylinidae	Scaphisoma actuum	Lombok (Batu Koq)
33	Staphylinidae	Scaphisoma ablutum	Lombok (Gn. Rinjani)
34	Staphylinidae	Scaphisoma sesaotense	Lombok (Sesaot), Sumbawa
35	Staphylinidae	Baeocera barda	Lombok (Pusuk)
36	Staphylinidae	Sapitia lombokiana	Lombok (Sapit)
37	Staphylinidae	Scaphoxium bilobum	Lombok (Rinjani)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 10.3. Daftar Jenis Reptil Endemik NTB

No.	Nama Suku	Jenis	Nama Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gekkonidae	Cyrtodactylus tambora	Cicak-jari lengkung Tambora
2	Gekkonidae	Cyrtodactylus gordongekkoi	Cicak-Jari lengkung Gordon

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 10.4. Daftar Jenis Mamalia Endemik NTB

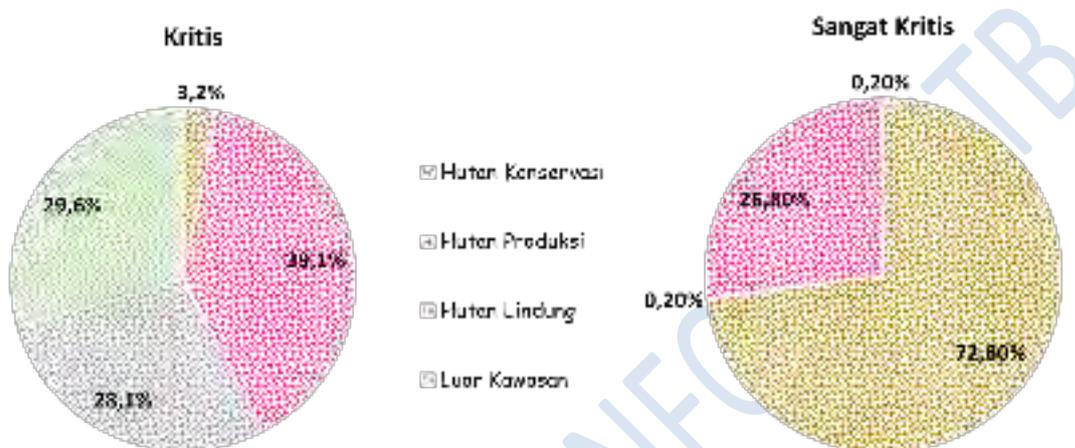
No.	Nama Indonesia	Jenis	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rusa Timor	Rusa timorensis	Lombok dan Sumbawa
2	Trenggiling	Manis javanica	Lombok dan Sumbawa
3	Landak	Hystrix javanica	Lombok dan Sumbawa

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

10.4 Lahan Kritis

Lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan. Penetapan lahan kritis menurut Perdirjen Nomor P.4/V-SET/2013 mengacu pada tutupan lahan, erosi, topografi dan manajemen. Lahan yang termasuk didalam kategori lahan kritis akan kehilangan fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. Kondisi kritis suatu lahan diklasifikasikan ke dalam kategori sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis dan tidak kritis. Pada gambar di bawah ini ditunjukkan potensi lahan kritis dan sangat kritis.

Kriteria lahan yang ada terbagi dalam dua jenis yaitu kritis dan sangat kritis. Data lahan kritis ini diperoleh berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Nomor SK.4/V-DAS/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Penetapan Peta dan Data Hutan dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2013 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional.



Gambar 10.6. Data Luas Kawasan Kritis dan Sangat Kritis Menurut Fungsi Hutan di Provinsi NTB Kondisi Tahun 2018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

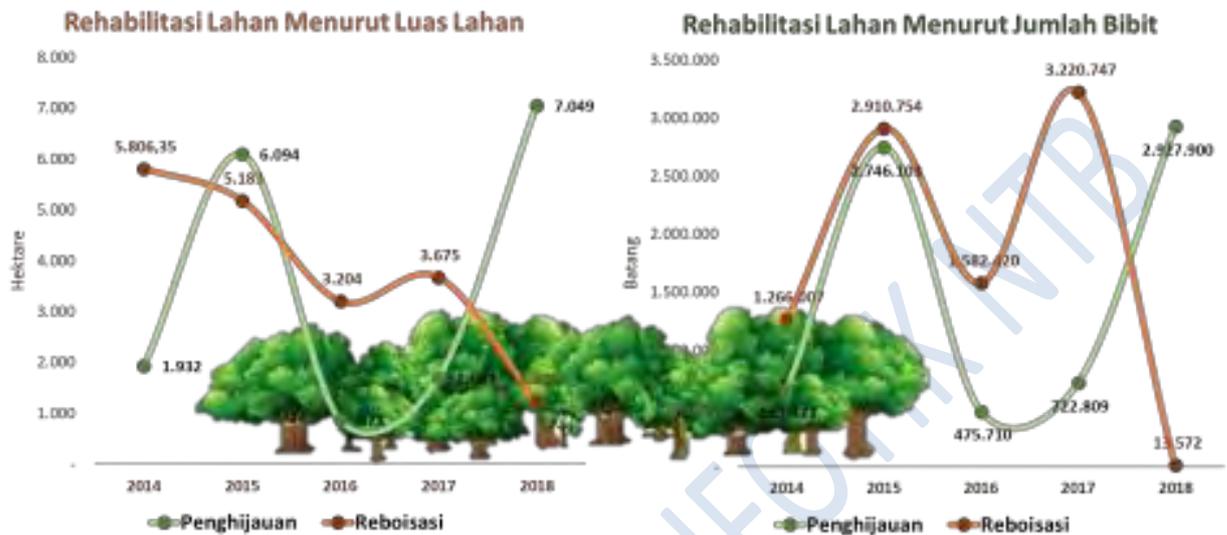
Gambar di atas menunjukkan kondisi hutan di Provinsi NTB menurut fungsi hutan tahun 2018. Pada Tahun 2018 kondisi hutan yang tergolong kritis paling tinggi pada hutan produksi dan paling rendah pada hutan konservasi sementara untuk kondisi sangat kritis paling tinggi pada hutan konservasi dan paling rendah pada hutan lindung dan luar Kawasan hutan.

10.5 Rehabilitasi Lahan

Kegiatan rehabilitasi lahan dilaksanakan melalui kegiatan penanaman pohon pada lahan sangat kritis dan kritis di luar kawasan hutan. Kegiatan ini dilakukan bersumber dari anggaran APBD, APBN melalui UPT Kementerian LHK dan pihak ketiga yang memiliki kewajiban melakukan RHL. Terdapat dua kegiatan yang dilakukan pada rehabilitasi lahan yaitu penghijauan dan reboisasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 reboisasi merupakan upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan

kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Penghijauan adalah kegiatan penanaman pohon pada lahan kosong atau lahan tandus agar lahan tersebut dapat dipulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan kembali kesuburannya.



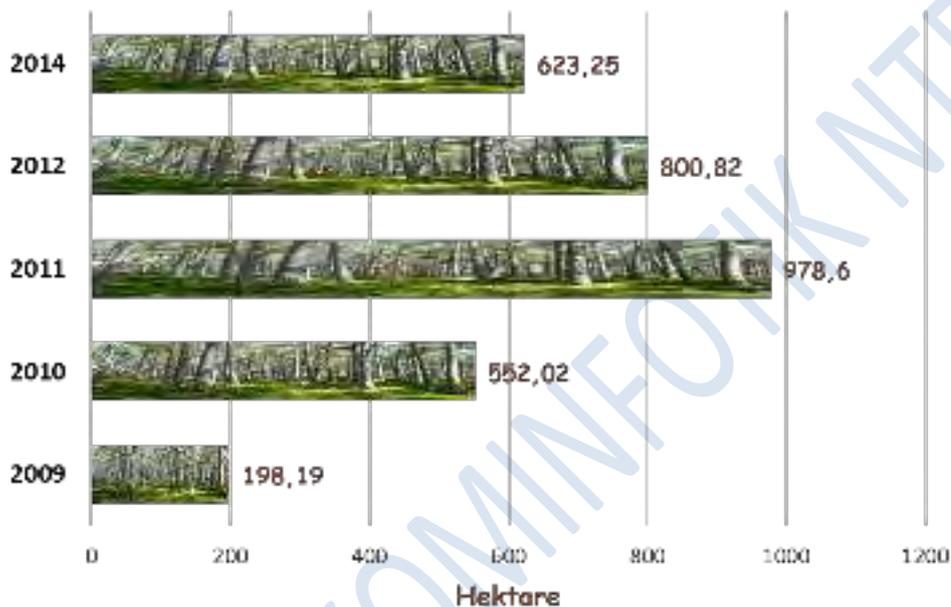
Gambar 10.7. Data Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi NTB

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Reboisasi dan penghijauan merupakan dua kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk merehabilitasi kondisi Kawasan yang berada dalam kondisi kritis maupaun sangat kritis. Reboisasi merupakan rehabilitasi yang dilakukan dalam kawasan hutan sementara penghijauan merupakan rehabilitasi yang dilakukan diluar kawasan hutan terutama pada kawasan milik rakyat menggunakan tanaman keras. Sampai dengan Tahun 2018 total luas lahan yang telah direboisasi sejumlah 19.107,35 hektare dengan jumlah bibit tanaman yang telah ditanam sejumlah 8.993.500 batang. Setiap tahunnya terjadi penurunan 25,1 persen pada luas kawasan hutan yang telah direboisasi. Sementara total luas lahan yang telah dihijaukan sampai dengan Tahun 2018 sejumlah 17.641 hektare dengan jumlah bibit tanaman yang telah ditanam sejumlah 7.537.945 batang. Setiap tahunnya terjadi peningkatan 135,01 persen pada luas kawasan yang telah dilakukan penghijauan.

10.6 Hutan Tanaman Rakyat

Hutan tanaman rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.



Gambar 10.8. Luas Hutan Tanaman Rakyat di Provinsi NTB

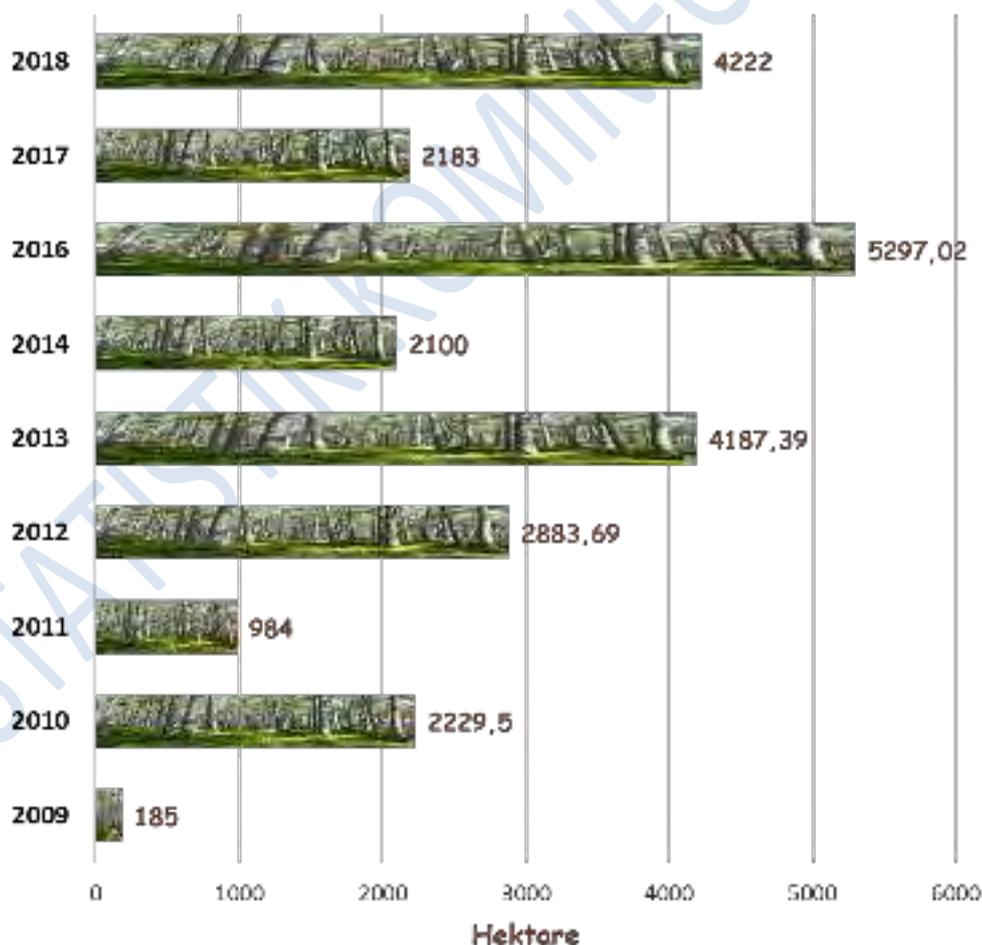
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Gambar diatas menunjukkan luas hutan tanaman rakyat di Provinsi NTB. Pembentukan hutan tanaman rakyat yang paling tinggi sesuai dengan ijin yang diberikan paling tinggi pada Tahun 2011 yaitu seluas 978,6 hektare dan paling rendah pada Tahun 2009 seluas 198,19 hektare. Berdasarkan ijin yang masuk dan telah diberikan, luas hutan tanaman rakyat yang terbentuk terakhir pada Tahun 2014, sementara pada Tahun 2015 sampai 2018 total luas hutan tanaman rakyat masi sama yaitu sejumlah 3152,88 hektare. Berdasarkan wilayah kabupaten/kota sampai dengan Tahun 2018, hutan tanaman rakyat paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok Tengah seluas 15.643,2 hektare.

10.7 Hutan Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 mendefinisikan hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Proses pemberdayaan masyarakat dalam hutan kemasyarakatan tersebut dimaksudkan agar pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat yang mengelola hutan secara lestari dapat dijamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk memecahkan persoalan 9 ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga tujuan dari hutan kemasyarakatan dapat terpenuhi.



Gambar 10.9. Luas Hutan Kemasyarakatan di Provinsi NTB

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

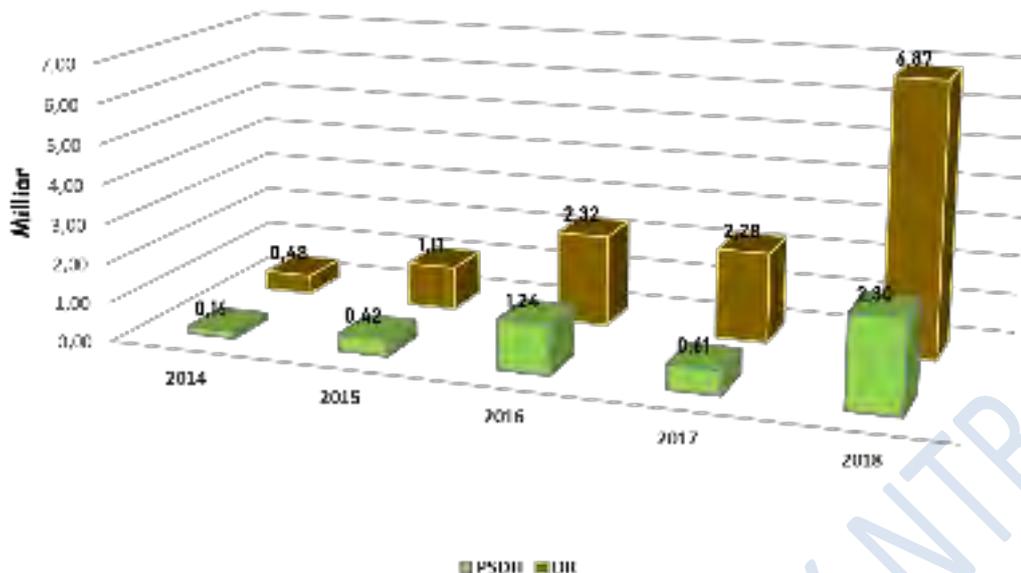
Gambar diatas menunjukkan luas hutan kemasyarakatan di Provinsi NTB. Pemanfaatan hutan kemasyarakatan sesuai yang paling tinggi sesuai dengan ijin yang diberikan paling tinggi pada Tahun 2016 yaitu seluas 5297,02 hektare dan paling rendah pada Tahun 2009 seluas 185 hektare. Hutan kemasyarakatan di Provinsi NTB hanya dimanfaatkan sebagai hutan produksi dan hutan lindung. Berdasarkan wilayah kabupaten/kota, hutan kemasyarakatan paling tinggi terdapat di Kabupaten Dompu seluas 4.020,89 hektare, Kabupaten Sumbawa seluas 2.970 hektare, Kabupaten Lombok Utara 2.948 hektare dan paling rendah Kabupaten Bima seluas 745 hektare.

10.8 Penerimaan PSDH-DR

Penerimaan PSDH-DR merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari PSDH-DR. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai instristik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara sedangkan Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Variabel data terdiri dari:

Hasil hutan yang dikenakan PSDH yaitu:

1. Hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan negara.
2. Hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan negara dan dibebani hak atas tanah.
3. Hasil hutan bukan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari negara.



Gambar 10.10. Penerimaan PSDH-DR di Provinsi NTB Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Pada gambar di atas menunjukkan penerimaan PSDH-DR di Provinsi NTB Tahun 2014-2018. Jika dilihat berdasarkan grafik, pendapatan yang dihasilkan dari dana reboisasi (DR) lebih besar dibandingkan dengan dana dari provisi sumber daya hutan (PSDH). Rata-rata setiap tahunnya jumlah yang dihasilkan dari PSDH maupun DR selalu meningkat. PSDH meningkat rata-rata 0,87 persen dan DR meningkat 2,95 persen per tahun. Jumlah pendapatan paling tinggi yang dihasilkan dari PSDH maupun DR paling tinggi pada Tahun 2018 yaitu 2,30 dan 6,67 miliar rupiah. Berdasarkan wilayah kabupaten/kota penerimaan PSDH-DR paling tinggi berasal dari Kabupaten Sumbawa, dan paling kecil dari Kota Bima. Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara tidak memiliki pendapatan PSDH-DR.

10.9 Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya dan budidaya kecuai kayu yang berasal dari hutan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2007).

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuai kayu yang berasal dari hutan. Pengertian lainnya dari hasil hutan bukan kayu yaitu segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang diambil dari hutan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil hutan bukan kayu pada umumnya merupakan hasil sampingan dari sebuah pohon, misalnya getah, daun, kulit, buah atau berupa tumbuhan tumbuhan yang memiliki sifat khusus seperti rotan, bambu dan lain-lain. Rincian hasil hutan bukan kayu dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 10.5. Rincian Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi NTB

Desa	Kabupaten	Jenis HHBK	Potensi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Desa Batulayar	Lombok Barat	Madu	300	Stup
Kekait	Lombok Barat	Bambu	275	Ha
Taman Sari	Lombok Barat	Bambu	275	Ha
Sesaot	Lombok Barat	Kemiri	3829	Ha
Bukit Tinggi	Lombok Barat	Aren	0	Ha
Batu Mekar	Lombok Barat	Durian	1000	Ha
Batu Mekar	Lombok Barat	Empon-Empon	100	Ha
Tempos	Lombok Barat	Madu	300	Stup
Lingkuk Lima	Lombok Tengah	Bambu	11000	Ha
Steling	Lombok Tengah	Durian	5000	Ha
Steling	Lombok Tengah	Alpukat	2000	Batang
Steling	Lombok Tengah	Kemiri	1000	Kg
Steling	Lombok Tengah	Aren	100	Liter
Obel-Obel	Lombok Timur	Madu	100	Liter
Belanting	Lombok Timur	Madu	100	Liter
Obel-Obel	Lombok Timur	Empon-Empon	100	Ha
Belanting	Lombok Timur	Empon-Empon	100	Ha
Sambelia	Lombok Timur	Empon-Empon	100	Ha
Obel-Obel	Lombok Timur	Porong	520	Ha
Belanting	Lombok Timur	Porong	520	Ha
Sambelia	Lombok Timur	Porong	520	Ha
Obel-Obel	Lombok Timur	Kayu Manis	350	Ha
Belanting	Lombok Timur	Kayu Manis	350	Ha
Sambelia	Lombok Timur	Kayu Manis	350	Ha
Suwela	Lombok Timur	Kemiri	220	Ha
Suwela	Lombok Timur	Durian	35	Ha
Suwela	Lombok Timur	Alpukat	80	Ha
Suwela	Lombok Timur	Bambu	35	Ha
Mumbul Sari	Lombok Utara	Kemiri	154	Ha
Salut	Lombok Utara	Kemiri	450	Ha
Santong	Lombok Utara	Kemiri	1100	Ha
Akar-Akar	Lombok Utara	Bambu	1500	Batang/Ha

Desa	Kabupaten	Jenis HHBK	Potensi	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Moja	Lombok Utara	Durian	15000	Biji/Ha
Sokong	Lombok Utara	Aren	25	Batang/Ha
Mumbul Sari	Lombok Utara	Madu	750	Botol
Gangga	Lombok Utara	Madu	750	Botol
Sekongkang	Sumbawa Barat	Madu	216	Liter
Benete	Sumbawa Barat	Rotan	425	Ton
Benete	Sumbawa Barat	Bambu	26190	Ha
Batu Lanteh	Sumbawa	Bambu	1500	Batang
Ongko	Sumbawa	Madu	7	Liter
Jatibaru	Kota Bima	Kemiri	50	Ton/Ha
Jatibaru	Kota Bima	Madu	100	Liter
Kolo	Kota Bima	Mete	205	Ton/Ha
Riamau	Bima	Kemiri	500	Ha
Pamali	Bima	Madu	600	Ha
Lambu	Bima	Mete	600	Ha
Parado	Bima	Kopi	60	Ha
Parado	Bima	Rotan	1000	Ha
Parado	Bima	Bambu	2000	Ha
Ranggo	Bima	Kemiri	11	Pohon
Ranggo	Dompu	Madu	2	Koloni
Ranggo	Dompu	Rotan	14	Batang
Ranggo	Dompu	Empon-Empon	73	Rumpun
Ranggo	Dompu	Asam	19	Batang
Ranggo	Dompu	Lagenda	17	Batang
Ranggo	Dompu	Asam	13	Batang
Lepadi	Dompu	Pinus	12	Batang
Lepadi	Dompu	Madu	3	Koloni
Mbawi	Dompu	Mila	11	Batang
Mbawi	Dompu	Loq	90	Batang
Mbawi	Dompu	Loka	9	Batang
Mbawi	Dompu	Sabia	102	Batang
Mbawi	Dompu	Bambu	25	Rumpun
Katu	Dompu	Humpa	7	Batang
Katua	Dompu	Sangga	9	Batang
Mangganæ	Dompu	Madu	480	Liter
Mangganæ	Dompu	Asam	20	Batang
Mangganæ	Dompu	Durian	8	Batang
Mangganæ	Dompu	Bambu	120	Batang
Mangganæ	Dompu	Rambutan	14	Batang

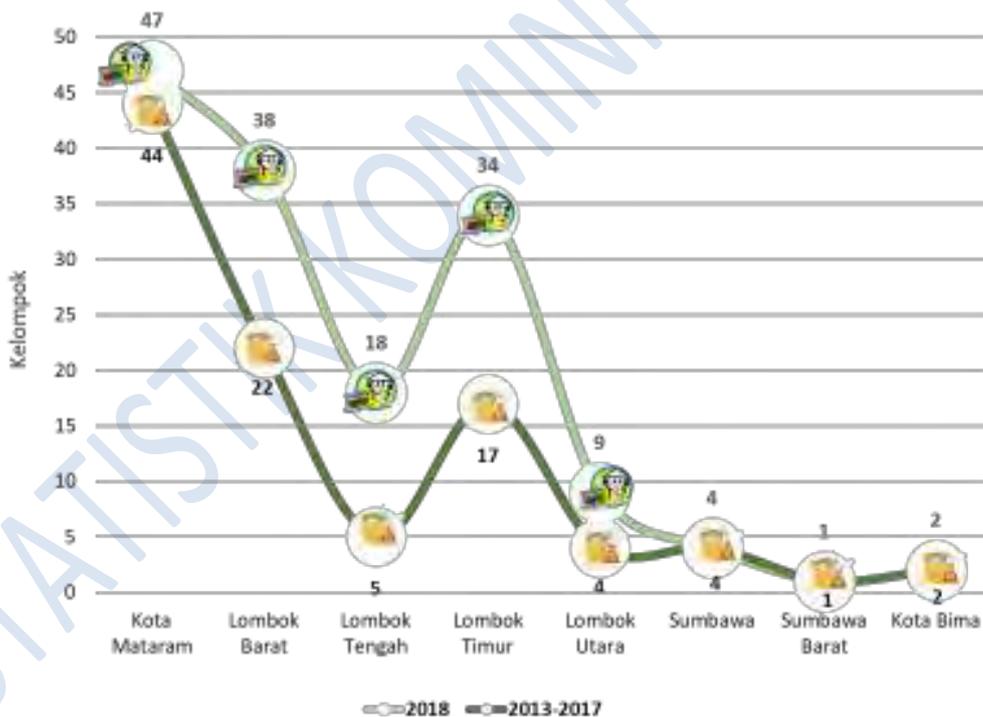
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

10.10 Pengelola Sampah yang Di Bina

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah.

Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam (*resources recovery*). Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat.

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan dikirim pusat daur ulang sampah. Bank sampah bertujuan untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia khususnya wilayah Nusa Tenggara Barat dan menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi dan bersih. Perkembangan jumlah kelompok pengelola sampah yang dibina di Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 10.11. Jumlah Kelompok Pengelola Sampah yang Dibina di Provinsi NTB

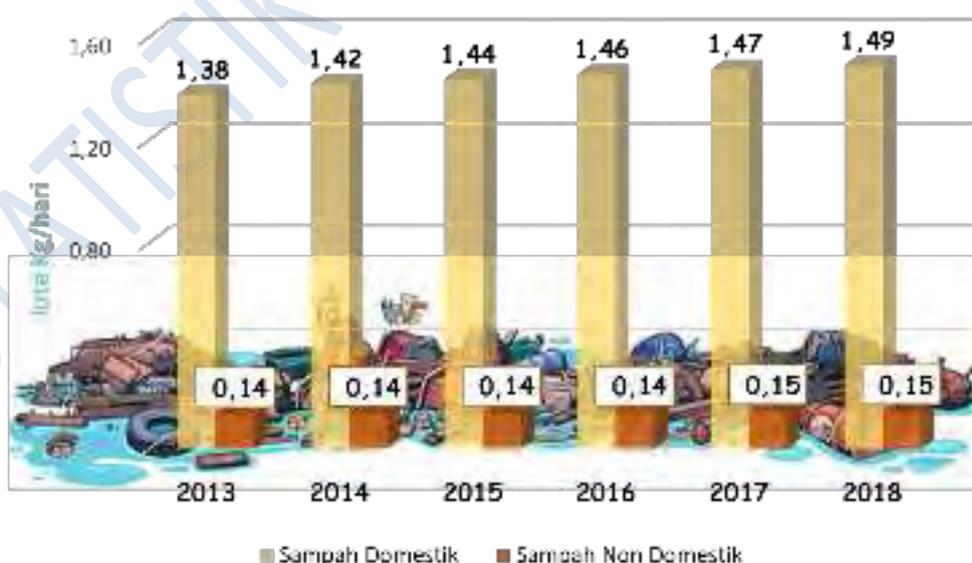
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah kelompok pengelola sampah terdapat pada delapan kabupaten/kota, dua diantara kabupaten/kota yaitu Kabupaten Dompu dan Bima belum memiliki kelompok pengelola sampah. Sejak Tahun 2013 sampai

dengan Tahun 2017 jumlah bank sampah secara keseluruhan sejumlah 99 kelompok dan pada Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 54,55 persen menjadi 153 kelompok. Peningkatan jumlah kelompok pengelola sampah terdapat pada Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara.

10.11 Produksi Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan. Sampah tergolong dalam sampah domestik dan sampah non domestik. Sampah Domestik, yaitu sampah yang sehari-harinya dihasilkan akibat kegiatan manusia secara langsung, misalnya dari rumah tangga, pasar, sekolah pusat keramaian, pemukiman, dan rumah sakit sementara Sampah Non Domestik, yaitu sampah yang sehari-harinya dihasilkan oleh kegiatan manusia secara tidak langsung, seperti, dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, transportasi, dan sebagainya.



Gambar 10.12. Jumlah Produksi Sampah di Provinsi NTB Tahun 2013-2018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Berdasarkan gambar 10.12. jumlah produksi sampah di provinsi NTB meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2013 jumlah produksi sampah domestik di Provinsi NTB sejumlah 1,38 juta Kg/hari dan sampah non domestik sejumlah 0,15 juta Kg/hari dan pada Tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 1,49 juta Kg/hari pada sampah domestik dan 0,15 juta Kg/hari pada sampah non domestik. Setiap tahunnya terjadi peningkatan 0,1 juta kg/hari produksi sampah domestik dan 0,01 juta Kg/hari sampah produksi sampah non domestik. Hal ini menunjukkan bahwa produksi sampah rumah tangga cenderung lebih cepat meningkat. Berdasarkan wilayah kabupaten/kota dari jumlah sampah domestik maupun non domestik pada Tahun 2018 jumlah produksi sampah paling banyak berasal dari Kabupaten Lombok Timur sejumlah 0,39 juta Kg/hari dan paling rendah dari Kabupaten Sumbawa Barat 0,046 juta Kg/hari. Hal ini sesuai dengan jumlah dan kepadatan penduduk di Provinsi NTB berdasarkan kabupaten/kota.

10.12 Dokumen Lingkungan

Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan audit lingkungan.

Dokumen AMDAL merupakan instrumen pengelola lingkungan yang wajib disusun oleh penyelenggara kegiatan/usaha yang melakukan kegiatan/usaha yang termasuk dalam daftar wajib Amdal. UKL-UPL sama halnya seperti AMDAL, berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Hal ini

menyebabkan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL. Namun demikian, dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL. Jumlah dan jenis dokumen lingkungan di Provinsi NTB Tahun 2015-2018 dapat ditunjukkan seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 10.6. Jumlah Validasi Dokumen Lingkungan Provinsi NTB Tahun 2015-2018

No.	Jenis dokumen	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Amdal	6	9	10	6
2	DELH	4	0	0	0
3	UKL-UPL	5	5	6	12
4	UK-UPL	0	2	2	0
5	DPLH	0	0	1	2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

10.13 Pengaduan Kasus Lingkungan

Pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yaitu penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Adapun yang menjadi ruang lingkup pengaduan tersebut adalah:

1. Pencemaran lingkungan hidup, yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

2. Perusakan lingkungan hidup, yaitu tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Tabel 10.7. Jumlah Kasus Pengaduan Kasus Lingkungan

No.	Kabupaten/ Kota	Kasus 2016	Kasus 2017	Kasus 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Mataram	0	0	6
2	Kabupaten Lombok Barat	3	2	0
3	Kabupaten Lombok Tengah	1	10	0
4	Kabupaten Lombok Timur	0	4	5
5	Kabupaten Lombok Utara	1	5	6
6	Kabupaten Sumbawa Barat	0	0	2
7	Kabupaten Sumbawa	1	11	3
8	Kabupaten Dompu	2	8	3
9	Kabupaten Bima	2	2	2
10	Kota Bima	0	0	4
Jumlah		10	42	31

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

10.14 Penyelesaian Tenurial

Tidak ada batasan yang baku mengenai definisi tenurial, namun secara umum tenurial atau "tenure" dapat dimaknai sebagai hak pemangkuan dan penguasaan terhadap lahan dan sumber daya alam yang dikandungnya.

Ada juga beberapa pendapat yang memaknai sebagai "*land ownership*" yang diartikan sebagai kepemilikan terhadap lahan atau kepemilikan atas hak atau kepentingan atas lahan (*Djajono, 2006*).

Beberapa bentuk permasalahan tenurial yang dijumpai yaitu:

1. Areal transmigrasi dalam kawasan hutan;
2. Perambahan/ lahan garapan masyarakat dalam kawasan hutan;
3. Perluasan pemukiman penduduk dalam kawasan hutan;
4. Sertifikat dalam kawasan hutan;
5. Bangunan fasilitas umum seperti sekolah, masjid dan puskesmas dalam kawasan hutan;
6. Bangunan fasilitas pribadi seperti villa/bungalow dalam kawasan hutan.

Data tindak lanjut mengenai penyelesaian tenurial dan perubahan mengenai fungsi kawasan hutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10.8. Data Tindak Lanjut Penyelesaian Tenurial, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi NTB Tahun 2014-2018

Tahun	Sasaran	Kecamatan	Kabupaten	Kelompok Hutan	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2014	Transmigrasi AD	Sekotong	Lombok Barat	Pelangan	HP & HK	90
2014	Sertifikat dalam kawasan hutan di Kedaro	Sekotong	Lombok Barat	Pelangan	HPT	10
2014	Fasilitas umum dan perambahan	Asakota	Kota Bima	Nanganae Kapenta	HP & HPT	130
2014	Pengakuan hak milik dalam kawasan hutan di kompleks kawasan TWA Tanjung Tampa	Pujut	Lombok Tengah	Gn. Prabu	HK	50
2015	Transmigrasi dalam kawasan hutan lokasi So Tompo	Pekat	Dompu	Tambora	HP	125
2015	Transmigrasi dalam kawasan hutan lokasi Taropo	Kilo	Dompu	Tambora	HP	157
2015	Transmigrasi dalam kawasan hutan lokasi Katua	Dompu	Dompu	Toffo Rompu	HPT	56
2016	Transmigrasi dalam kawasan hutan Lokasi Sukadamai	Manggelewa	Dompu	Tambora	HL	361
2017	Prona dalam kawasan hutan di rempek	Gangga	Lombok Utara	Gn. Rinjani	HP	80
2017	Pendudukan kawasan hutan di Senaru	Bayan	Lombok Utara	Gn. Rinjani	HP	12
2017	Transmigrasi eksodan Timur Tengah	Jerowaru	Lombok Timur	Sekaroh	HL	80
2017	Pendudukan kawasan hutan di Mada Wau	Madapangga	Bima	Toffo Rompu	HL	100
2017	Perkebunan dalam kawasan hutan di Piong	Sanggar	Bima	Tambora	HP	20
2017	Perambahan di Tolo Oi dan Mata	Terano	Sumbawa	Ampang Kampaja	HL & HPT	45
2018	Penambangan liar dlm kawasan hutan pada lokasi Buwun Mas, Blongas, Kedaro, Rambut Petung dsk	Sekotong	Lombok Barat	Pelangan	HL & HP	300
2018	Sertifikat dalam kawasan hutan di Sori Tetanga	Pekat	Dompu	Tambora	HPT	20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Berdasarkan tabel 10.8. dapat ditunjukkan data tindak lanjut penyelesaian tenurial dan perubahan fungsi kawasan hutan. Jumlah tindak lanjut penyelesaian tenurial paling sedikit pada Tahun 2016 yaitu sejumlah satu sasaran dan paling tinggi pada Tahun 2017 yaitu sejumlah 6 sasaran. Berdasarkan fungsi hutan, 63 persen perubahan fungsi terjadi di Hutan Produksi, 26 persen terjadi di Hutan Lindung dan 11 persen terjadi di Hutan Konservasi. Pada wilayah kabupaten/kota dan luas wilayah hutan, perubahan fungsi hutan paling tinggi terjadi pada Kabupaten Dompu dengan luas 719 hektare dan paling rendah pada Kabupaten Sumbawa dengan luas 45 hektare.

10.15 Jumlah Perusahaan Yang Diproper

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 1995. Tujuan PROPER adalah mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungannya dan meningkatkan peran perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus menimbulkan efek stimulan dalam pemenuhan peraturan lingkungan dan nilai tambah terhadap pemeliharaan sumber daya alam, konservasi energi dan community development.

PROPER merupakan salah satu sarana kebijaksanaan (policy tool) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka mendorong penataan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, melalui "instrumen informasi" dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

PROPER dikembangkan dengan beberapa prinsip dasar, yaitu peserta PROPER bersifat selektif, yaitu untuk industri yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dan peduli dengan citra atau reputasi. Dari penilaian PROPER, perusahaan akan memperoleh penilaian sesuai bagaimana pengelolaan lingkungannya. Penilaian tersebut menggunakan nilai warna, yaitu warna emas, hijau, biru, merah dan hitam. PROPER warna emas, hijau, dan biru menunjukkan nilai yang sudah baik, dengan nilai emas adalah yang terbaik. Sedangkan untuk nilai merah masih kurang baik, dan hitam adalah yang paling buruk.

Tabel 10.9. Jumlah Perusahaan yang di Proper Tahun 2011-2018

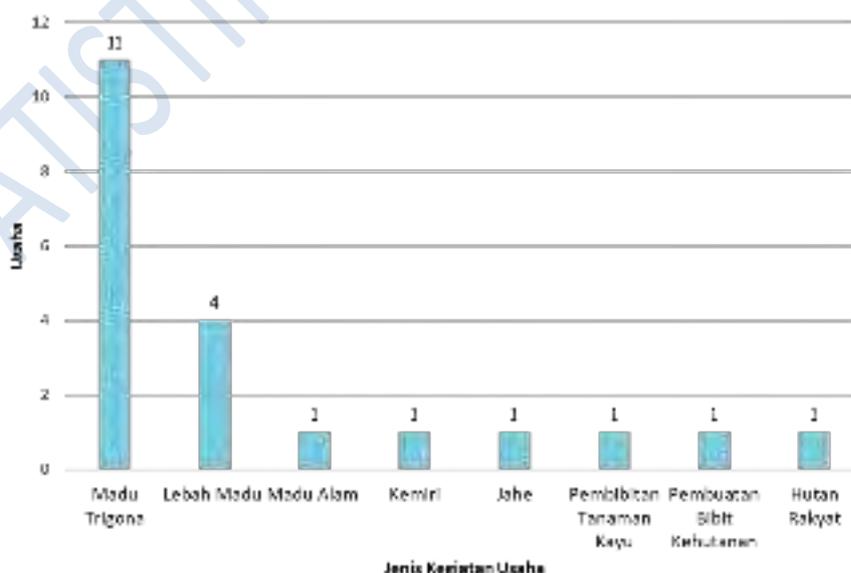
Tahun (1)	Hitam (2)	Merah (3)	Biru (4)	Hijau (5)	Emas (6)
2016	0	1	6	0	0
2017	0	0	14	0	0
2018	0	1	14	0	0
Jumlah	0	2	34	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Tabel 10.9. menunjukkan jumlah perusahaan yang di proper di Provinsi NTB. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan yang diproper mendapatkan warna merah yang menunjukkan bahwa perusahaan di Provinsi NTB telah memiliki dokumen Amdal dan berwarna biru yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki dokumen Amdal dan RKL-RPL.

10.16 Kelompok Usaha Produktif Provinsi NTB

Kelompok Usaha Produktif (KUP) merupakan wadah/ lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk menampung aspirasi/ keinginan masyarakat itu sendiri dan bergerak dalam bidang usaha-usaha yang bersifat produktif dalam bidang kehutanan (aneka usaha kehutanan).



Gambar 10.13. Jumlah KUP di Provinsi NTB Tahun 2012-2018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Pada gambar di atas dapat ditunjukkan jumlah KUP berdasarkan jenis-jenis kegiatan usaha pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018. Sampai dengan Tahun 2016 terdapat 21 KUP di Provinsi NTB dan paling banyak bergerak pada jenis usaha madu trigona. Berdasarkan wilayah kabupaten/kota, KUP paling banyak terdapat di Kabupaten Bima sejumlah 3 KUP dan paling sedikit di Kota Bima sejumlah 1 KUP. Kota Mataram tidak memiliki KUP karena tidak memiliki kawasan hutan sementara pada kabupaten/kota lainnya jumlah KUP yaitu 2 KUP. Informasi lengkap mengenai kelompok usaha produktif (KUP) secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10.10. Kelompok Usaha Produktif di Provinsi NTB Tahun 2012-2016

No. (1)	Nama KTH (2)	Desa (3)	Kecamatan (4)	Kabupaten (5)	Kegiatan (6)	Tahun (7)
1	Gelogor Indah	Pengengat	Pujut	Lombok Tengah	Hutan Rakyat	2012
2	Pade Girang	Genggelang	Gangga	Lombok Utara	Lebah Madu	2012
3	Beriuk Tinjal	Nusa Jaya	Manggelewa	Dompu	Pembuatan Bibit Tanaman kehutanan	2012
4	So Sanau	Kolo	Asa Kota	Kota Bima	Pembibitan Tanaman Kayu-kayuan dan MPTS	2012
5	Madu Sari	Tempos	Gerung	Lombok Barat	Lebah madu	2013
6	Berang Munteh	Mataiyang	Brang Ene	Sumbawa Barat	Lebah madu Hutan	2013
7	Semongkat Makmur	Klungkung	Batu Lanteh	Sumbawa	Agroforestry dan Lebah Madu Budidaya	2013
8	Peduli Hutan	Kanca	Parado	Bima	HHBK Kemiri	2013
9	Dongo Baru	Sapit	Suela	Lombok Timur	HKm, HHBK jahe	2014
10	Madu Lestari	Kawinda Toi	Tambora	Bima	HHBK madu alam	2014
11	Suka Maju II	Senggigi	Batu Layar	Lombok Barat	HHBK Madu Trigona	2016
12	Tunas Muda	Mangkung	Praya Barat	Lombok Tengah	HHBK Madu Trigona	2016
13	Wana Lestari	Darakunci	Sambelia	Lombok Timur	HHBK Madu Trigona	2016
14	Teledan Senggol	Pendua	Kayangan	Lombok Utara	HHBK Madu Trigona	2016
15	Les Matano	Belo	Jereweh	Sumbawa Barat	HHBK Madu Trigona	2016
16	Unter Jepin	Batu bangka	Moyo Hilir	Sumbawa	HHBK Madu Trigona	2016
17	Nggajah Berseri	Songgajah	Kempo	Dompu	HHBK Madu Trigona	2016
18	Kajao Daro	Panda	Palibelo	Bima	HHBK Madu Trigona	2016
19	Makmur Jaya	Karang Bajo	Bayan	Lombok Utara	HHBK Madu Trigona	2018

No.	Nama KTH	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Kegiatan	Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gelogor Indah	Pengangat	Pujut	Lombok Tengah	Hutan Rakyat	2012
20	Puncak Semaring	Mekar Sari	Suela	Lombok Timur	HHBK Madu Trigona	2018
21	Kelaurga Mandiri	Bale Brang	Utana	Sumbawa	HHBK Madu Trigona	2018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

10.17 Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan

Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) yaitu organisasi masyarakat di tingkat desa yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah berbagai pihak di wilayah desa dalam upaya melestarikan fungsi dan manfaat hutan dan lahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Tabel 10.11. Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan di Provinsi NTB Tahun 202-2018

No.	Nama KTH	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Kegiatan	Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gumi Paer Lestari	Dasan Geria	Lingsar	Lombok Barat	HHBK jahe, Agroforestry	2012
2	Seruni	Perigi	Suela	Lombok Timur	Hutan Rakyat, HHBK Lebah Madu	2012
3	Genggelang	Genggelang	Gangga	Lombok Utara	HHBK lebah Madu	2012
4	Sumber Rahayu	Suka Damai	Manggelewa	Dompu	Hutan Rakyat, HHBK Jahe	2012
5	Batu Beserung	Gunung Malang	Pringgabaya	Lombok Timur	Hutan Rakyat, Agroforestry	2013
6	Maju Bersama	Santong	Kayangan	Lombok Utara	HKM, Agroforestry	2015
7	Lembah Hijau	Karang Dima	Labuan Badas	Sumbawa	HHBK lebah Madu, Olahan HHBK	2015
8	Sahabat Bumi	Banjar	Taliwang	Sumbawa Barat	Hutan Rakyat, Agroforestry	2015
9	Gunung Jati	Mangkung	Praya Barat	Lombok Tengah	Hutan Rakyat	2016
10	Bual	Aik Bual	Kopang	Lombok Tengah	HKM, HHBK	2016
11	Pengkuyung	Buwun Sejati	Narmada	Lombok Barat	HHBK lebah Madu	2016

No.	Nama KTH	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Kegiatan	Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Harapan Bersama	Sugian	Sambelia	Lombok Timur	Kemitraan, Hutan Rakyat	2016
13	Maleko Bangkit	Jenggala	Tanjung	Lombok Utara	HKM, HHBK Porang	2016
14	Oi Kalate	Lelamase	Rasanae Timur	Kota Bima	Hutan Rakyat	2016
15	Gunung Pemanto Datu	Maluk	Maluk	Sumbawa Barat	HHBK	2018
16	Samoko	Lito	Moyo Hulu	Sumbawa	HKM	2018
17	Maju Bersama	Batu Jangkih	Praya Barat Daya	Lombok Tengah	HTR, HHBK	2018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Pada tabel di atas dapat ditunjukkan data sentra penyuluhan kehutanan pedesaan di Provinsi NTB pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018. Sampai dengan Tahun 2018 jumlah SPKP di Provinsi NTB sejumlah 17 kelompok. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, SPKP di NTB berupa hutan rakyat agroforestri dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti jahe dan madu. Berdasarkan wilayah kabupaten/kota, SPKP paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok Utara sejumlah 3 kelompok.

10.18 Kelompok Tani Hutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 kelompok tani hutan (KTH) adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. Data berikut ini menunjukkan kelompok tani hutan yang berada di bawah binaan Dinas LHK Provinsi NTB.

Tabel 10.12. Kelompok Tani Hutan Kelas Madya Provinsi NTB

No.	Nama KTH	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Kegiatan	Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hidup Jaya	Giri Madia	Lingsar	Lombok Barat	Hutan Rakyat, Agroforestry	2016
2	Lampak Apik	Plambik	Praya Barat Daya	Lombok Tengah	Hutan Rakyat, Agroforestry	2016
3	Dongo Baru	Sapit	Suela	Lombok Timur	Hutan Rakyat, Agroforestry	2016

No.	Nama KTH	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Kegiatan	Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Sinar Harapan	Pendua	Kayangan	Lombok Utara	Hutan Rakyat, Agroforestry, HHBK Lebah Trigona	2016
5	Sahabat Bumi	Banjar	Taliwang	Sumbawa Barat	Hutan Rakyat, Agroforestry	2016
6	Semongkat Makmur	Klungkung	Batu Lanteh	Sumbawa	Hutan Rakyat, Agroforestry	2016
7	Meci Angi	Riwo	Woja	Dompu	Hutan Rakyat, Agroforestry	2016
8	So Sanau	Kolo	Asa Kota	Kota Bima	Hutan Rakyat, Agroforestry	2016
9	Oi Loa	Runggu	Belo	Bima	Hutan Rakyat, Agroforestry	2016
10	Suka Maju II	Kerandangan	Senggigi	Lombok Barat	HHBK lebah madu, Hutan Rakyat, Agroforestry	2017
11	Beriuk Bareng Pade Angen	Gumantar	Kayangan	Lombok Utara	Hutan Rakyat, HHBK, Hutan Rakyat	2017
12	Beriuk Pade Maju	Kute	Pujut	Lombok Tengah	Hutan Rakyat, Silvopasture, Lebah Madu	2017
13	Harapan Bersama	Sugian	Sambelia	Lombok Timur	Hutan Rakyat	2017
14	Lembah Sempager	Gunung Malang	Pringgabaya	Lombok Timur	HKm, HHBK	2017
15	Gunung Pemanto Datu	Maluk	Maluk	Sumbawa Barat	Hutan Rakyat	2017
16	Mekar Sari	Rhee Loka	Rhee	Sumbawa	Hutan Rakyat, Silvopasture	2017
17	Kokar Jore	Lenangguar	Lenangguar	Sumbawa	Hutan Rakyat	2017
18	Unter Jontal	Batu Tering	Moyo Hulu	Sumbawa	Hutan Rakyat	2017
19	Bukit Sari	Sepayung	Plampang	Sumbawa	Agroforestry, Lebah Madu	2017
20	Wadu Jamba	Nangatumpu	Manggelewa	Dompu	HKm, HHBK Jahe	2017
21	Dore laju	Daha	Hu'U	Dompu	Hutan rakyat, HHBK lebah Madu	2017
22	Taqwa	Sukadamai	Manggelewa	Dompu	Agroforestry, HHBK Jahe Gajah	2017
23	Oi Kalate	Lelamase	Rasanae Timur	Kota Bima	Hutan Rakyat	2017
24	Bensue Lestari	Buwun Sejati	Narmada	Lombok Barat	HHBK, Agroforestry	2017
25	Due Bareng	Salut	Kayangan	Lombok Utara	HHBK Kemiri, lebah madu	2017
26	Batu Bedai	Mekar Sari	Suela	Lombok Timur	HHBK jahe, Hutan Rakyat	2017
27	Orong Iyus	Seloto	Taliwang	Sumbawa Barat	Hutan rakyat, HHBK	2017
28	Oi Rida	Maria Utara	Wawo	Bima	HKm, Agroforestry, kemiri	2017
29	Wana Karya	Kuripan Selatan	Kuripan	Lombok Barat	HKM, Olahan HHBK, Kemiri	2018

No.	Nama KTH	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Kegiatan	Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30	Merte Sari	Senggigi	Batu Layar	Lombok Barat	HKM, Budidaya Empon2	2018
31	Sami Kayun	Sokong	Tanjung	Lombok Utara	Agroforestry, Budidaya Madu	2018
32	Rimba Raya	Aik Bual	Kopang	Lombok Tengah	HHBK. Olan Gula Aren	2018
33	Lembah Madu	Gunung Malang	Pringgabaya	Lombok Timur	HHBK Madu	2018
34	Pade Pacu	Belanting	Gunung Malang	Lombok Timur	Agroforestry. HHK, HHBK Madu	2018
35	Belantara Hijau	Tebo	Poto Tano	Sumbawa Barat	Hutan Rakyat, HHBK, perlindungan mata air	2018
36	Les Matano	Belo	Jereweh	Sumbawa Barat	HHBK Madu Trigona, Madu Alam	2018
37	Swagotra Arthagiri	Sabedo	Utana	Sumbawa	HKM, Agroforestry, perlindungan mata air	2018
38	Keluarga Mandiri	Bale Brang	Utana	Sumbawa	Pembibitan Tanaman Kehutanan, HHBK Lebah Trigona,	2018
39	Samoko	Lito	Moyo Hulu	Sumbawa	HKM, HHBK Bawah Tegakan	2018
40	So Hiri	Temba Lae	Pajo	Dompu	HHBK Madu Alam, HHBK Bawah tegakan, HR	2018
41	Dana Kala	Ntori	Wawo	Bima	HKM, HHBK Kemiri, Kopi	2018
42	Maju Bersama	Batu Jangkih	Praya Barat Daya	Lombok Tengah	HTR, HHK, HHBK, Olan HHBK,	2018
43	Mertak Lender	Kabul	Praya Barat Daya	Lombok Tengah	HTR, HHK, HHBK	2018
44	Teledan Senggol	Pendua	Kayangan	Lombok Utara	HHBK Lebah Trigona	2018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Pada tabel di atas dapat ditunjukkan data kelompok tani hutan pedesaan di Provinsi NTB pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016. Sampai dengan Tahun 2018 jumlah KTH di Provinsi NTB sejumlah 44 kelompok. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, SPKP di NTB berupa hutan rakyat berupa agroforesti dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti jahe dan madu. Berdasarkan wilayah kabupaten/kota, KTH paling banyak terdapat di Kabupaten Sumbawa sejumlah 8 kelompok.

BAB XI

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) sebagai salah satu unit kerja pemerintah Provinsi yang secara teknis fungsional mengelola urusan ESDM kewenangan bidang pertambangan dan energi provinsi. Dalam pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

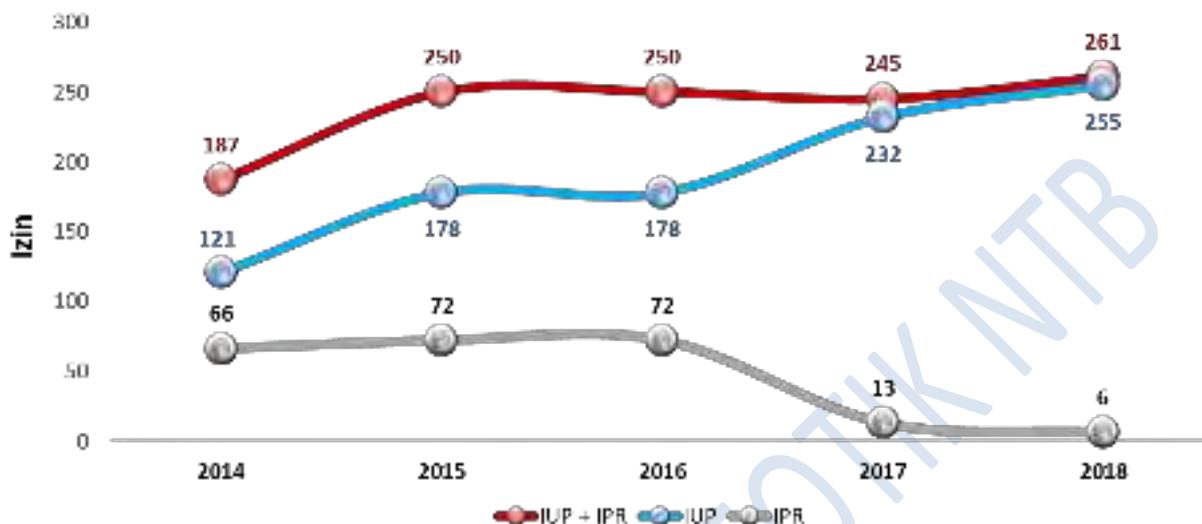
Indonesia menjadi salah satu dari tiga puluh negara yang menjadi anggota *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals (SDGs)*. Berkaitan dengan ini, terdapat fokus baru yang menjawab perkembangan global yang ada yaitu masalah kesenjangan di dalam negara maupun antar negara. Selain itu, akses terhadap energi merupakan fokus baru yang perlu diperhatikan.

11.1. Perizinan Tambang Menurut Jenisnya

Dari beragam masalah yang membelit sektor tambang, perizinan merupakan masalah yang paling banyak disorot. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010, ada 3 (tiga) jenis izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) sesuai dengan kewenangannya, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

IUP dapat digunakan sebagai dasar penetapan wilayah pertambangan, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (iuran tetap, royalti, penjualan hasil tambang) dari IUP, mengetahui produksi nasional mineral dan batubara, sebagai dasar penentuan pemenuhan kebutuhan domestik (DMO), peningkatan kontribusi usaha jasa pertambangan nasional, peningkatan kebutuhan sumber daya manusia dan dapat juga digunakan untuk pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, penting rasanya untuk

mengetahui jumlah perizinan yang telah diterbitkan pemerintah kabupaten/kota. Berikut adalah jumlah IUP dan IPR yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota di NTB Tahun 2014-2018.



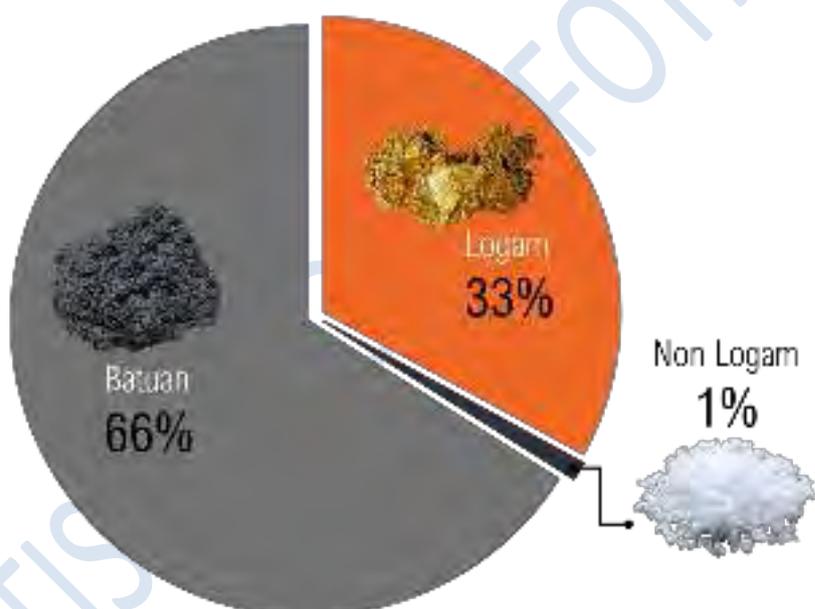
Gambar 11.1. Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Jumlah IUP dan IPR periode Tahun 2014-2018 meningkat rata-rata sebesar 9,56 persen per Tahun, yaitu 187 izin pada Tahun 2014 menjadi 261 izin pada Tahun 2018. Jumlah IUP+IPR tertinggi dicapai pada Tahun 2017-2018, yaitu sebanyak 261 izin, sedangkan jumlah terendah dicapai pada Tahun 2014, yaitu sebanyak 187 izin. Jumlah IUP periode Tahun 2014-2018 meningkat rata-rata sebesar 21,84 persen per Tahun, yaitu 121 izin pada Tahun 2014 menjadi 255 izin pada Tahun 2018. Jumlah IPR periode Tahun 2014-2018 menurun rata-rata sebesar 31,67 persen per Tahun, yaitu 66 izin pada Tahun 2014 menjadi 6 izin pada Tahun 2018. Berikut adalah jumlah IUP dan IPR yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota di NTB Tahun 2018 menurut kabupaten/kota.

11.2. Perizinan Tambang Mineral, Bukan Logam dan Batuan

Kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat dilaksanakan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). IUP yang diberikan dalam bentuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan. Sebelum menerbitkan WIUP, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pengujian terhadap luas dan batas wilayah WIUP. Kriteria penerbitan WIUP mineral, bukan logam dan batuan adalah letak geografis, kaidah konservasi, daya dukung lingkungan, optimalisasi sumber daya mineral bukan logam dan/atau batuan dan tingkat kepadatan penduduk. Berikut adalah perbandingan jumlah IUP mineral, bukan logam dan batuan di Nusa Tenggara Barat.



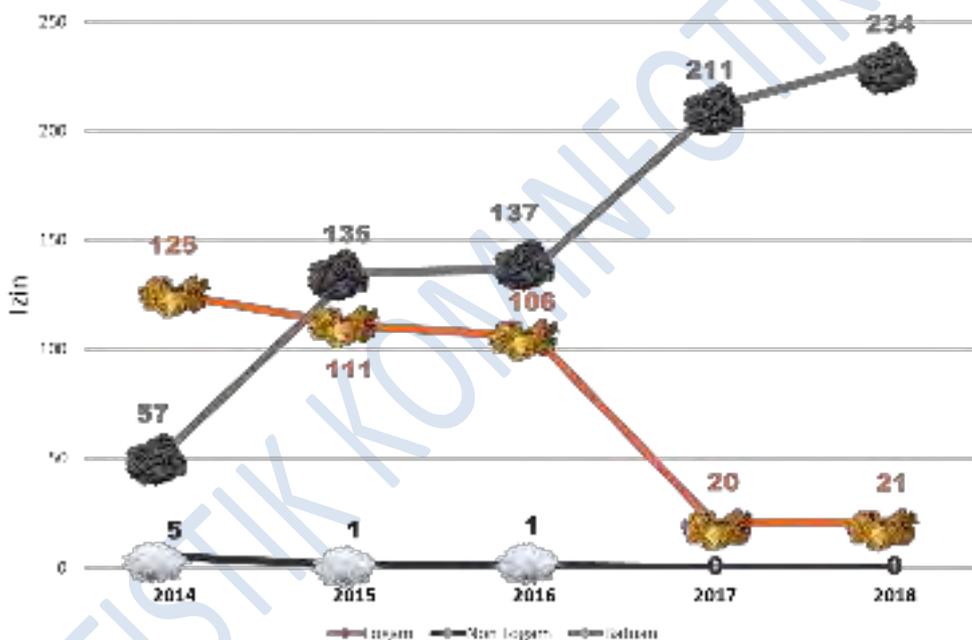
Gambar 11.2. Perbandingan Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral (Logam), Bukan Logam dan Batuan di Nusa Tenggara Barat

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Gambar 11.2. menyajikan persentase dari masing-masing jenis pertambangan, seperti mineral (logam), bukan logam dan batuan. Data di atas diperoleh dengan cara mencari rata-rata dari jumlah IUP dan IPR masing-masing jenis pertambangan Tahun 2014-2018. Dari gambar 11.3 diketahui bahwa 66 persen IUP yang dikeluarkan pemerintah merupakan izin tambang batuan. Komoditas tambang

batuan terdiri dari batu gunung, kerikil sungai ayak tanpa pasir, tanah merah, marmer, granit, batu kali, batu gamping, dll. IUP batuan menempati urutan pertama sebagai izin pertambangan terbanyak di NTB. Posisi kedua ditempati oleh tambang mineral (logam), 33 persen IUP yang dikeluarkan pemerintah merupakan IUP mineral (logam). Komoditas tambang mineral (logam) antara lain seng, emas, tembaga, timah, magnesium dan air raksa. Tambang bukan logam menempati urutan terakhir dengan persentase 1 persen. Komoditas tambang bukan logam seperti intan, belerang, batu gamping untuk semen dan garam batu.

Berikut adalah jumlah IUP mineral, bukan logam dan batuan di Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018.



Gambar 11.3. Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral (Logam), Bukan Logam dan Batuan di NTB Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Pada Tahun 2014, jumlah IUP mineral (logam) paling tinggi dibandingkan IUP bukan logam dan batuan yaitu 125 IUP. Namun, di Tahun 2015-2018, IUP batuan menjadi IUP yang paling banyak dikeluarkan pemerintah. Jumlah IUP batuan periode Tahun 2014-2018 meningkat rata-rata sebesar 50,81 persen per Tahun, yaitu 57 IUP pada Tahun 2014 menjadi 234 IUP pada Tahun 2018. Jumlah IUP batuan tertinggi dicapai pada Tahun 2018, yaitu sebanyak 234 IUP, sedangkan jumlah terendah dicapai

pada Tahun 2014, yaitu sebanyak 57 IUP. Jumlah IUP mineral (logam) periode Tahun 2014-2018 menurun rata-rata sebesar 22,96 persen per Tahun, yaitu 125 IUP pada Tahun 2014 menjadi 21 IUP pada Tahun 2018. Jumlah IUP bukan logam periode Tahun 2014-2018 menurun rata-rata sebesar 45 persen per Tahun, yaitu 5 IUP pada Tahun 2014 menjadi tidak ada IUP bukan logam pada Tahun 2018.

11.3. Luas Lahan Tambang

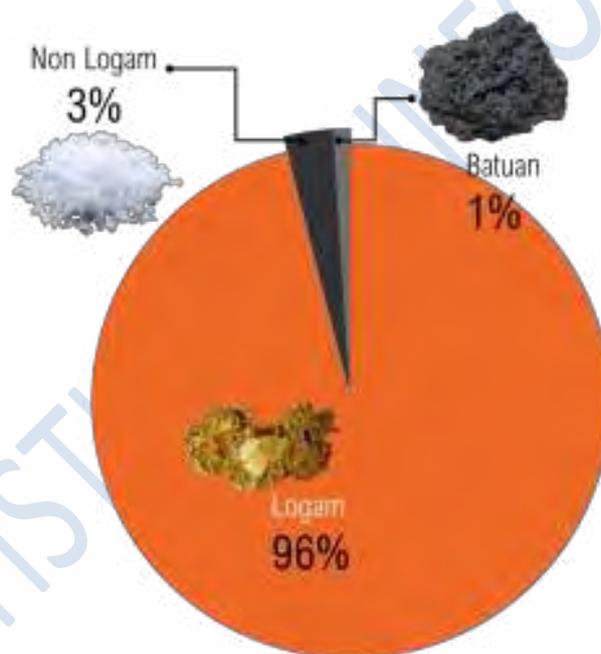
Menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO), lahan adalah suatu daerah di permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Manusia memanfaatkan lahan untuk berbagai hal, antara lain untuk pertanian, mengatur penyimpanan dan aliran air, dan digunakan untuk pertambangan (karena lahan menjadi gudang berbagai bahan mentah dan mineral). Berikut adalah luas lahan tambang yang sesuai dengan IUP dan IPR yang dikeluarkan pemerintah provinsi NTB Tahun 2014-2018.



Gambar 11.4. Luas Lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Jumlah IUP dan IPR periode Tahun 2014-2018 meningkat rata-rata sebesar 9,56 persen per Tahun, yaitu 187 izin pada Tahun 2014 menjadi 261 izin pada Tahun 2018. Namun, luas lahan tambang menurut IUP dan IPR yang telah diterbitkan periode Tahun 2014-2018 menurun rata-rata sebesar 20,59 persen per Tahun, yaitu 419.754,76 Ha pada Tahun 2014 menjadi 128.343,59 Ha pada Tahun 2018. Luas lahan tambang sesuai dengan IUP yang diterbitkan periode Tahun 2014-2018 menurun rata-rata sebesar 20,58 persen per Tahun, yaitu 419.100 Ha pada Tahun 2014 menjadi 128.311,59 Ha pada Tahun 2018. Luas lahan tambang sesuai dengan IPR yang diterbitkan periode Tahun 2014-2018 menurun rata-rata sebesar 37,48 persen per Tahun, yaitu 654 Ha pada Tahun 2014 menjadi 32 Ha pada Tahun 2018. Berikut adalah luas lahan tambang dan jumlah IUP/IPR yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota di NTB Tahun 2018 menurut kabupaten/kota.

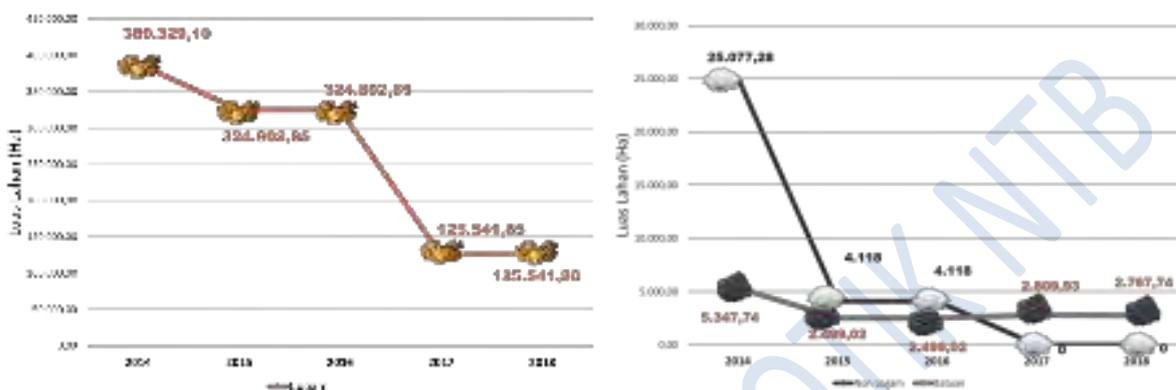


Gambar 11.5. Perbandingan Luas Lahan Tambang Berdasarkan IUP dan IPR Mineral (Logam), Bukan Logam dan Batuan di Nusa Tenggara Barat

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Gambar 11.5. menyajikan persentase luas lahan tambang dari masing-masing jenis pertambangan, seperti mineral (logam), bukan logam dan batuan. Data di atas diperoleh dengan cara mencari rata-rata dari luas lahan tambang berdasarkan IUP dan IPR masing-masing jenis pertambangan Tahun 2014-2018. Dari gambar 11.8 diketahui

bahwa 96 persen lahan tambang yang ada di NTB merupakan tambang mineral. Posisi kedua ditempati oleh tambang bukan logam dengan persentase 3 persen dari total luas lahan tambang NTB, Batuan menempati urutan terakhir dengan persentase 1 persen. Berikut adalah luas lahan tambang mineral (logam), bukan logam dan batuan Tahun 2014-2018.



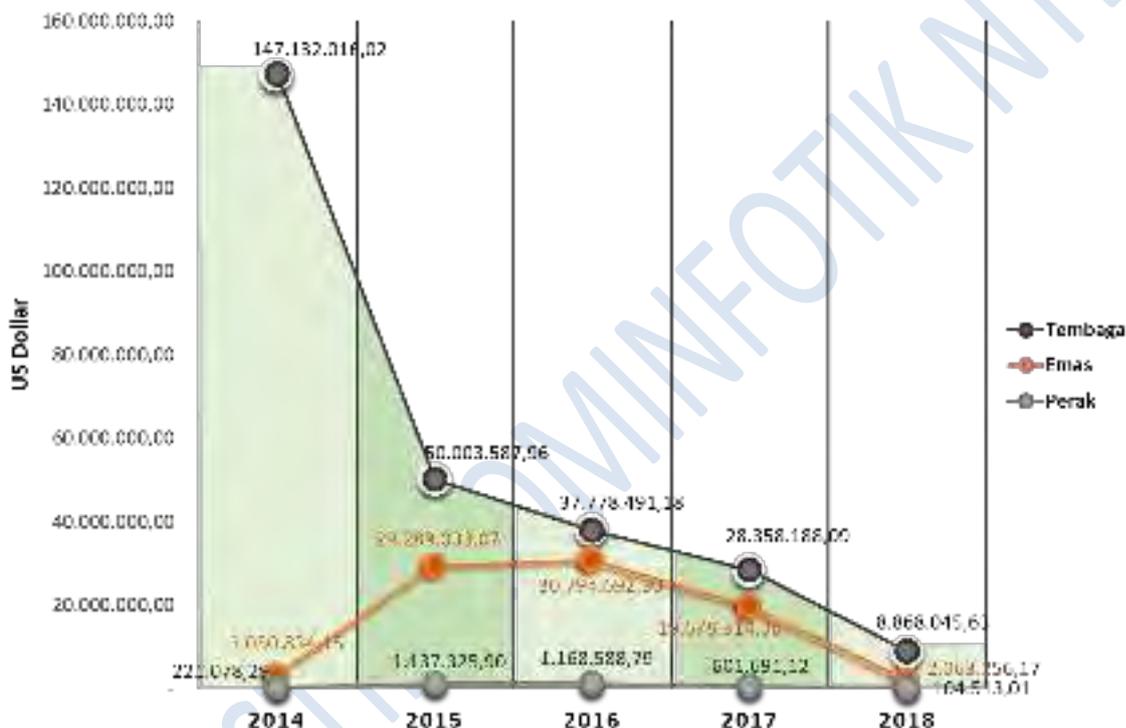
Gambar 11.6. Luas Lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral (Logam), Bukan Logam dan Batuan di NTB Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Luas lahan tambang menurut IUP dan IPR yang telah diterbitkan periode Tahun 2014-2018 menurun rata-rata sebesar 20,59 persen per Tahun, yaitu 419.754,12 Ha pada Tahun 2014 menjadi 128.309,64 Ha pada Tahun 2018. Luas lahan tambang mineral periode Tahun 2014-2018 menurun rata-rata sebesar 19,48 persen per Tahun, yaitu 389.329,1 Ha pada Tahun 2014 menjadi 125.541,85 Ha pada Tahun 2018. Luas lahan tambang bukan logam, periode Tahun 2014-2018 menurun rata-rata sebesar 45,89 persen per Tahun, yaitu 25.077,68 Ha pada Tahun 2014 menjadi 0 Ha pada Tahun 2018. Luas lahan tambang batuan periode Tahun 2014-2018 menurun rata-rata sebesar 10,58 persen per Tahun, yaitu 5.347,74 Ha pada Tahun 2014 menjadi 2.767,74 Ha pada Tahun 2018.

11.4. Royalti PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT)

Royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam. Dalam kasus ini, pemilik tanah (Indonesia) menyewakan tanahnya ke perusahaan minyak atau perusahaan penambangan (PTNNT), sehingga Indonesia akan memperoleh royalti atas dasar jumlah minyak yang dihasilkan. Berikut adalah data pembayaran royalti PTNNT Tahun 2014-2018 menurut jenis konsentrasinya (tembaga, emas dan perak).



Gambar 11.7. Pembayaran Royalti PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) Tahun 2014-2016/PT. AMNT Tahun 2017-2018 Menurut Jenis Konsentrasinya

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Sesuai dengan ketentuan Kontrak Karya, PT.NNT/PT. AMNT setiap Tahun membayar royalti kepada Pemerintah Indonesia. Secara keseluruhan, pembayaran royalti PT. AMNT Tahun 2018 tercatat sebesar 11.035.814,81 USD. Pembayaran royalti ini turun 77,31 persen dibandingkan dengan pembayaran royalti Tahun 2017. Dibandingkan Tahun 2017, pembayaran royalti PT. AMNT Tahun 2018 menurun sebesar 37.602.378,46 USD yaitu dari 48.638.193,26 USD pada Tahun 2017 menjadi 11.035.814,81 USD pada Tahun 2018. Penyumbang royalti terbanyak adalah

konsentrat tembaga, yaitu 80,36 persen royalti berasal dari tambang tembaga, 18,70 persen royalti berasal dari tambang emas dan hanya 0,95 persen royalti berasal dari tambang perak.

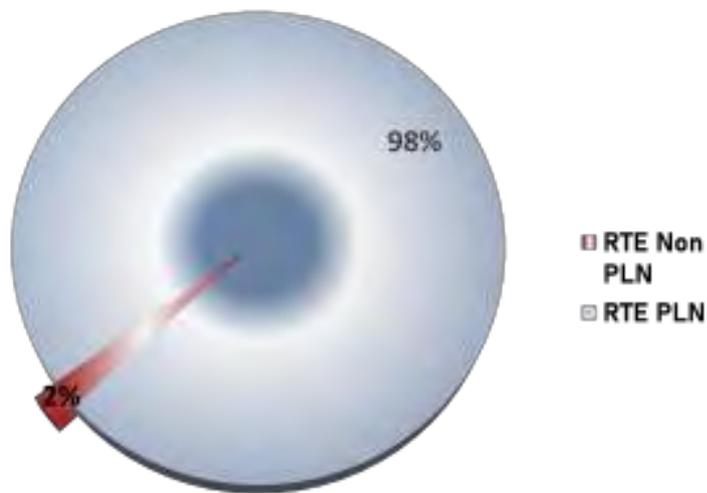
11.5. Elektrifikasi

Listrik merupakan aspek terpenting penunjang aktivitas kehidupan manusia. Dengan adanya listrik dunia yang gelap akan terlihat terang, karena dengan adanya energi listrik mampu menyalakan lampu-lampu penerang di sepanjang jalan, di rumah, kantor, mall, dan tempat-tempat penting lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), elektrifikasi adalah pemakaian tenaga listrik. Berikut adalah jumlah Rumah Tangga (RT) yang sudah memiliki akses listrik.



Gambar 11.8. Jumlah Rumah Tangga dan Rumah Tangga Elektrifikasi Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

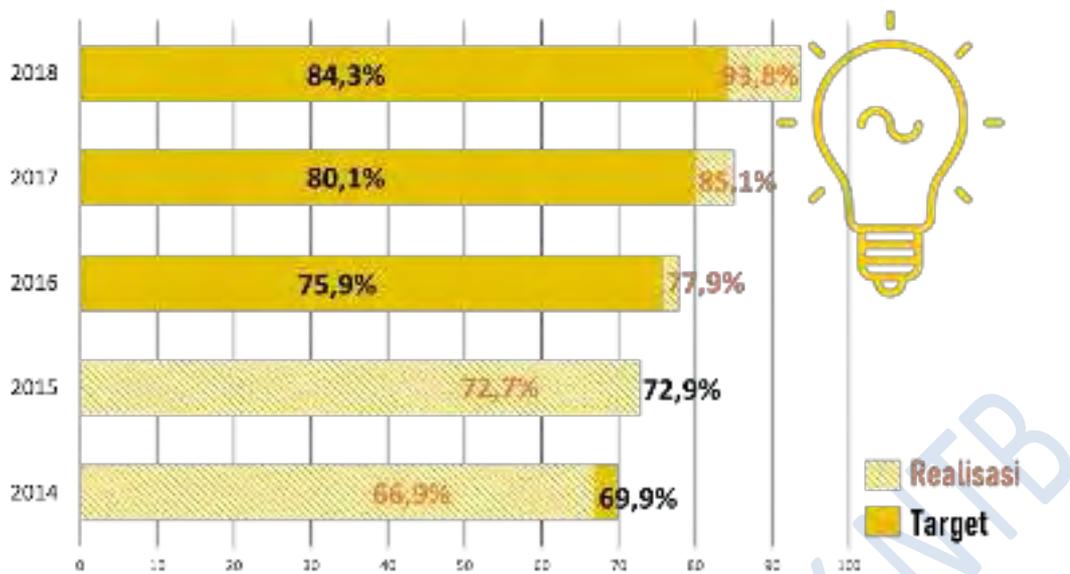


Gambar 11.9. Perbandingan Rumah Tangga Elektrifikasi PLN dan Non-PLN Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

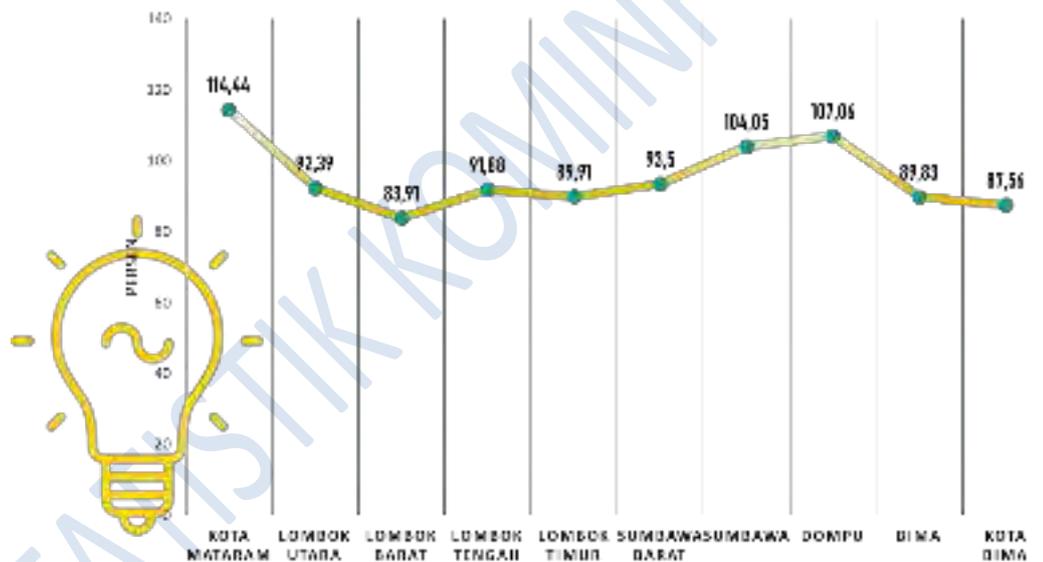
Jumlah Rumah Tangga (RT) di NTB periode Tahun 2014-2017 meningkat rata-rata sebesar 1,47 persen per Tahun, yaitu 1.314.413 RT pada Tahun 2014 menjadi 1.392.877 RT pada Tahun 2018. Jumlah Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses listrik (RT elektrifikasi) di NTB periode Tahun 2014-2018 meningkat rata-rata sebesar 10,43 persen per Tahun, yaitu 879.525 RT pada Tahun 2014 menjadi 1.306.857 RT pada Tahun 2018. Jumlah ini masih di bawah jumlah RT di NTB. Rata-rata selisih jumlah RT dengan RT elektrifikasi Tahun 2014-2018 adalah 278.583 RT, yang artinya pada Tahun 2014-2018 rata-rata terdapat 278.583 RT yang belum memiliki akses listrik. Listrik yang diperoleh RT di NTB berasal dari PLN atau non-PLN. Dari total RT yang ada di NTB, sebanyak 98 persen RT menggunakan aliran listrik dari PLN dan 2 persen RT menggunakan aliran listrik non-PLN.

Rasio elektrifikasi menandakan perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah penduduk di suatu wilayah/negara. Rasio elektrifikasi sangat berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi di Indonesia pada Tahun 2017 sebesar 92,75 persen. Berikut adalah capaian rasio elektrifikasi di NTB Tahun 2014-2017.



Gambar 11.10. Rasio Elektrifikasi di NTB Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB



Gambar 11.11. Rasio Elektrifikasi di NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

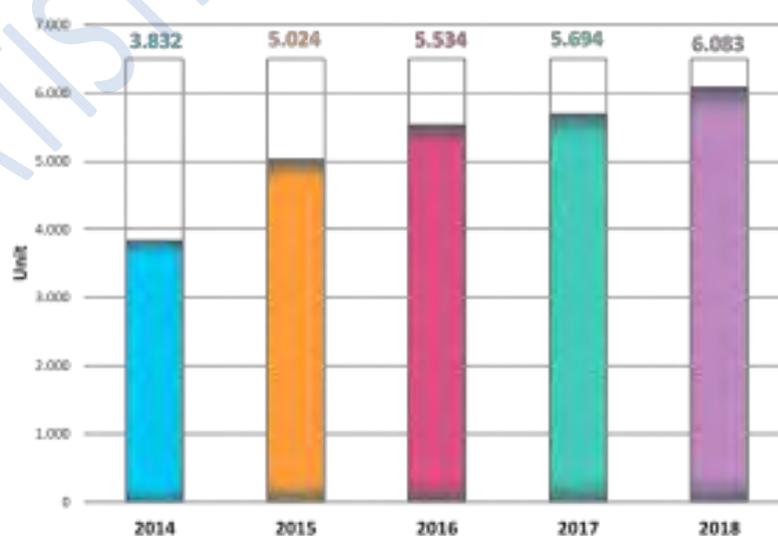
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Setiap Tahun, pemerintah memiliki target rasio elektrifikasi. Tahun 2018 sebesar 84,3 persen. Angka rasio elektrifikasi atau persentase perbandingan rumah tangga yang sudah mendapatkan listrik dengan total rumah tangga di NTB, dalam lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pada Tahun 2014, angka rasio elektrifikasi NTB berada di angka 66,9 persen, sedangkan pada Tahun 2018 angka ini telah mencapai 93,8 persen. Rata-rata kenaikan rasio elektrifikasi di NTB sebesar 6,73

persen per tahun. Realisasi rasio elektrifikasi di NTB dari Tahun 2014-2018 sudah melebihi target pemerintah. Kota Mataram merupakan kabupaten/kota dengan rasio elektrifikasi tertinggi di NTB dengan 114,44 persen. Kabupaten Dompu merupakan kabupaten/kota dengan rasio elektrifikasi terendah di NTB dengan 107,06 persen.

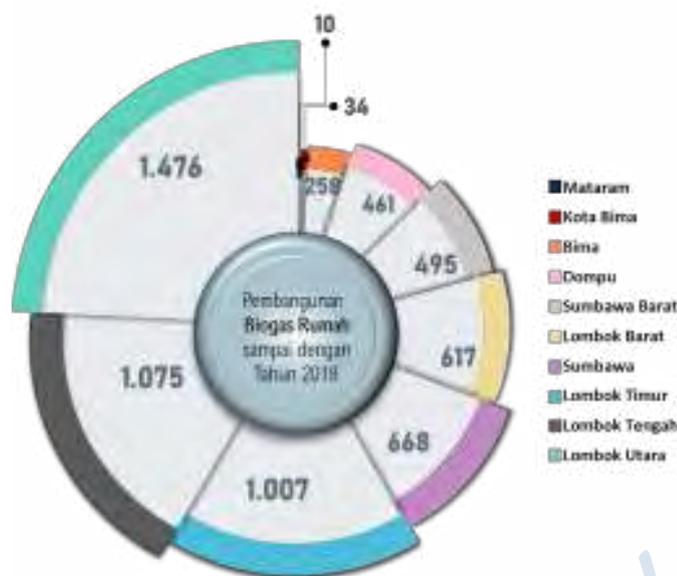
11.6. Biogas

Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk diantaranya, kotoran manusia dan hewan, limbah domestik (rumah tangga), sampah *biodegradable* atau setiap limbah organik yang *biodegradable* dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Methana dalam biogas bila terbakar akan relatif lebih bersih dari batubara, dan menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon dioksida yang lebih sedikit. Pemanfaat biogas memegang peranan penting dalam manajemen limbah karena metana merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya dalam pemanasan global bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Karbon dalam biogas merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, sehingga bila dilepaskan lagi ke atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon di atmosfer bila di bandingkan dengan bahan bakar fosil. Berikut adalah jumlah biogas rumah di NTB Tahun 2014-2016.



Gambar 11.12. Jumlah Biogas Rumah di NTB Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB



Gambar 11.13. Jumlah Biogas Rumah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

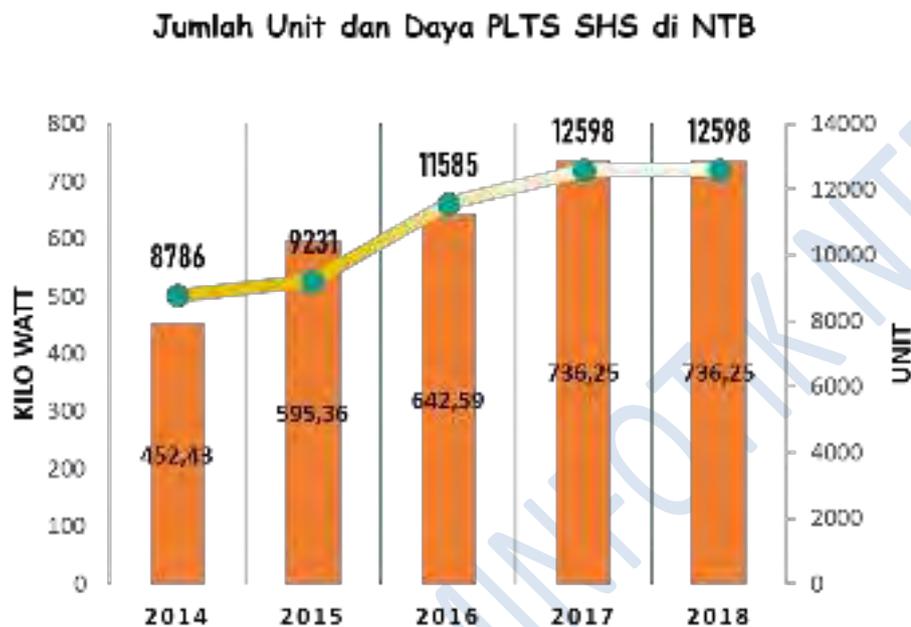
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Pada Tahun 2014, jumlah biogas rumah di NTB berada di angka 3.832 unit, sedangkan pada Tahun 2018 angka ini telah mencapai 6.083 unit. Jumlah biogas rumah di NTB meningkat sebesar 12,75 persen per tahun. Pada Tahun 2018, jumlah biogas rumah meningkat pada beberapa kabupaten/kota seperti Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Peningkatan tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 16,74 persen. Pada Tahun 2017 jumlah biogas rumah di Kabupaten Lombok Tengah sejumlah 907 unit dan pada Tahun 2018 menjadi 1.057 unit.

11.7. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik menggunakan efek fotoelektrik. PLTS seperti ini sering disebut Pembangkit Listrik Tenaga Surya *Solar Home System* (PLTS SHS). PLTS SHS adalah mini pemangkit yang dapat terpasang di rumah secara mandiri. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor.

PLTS seperti ini sering disebut dengan PLTS Komunal (PLTS Terpusat). PLTS komunal merupakan sistem pembangkit listrik alternative untuk daerah-daerah terpencil/pedesaan yang tidak terjangkau oleh jaringan PLN. Berikut adalah rekapitulasi pembangunan PLTS di NTB Tahun 2014-2018.

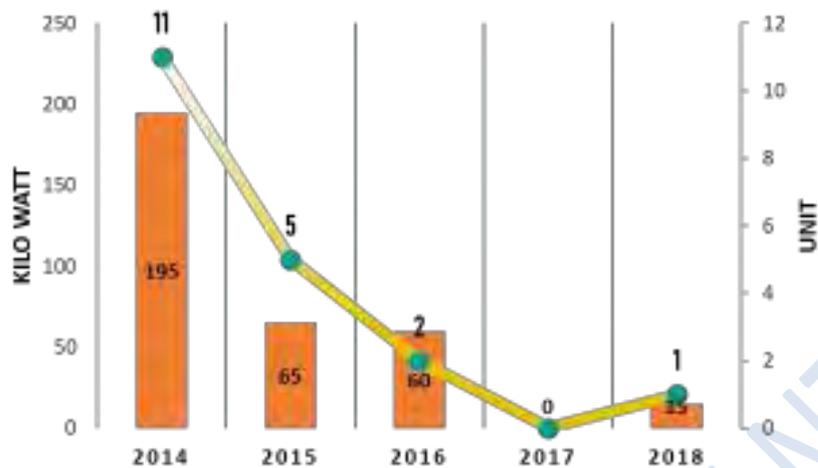


Gambar 11.14. Rekapitulasi Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) SHS dan Daya yang Dihasilkan di NTB Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Dari gambar 11.14. Pada Tahun 2018, terdapat 12.598 unit PLTS SHS di NTB dengan daya yang dihasilkan 736,25 kW. Sedangkan di Tahun yang sama, hanya ada 1 unit PLTS Komunal dengan daya yang dihasilkan 15 kW. Periode Tahun 2014-2018, jumlah PLTS SHS meningkat 9,83 persen per Tahun, dan yaitu 8.786 unit di Tahun 2014 menjadi 12.598 unit Tahun 2018, sedangkan untuk daya dari PLTS SHS, terjadi peningkatan 13,52 persen per Tahun yaitu 452,43 kW Tahun 2014 meningkat menjadi 736,25 kW di Tahun 2018.

Jumlah Unit dan Daya PLTS Komunal di NTB

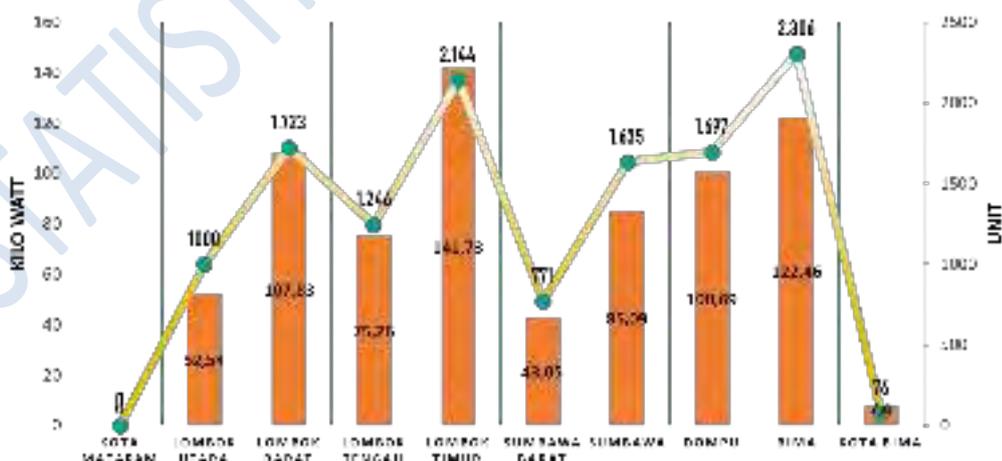


Gambar 11.15. Rekapitulasi Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dan Daya yang Dihasilkan di NTB Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah PLTS Komunal sejumlah unit jika dibandingkan dengan Tahun 2017, yaitu 0 unit di Tahun 2017 menjadi 1 unit Tahun 2018, dan pada satu unit PLTS komunal tersebut dihasilkan daya sebesar 15 kW. Berikut adalah rekapitulasi pembangunan PLTS di NTB Tahun 2018 menurut kabupaten/kota.

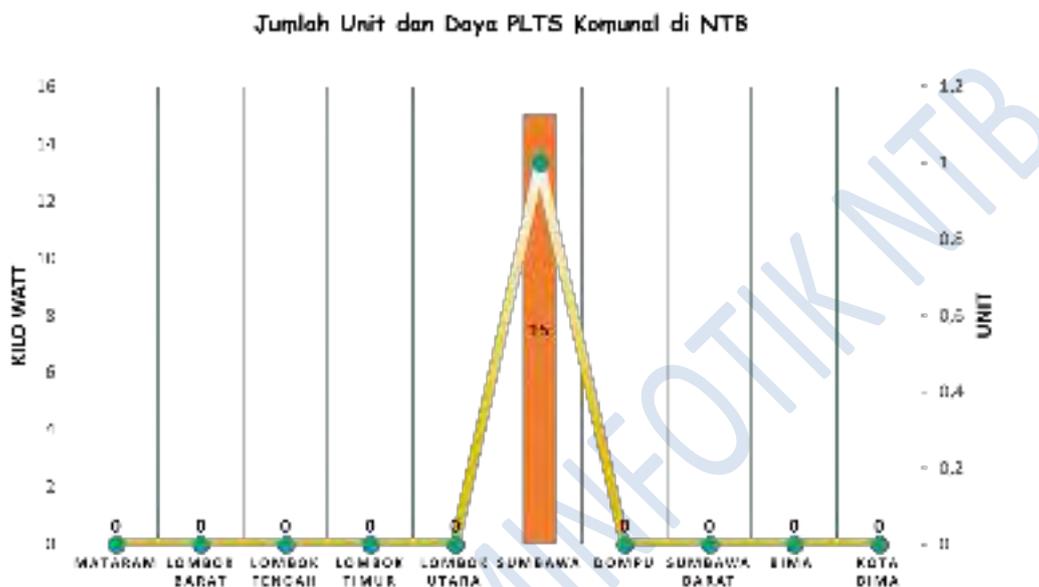
Jumlah Unit dan Daya PLTS SHS di NTB



Gambar 11.16. Rekapitulasi Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) SHS dan Daya yang Dihasilkan di NTB Tahun 2018 Menurut Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Pada Tahun 2018, PLTS SHS paling banyak terdapat di Kabupaten Bima yaitu 2.306 unit PLTS SHS, namun daya yang dihasilkan PLTS SHS paling besar ada di Kabupaten Lombok Timur dengan 141,73 kW. Rata-rata daya yang dihasilkan PLTS SHS di NTB Tahun 2018 sebesar 0,062 KV artinya 1 (satu) PLTS SHS di NTB dapat menghasilkan 0,062 kW.



Gambar 11.17. Rekapitulasi Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dan Daya yang Dihasilkan di NTB Tahun 2018 Menurut Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Pada Tahun 2017, PLTS Komunal paling banyak terdapat di Kabupaten Sumbawa yaitu 1 unit PLTS Komunal, daya yang dihasilkan PLTS Komunal yaitu 15 kW.

11.8. Daftar Sumur Eksplorasi dan Sumur Produksi

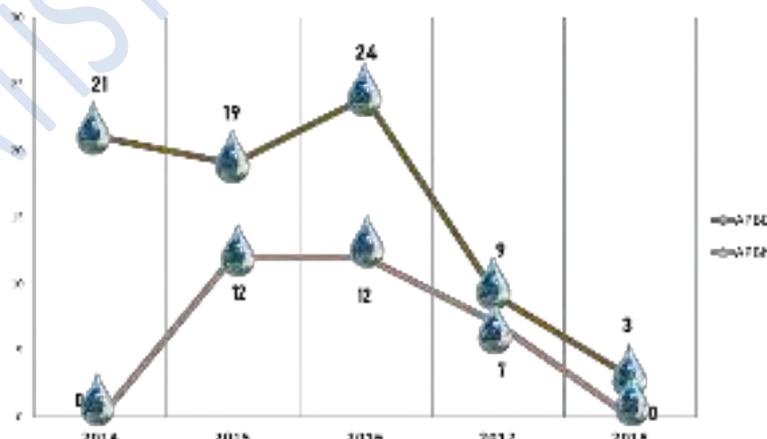
Pada musim penghujan, air permukaan sebagai salah satu komponen air tawar dipasok dari air hujan dan air tanah. Sedangkan pada musim kemarau, air permukaan sebagian besar dipasok dari air tanah bahkan pada kondisi tertentu seluruh air permukaan tersebut dipasok hanya dari air tanah. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan air di musim kemarau sangat ditentukan oleh ketersediaan air tanah. Air tanah dapat terbentuk dalam jangka waktu bulanan hingga ribuan Tahun, tergantung

curah hujan dan kondisi geologi setempat. Hal ini lah yang menyebabkan ketersediaan air tanah di alam terbatas, sehingga air tanah merupakan sumber daya air yang sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, Kementerian ESDM memberikan bantuan pembangunan infrastruktur energi berupa pembangunan sumbur bor air tanah. Fokus pembangunan diprioritaskan untuk daerah yang mengalami krisis air dan daerah tertinggal. Dengan harapan, ketersediaan air bersih mampu menunjang pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Berikut adalah rekapitulasi pembangunan sumur bor air tanah di NTB Tahun 2014-2018.



Gambar 11.18. Rekapitulasi Pembangunan Sumur Bor Air Tanah di NTB Menurut Kabupaten/Kota sampai dengan Tahun 2018

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB



Gambar 11.19. Rekapitulasi Pembangunan Sumur Bor Air Tanah di NTB Tahun 2014-2018

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB

Hingga Tahun 2018, di NTB telah dibangun 107 titik sumur bor air tanah, baik sumur eksplorasi maupun sumur produksi dan paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok Timur sejumlah 29 titik. Pembangunan sumbur bor air tanah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebesar 71 persen sumur yang telah dibangun dibayai oleh APBD dan 29 persen dibiayai APBN. Pada Tahun 2014, terdapat 21 titik sumur air tanah yang dibangun dari APBD, sedangkan pada Tahun 2018 angka ini mencapai 3 titik saja. Pembangunan sumur air tanah yang dibiayai oleh APBD di NTB menurun sebesar 28,1 persen per tahun. Pada Tahun 2014, tidak ada sumur air tanah yang dibangun dari APBN, sedangkan pada Tahun 2017 angka ini telah mencapai 7 titik dan pada Tahun 2018 tidak ada lagi sumur air tanah yang dibangun dari APBN. Pembangunan sumur air tanah yang dibiayai oleh APBN di NTB menurun sebesar 35,42 persen per tahun.

BAB XII

PENUTUP

12.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan uraian pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB baik dari wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) setiap Tahunnya mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 tercatat sebanyak 1.204.556 wisatawan mancanegara dan 1.607.823 wisatawan nusantara yang datang ke provinsi NTB.
2. Data Tahun 2018 mencatat jumlah angkutan darat yang beroperasi melalui terminal di Provinsi NTB sebanyak 113.742 unit yang terdiri dari Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) berupa bus dan kendaraan umum, Angkutan Desa (AngDes), Sepeda Motor, Mobil, Pick Up dan Cidomo, sementara untuk angkutan udara jumlah penumpang tercatat sebanyak 3.691.972 melalui Bandara ZAM, 149.565 orang melalui Bandara Sultan M. Kaharuddin dan 363.959 orang melalui Bandara Sultan M. Salahuddin.
3. Jumlah kejadian bencana pada Tahun 2018 sebanyak 93 kejadian bencana alam yang terdiri atas 5 kali Gempa Bumi, 53 kali Banjir, 9 kali Tanah Longsor, 9 kali Kekeringan, 13 kali Cuaca Ekstrem dan 4 kali Banjir Bandang.
4. Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi wewenang kabupaten/kota di NTB yaitu 440 buah, 69 persen diantaranya termasuk dalam wilayah sungai Pulau Lombok, 19 persen termasuk wilayah sungai Bima-Dompu dan 12 persen sisanya merupakan wilayah sungai Sumbawa.
5. Jumlah pembangunan rumah layak huni di Provinsi NTB pada Tahun 2018 sebanyak 2.171 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan jumlah paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok Timur sebesar 30 persen dari total pembangunan di seluruh kabupaten/kota di NTB.
6. Untuk mendukung beberapa program gubernur, BAPPEDA Provinsi NTB telah menyusun beberapa perencanaan diantaranya, perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan bidang politik dan pemerintahan, perencanaan bidang pendidikan dan kesehatan, perencanaan wilayah pembangunan infrastruktur,

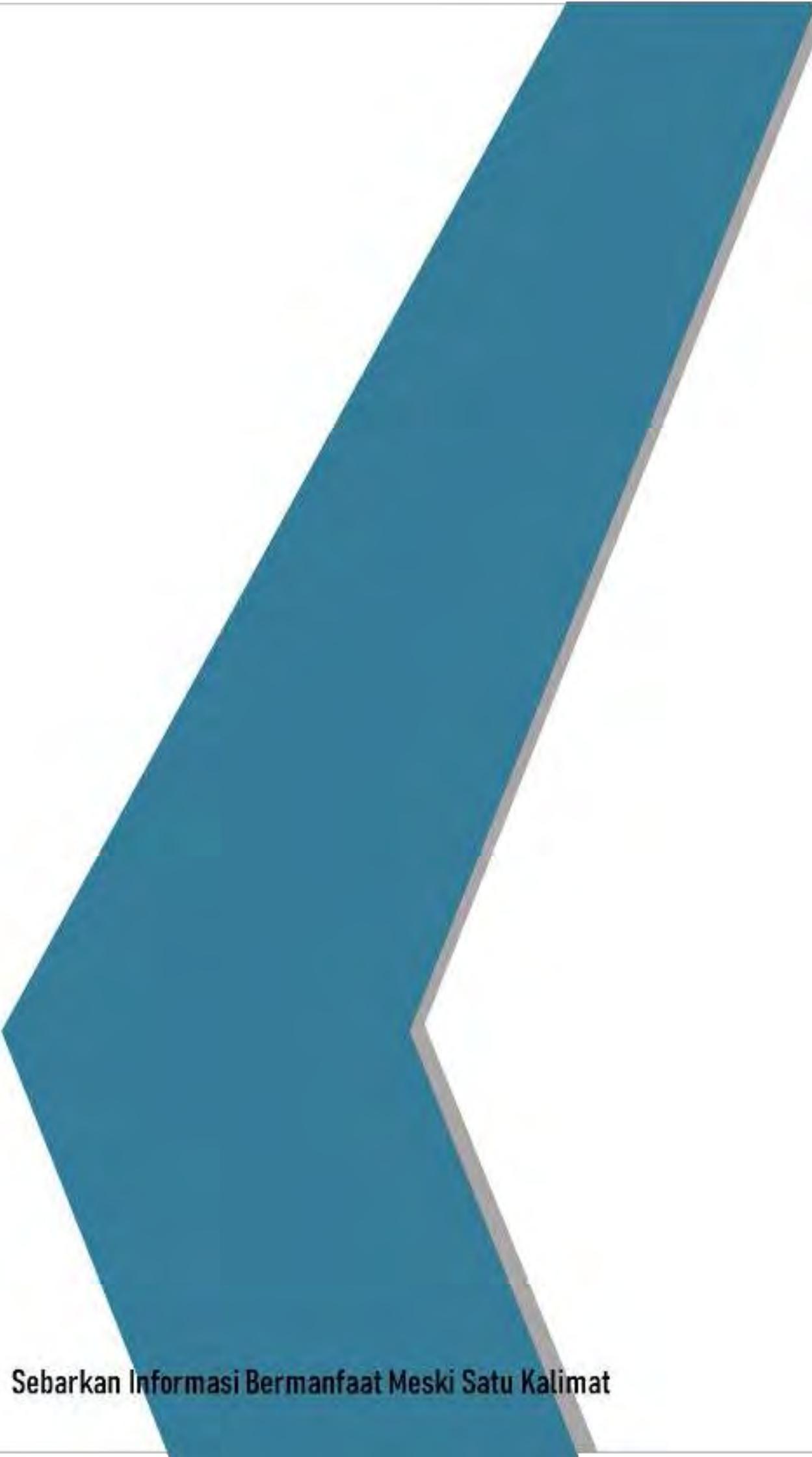
pemantauan evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan, penyusunan peta, penelitian dan pengembangan sosial dan budaya, dan kajian dan penelitian ekonomi.

7. Jumlah pengunjung website <https://www.ntbprov.go.id/> pada Tahun 2018 mencapai 174.456 pengunjung meningkat 90,75 persen dibandingkan dengan Tahun 2017.
8. Terdapat empat jenis rekapitulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD diantaranya pengadaan barang, pengadaan barang konstruksi, pengadaan jasa konsultasi dan pengadaan jasa lainnya. Pada Tahun 2018 terdapat total 151 paket.
9. Hutan terbagi atas tiga jenis berdasarkan fungsinya yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Menurut data Tahun 2018 dari total luas hutan di Provinsi NTB, sebesar 42,36 persen hutan berfungsi sebagai hutan konservasi, 41,4 persen sebagai hutan lindung, dan 16,2 persen sebagai hutan produksi.
10. Rasio elektrifikasi menunjukkan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan total jumlah penduduk. Sampai dengan Tahun 2018 nilai rasio elektrifikasi NTB mencapai 93,83 persen dan mengalami peningkatan 8,73 persen dibandingkan dengan Tahun 2107.

12.2. Saran

Saran yang didapatkan berdasarkan uraian pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas data sektoral sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk pelaksanaan pembangunan daerah kedepannya, karena pembangunan daerah haruslah berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Data-data yang sudah ada saat ini untuk terus ditingkatkan dan dipelihara serta terus diperbaharui setiap tahunnya, sehingga dapat mengetahui perkembangan pembangunan yang ada di Provinsi NTB.
3. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di provinsi NTB secara kontinyu dan berkesinambungan secara sinergis.
4. Meningkatkan Forum Data sektoral dengan OPD secara berkala.



Sebarkan Informasi Bermanfaat Meski Satu Kalimat